

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

**FAKTOR-FAKTOR KONFLIK INTERN PARTAI KONGRES-INDIRA (I)
(STUDI KASUS TENTANG KEKALAHAN PARTAI KONGRES-INDIRA (I)
DALAM PEMILU INDIA 1996-1999)**

S K R I P S I

MILIK PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS JEMBER

Disajikan Guna memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S I)

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

Asal : Madinah
Pembelian :
Tanggal : 19 APR 2000
No. Induk : PTI '2000, 9891

Oleh :

Dwi Harini Agustin

EIAI:5036

Pembimbing

Drs. Asrial Aziz

Drs. Achmad Habibullah, MSI

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2000

PENGESAHAN

DITERIMA DAN DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA
PENGUJI SKRIPSI GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERITAS JEMBER
PADA

HARI : SENIN
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2000
PUKUL : 10.00-11.00 WIB

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sj. -

Drs. Sjoekron Sjah, SU

Sekretaris

Asrial

Drs. Asrial Aziz

TEAM PENGUJI

- 1. Drs. Sjoekron Sjah, SU
- 2. Drs. Asrial Aziz
- 3. Drs. H. Nuruddin M. Yasin
- 4. Dra. Achmad Habibullah, Msi

(*Sj. -*)
 (*Asrial*)
 (*Nuruddin*)
 (*Achmad*)

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dekan
a.n Dekan
Pembantu Dekan I

Umadi
Drs. Umadi Radi, MA
NIP. 130 239 058

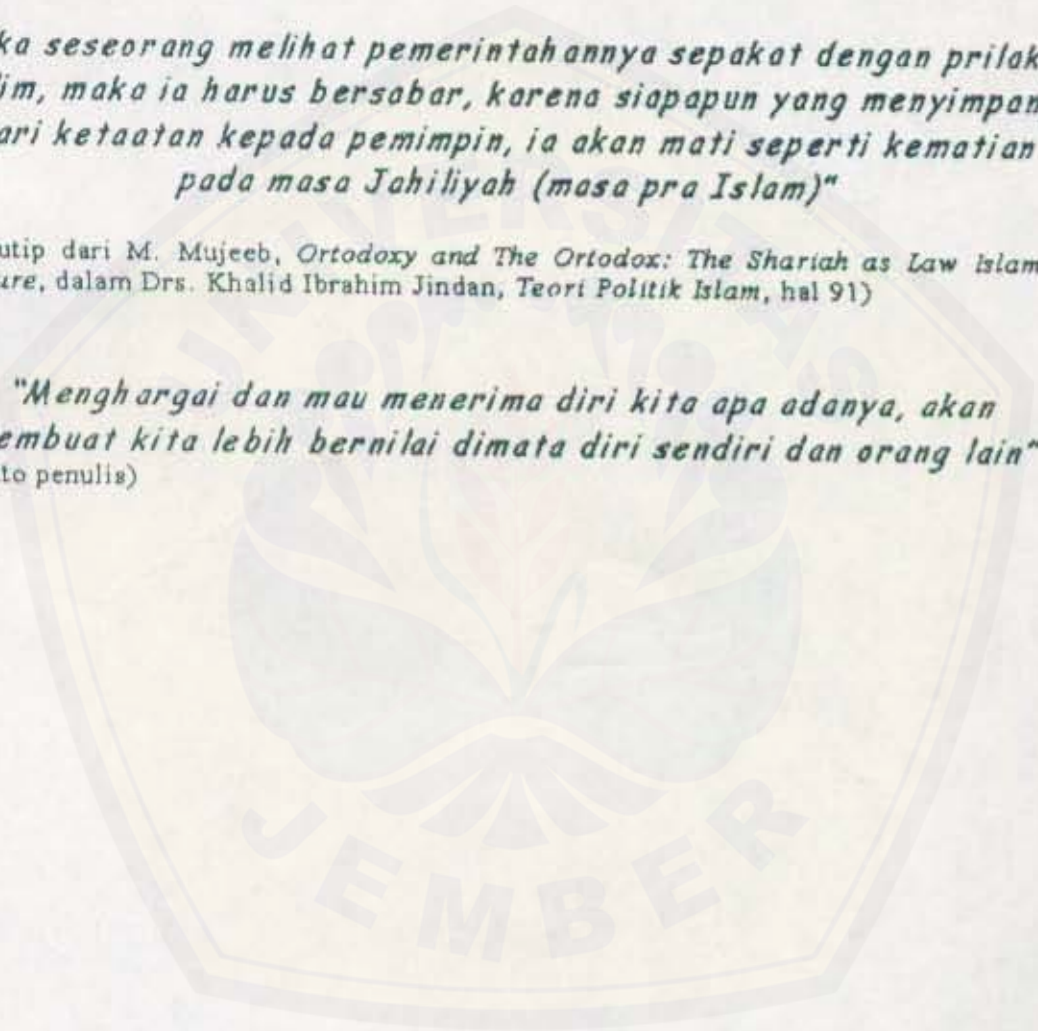


Motto:

'Jika seseorang melihat pemerintahannya sepakat dengan perilaku zalim, maka ia harus bersabar, karena siapapun yang menyimpang dari ketaatan kepada pemimpin, ia akan mati seperti kematian pada masa Jahiliyah (masa pra Islam)'

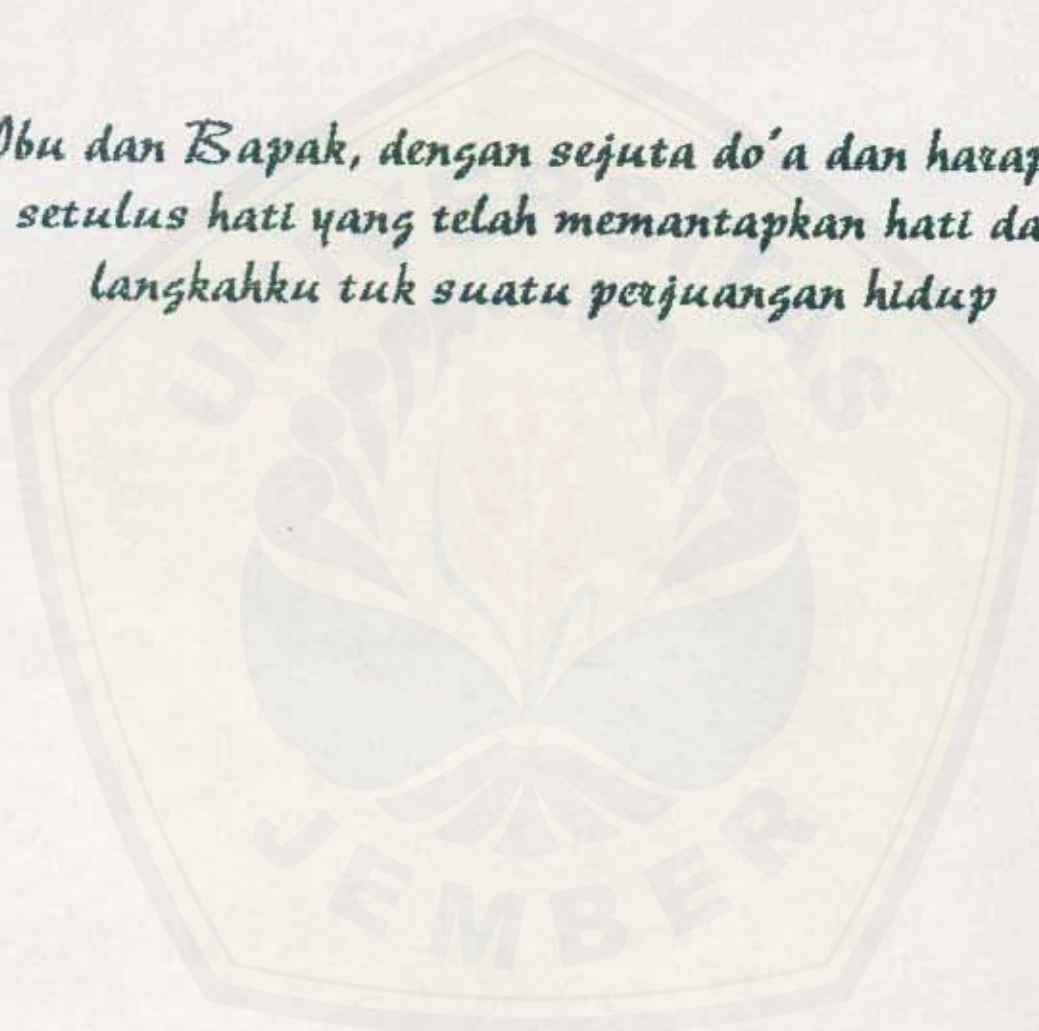
(Dikutip dari M. Mujeeb, *Ortodoxy and The Ortodox: The Shariah as Law Islamic Culture*, dalam Drs. Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, hal 91)

"Menghargai dan mau menerima diri kita apa adanya, akan membuat kita lebih bernilai dimata diri sendiri dan orang lain"
(Motto penulis)



Persembahkan :

*Ibu dan Bapak, dengan sejuta do'a dan harapan
setulus hati yang telah memantapkan hati dan
langkahku tuk suatu perjuangan hidup*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sadar bahwa penyelesaian tulisan ini merupakan anugerah dari Allah SWT yang tak terlukiskan.

Keterarikan penulis pada sistem pemerintahan India dan khususnya pada kehidupan Partai Kongres (I) yang penuh kontroversi telah mengarahkan penulis untuk mengangkat judul "Faktor-Faktor Konflik Intern Partai Kongres (I) (studi kasus tentang Kekalahan Partai Kongres (I) dalam Pemilu India 1996-1999)", menjadi sebuah skripsi. Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu kewajiban diantara beberapa kewajiban yang harus penulis penuhi, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari adanya bantuan baik materiil maupun dorongan moril dari berbagai pihak. Baik itu pada instansi-instansi terkait, pembimbing, keluarga, dan sahabat. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Drs. Asrial Azis, selaku dosen pembimbing dan dosen wali pengganti;
2. Drs. Achmad Habibullah, Msi, selaku asisten pembimbing;
3. Drs. Supriyadi, selaku dosen wali;
4. Drs. Sjoekron Sjah, SU, selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional;
5. Profr.Drs. H. Bariman, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; staff dan karyawan perpustakaan CSIS Jakarta, LIPI, UPT perpustakaan Universitas Jember, dan perpustakaan kampus FISIP;

7. Keluarga dan saudaraku, mas Aan "Prihantono", serta my twins sister Yuli "Ulik" Nugraheni dan Yullin "Utin" Kurniati. I hope our dream will be come true. Never give up !!
8. Semua sahabat yang selalu dihati; ANNIA (Arieb"busy",eNur,Anik) "The Power of Love"; LIARDDE (Lidia,Rida"where",Denis,Diah); Yuli; dan semua warga Kelinci 8A, yang telah mengisi hari-hari indah persahabatanku;
9. Tak lupa kanca-kanca HI'95 (get ready for challenge!!); Elisa "danieldaren" thanks for everything. Nana, Rina, Difa, Yani, buat sebagian info-infonya. Reni, Irma, Elik, Bagus and The Gung Crew, Nugie, Edwan, Pungky, mba' Srie, double Wahyu, Windi (thanks for U're kindness). CELDIN "The Superstitious", I will see u someday in real. I promise; sOmeOne flying without wings; Crew Kenanga Rental, Hery and friends, yang telah jadi bagian dari skripsiku. Thanks a lot !!

Semoga apa yang telah penulis hasilkan ini dapat berguna bagi semua pihak. Walau apa yang telah penulis perbuat ini bukanlah hal yang luar biasa, namun penulis bangga dapat melakukannya.

Jember, Februari 2000

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	6
1.2.1 Pembatasan Materi	6
1.2.2 Pembatasan Waktu	7
1.3 Problematika	7
1.4 Kerangka Dasar Teori	8
1.5 Hipotesa	14
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Tahap Pengumpulan Data	16
1.6.2 Metode Analisa Data	17
1.7 Pendekatan	18
BAB II GAMBARAN UMUM	
2.1 Situasi Sosial dan Ekonomi India	20
2.2 Situasi Politik dan Pemerintahan India	24
2.2.1 Sistem Kepartalan dan Partai Politik	28
2.2.2 Partisipasi Politik, Pemilu dan Kampanye.....	34
BAB III SEJARAH PARTAI KONGRES (I)	
3.1 Pergerakan Indian Nationalist Congress	42
3.2 Partai Kongres (I) dibawah Kepemimpinan	

Indira Gandhi (1978-1984) dan Rajiv Gandhi (1984-1989)	50
3.2.1 Kebangkitan Partai Kongres (I) pada Pemilu 1991	60
3.2.2 Partai Kongres (I) dibawah Narashima Rao (1991-1996)	66
3.3 Partai-Partai Politik Saingan Partai Kongres (I) (Baharaty Janata Party dan Front Persatuan)	75
BAB IV KEKALAHAN PARTAI KONGRES (I) DALAM PEMILU INDIA (1991-1999)	
4.1 Kondisi Partai Kongres (I) sejak Pemilu India 1996	81
4.2 Kebijakan Partai Kongres (I) menaikkan Sonia Gandhi (1997)	90
4.3 Faktor-faktor Konflik Intern di tubuh Partai Kongres (I)	97
4.3.1 Isu Skandal Suap dan Korupsi	100
4.3.2 Krisis Kepemimpinan	103
4.3.3 Indikasi Perpecahan atas Pro dan Kontra terhadap Sonia Gandhi sebagai Ketua Partai Kongres (I)	108
4.4 Kekalahan Partai Kongres (I) dalam Pemilu 1999	110
BAB V KESIMPULAN	114
DAFTAR PUSTAKA	viii
LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Partai Kongres (I) atau Partai Kongres-Indira, berdasarkan sejarah perpolitikan India merupakan partai yang terbentuk karena perpecahan dari **Indian National Congress**, hanyalah sebuah badan hasil penjeimaan rasa persatuan dan kebangsaan India. India sebagai negara Dunia Ketiga, memiliki ciri khas terbentuknya partai politik sama dengan kasus terbentuknya partai politik di beberapa negara Dunia Ketiga lain seperti Nigeria (Partai minoritas Buruh), Ghana (The Convention People Party), dan Tanzania (The Tanyangika Africa National Union/TANU)¹. Partai-partai nasionalis tersebut ada karena perjuangan melawan penjajah. Fungsi utamanya adalah untuk mengerahkan dukungan rakyat dalam perang melawan negara kolonial dan untuk meyakinkan semua orang (termasuk mereka sendiri) bahwa bangsa mereka berhak menentukan nasibnya sendiri sebagai suatu entitas sosial dan politik tersendiri. Pada umumnya, kebanyakan keadaan negara di Dunia Ketiga, selalu dihadapkan pada masalah keanekaragaman etnik yang biasanya akan menolak suatu entitas nasional yang baru, maka partai-partai nasional ini berfungsi untuk mobilisasi nasional yangn diharapkan akan memberikan kelompok-kelompok etnis suatu identitas baru yang diperlukan².

¹ Partai-partai dinegara tersebut pada mulanya selalu terjadi pelarangan terhadap terbentuknya partai, seperti Tanzania satu-satunya partai yang legal adalah Chana Cha Mipinduzi (CMM). Dan kehidupan serikat-serikat buruh lebih leluasa karena adanya hak pemogokan/pemogokan dibenarkan oleh hukum. Lihat, Robert P. Clark, *Menguak Kekuasaan dan Politik di Dunia Ketiga*, edisi 3, terjemahan R.G. Soekarjo, Erlangga Jakarta, 1989, hal 117

² *ibid*, hal 119

Namun dari pengalaman yang ada, partai politik dinegara-negara Dunia Ketiga ini sering tidak mampu untuk membina integrasi, akan tetapi malah menimbulkan pengkotakkan dan pertentangan yang mengeras³. Hal ini juga dialami oleh Kongres sebagai sebagai organisasi pergerakan kebangsaan yang berbasis pada rakyat tersebut, memiliki tujuan untuk merubah pemerintahan otokrasi, perbaikan nasib rakyat dan juga menentang pada penjajahan dan imperialisme ekonomi. Pergerakan ini tidak selamanya mampu untuk menekan setiap pergolakan yang timbul akibat keanekaragaman golongan (kasta) serta agama (Hindu dan Islam) serta menyelesaikan segala pertentangan yang timbul di masyarakat India. Selain itu pula sebagai sebuah organisasi, program-programnyapun belum jelas dan tidak didasarkan pada suara bulat pada setiap keputusan yang dihasilkan. Tidak adanya rencana kerja, anggaran dasar, dan peraturan yang jelas juga mengakibatkan sukarnya para pimpinan Kongres untuk tetap memegang persatuan dan mengelakkan perpecahan. Baru pada tahun 1898, dapatlah dibentuk anggaran dasar, namun masih memiliki tujuan yang kabur, yaitu:

*"Kongres kebangsaan India bermaksud mencapai kesejahteraan rakyat India dengan cara-cara yang tidak melanggar undang-undang"*⁴.

Namun bagaimanapun Kongres tetap menjadi tumpuan rakyat India sebagai badan yang dapat merealisasikan rasa persatuan dan kebangsaan bagi rakyat India. Perpecahan yang timbul di tubuh

³ Miriam Budiardjo, *Partisipasi Partai Politik*, sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, PT Gramedia, 1982, hal 20

⁴ T.S.G. Mulia, India, *Sejarah Politik dan Pergerakan Kebangsaan*, PT Balai Pustaka, 1959, hal 145-147

Kongres karena adanya faktor intern dari anggota-anggotanya sendiri, karena selama ini seluruh aset dan gerakan Kongres ini terletak dibawah pemerintah Inggris Raya, sehingga ada sebagian kecil anggotanya yang tidak puas akan sikap Kongres yang selalu bekerja sama dan menunggu perintah dari pemerintah Inggris. Itulah sebabnya Kongres sempat terjadi perpecahan menjadi Kongres yang berhaluan kiri yang dipimpin oleh Tilak⁵.

Setelah Inggris menyerahkan kemerdekaan secara mutlak pada India pada tanggal 15 Agustus 1947, lewat Dewan Perwakilan Rakyat di New Delhi, maka kemudian secara bertahap gerakan kebangsaan Kongres berubah menjadi Partai Kongres⁶. Pada tahun 1969, Partai Kongres mulai mengalami perpecahan, dengan keluarnya beberapa dari anggota partai yang kemudian membentuk organisasi kecil yang disebut Indian Congress Organization (O). Pada tahun 1978, dibawah pimpinan Indra Gandhi Partai Kongres berubah menjadi Indian Nationalist Congress-Indira (I) dan sempat memegang kekuasaan pada tahun 1980-1989 karena perolehan suara mayoritas di perlemen⁷. Diantara tahun-tahun kemenangan Partai Kongres (I) tersebut, pada tanggal 31 Oktober 1984 Indra Gandhi sebagai ketua partai sekaligus Perdana Menteri India terbunuh oleh kelompok Sihks yang menuntut balas atas insiden berdarah di Kull Emas (Golden Temple) di Amritsar. Kedudukannya kemudian digantikan oleh putranya, Rajiv Gandhi sebagai Ketua Partai Kongres dan kemudian dilantik sebagai Perdana Menteri India pada tahun yang sama. Partai Kongres dalam pemilu tahun 1989 sempat mengalami kekalahan karena isu skandal suap dan

⁵ ibid, hal 163-164

⁶ ibid, hal 314-315

⁷ India, Encarta, Microsoft Encyclopedias, 1993-1995

korupsi. Pada penyelenggaraan pemilu tahun 1991, Rajiv Gandhi yang memiliki peluang kembali sebagai Perdana Menteri India terbunuh sebelum sempat pemilu tersebut terselenggarakan, ketika melaksanakan kampanye di kawasan Tamil Nadu oleh sekelompok separatis Gerakan Macan Tamil Aelam⁸.

Kematian Rajiv Gandhi yang tiba-tiba sempat menguncang Partai Kongres, sehingga diputuskan untuk mengangkat Sonia Gandhi sebagai penggantinya. Namun putusan bulat tersebut ditolak oleh pihak Sonia atas permintaan anaknya⁹. Penolakan Sonia Gandhi inilah yang kemudian menaikkan Narashima Rao menjadi pimpinan Partai Kongres dan setelah memenangkan pemilu tahun 1991 Rao menjadi Perdana Menteri. Masa pemerintahan Rao termasuk pemerintahan yang berlangsung cukup lama antara tahun 1991-1996 semenjak kemallian Rajiv Gandhi. Walaupun selama pemerintahan Rao ini banyak gejolak politik dan ekonomi yang akhirnya membuat jatuh pemerintahannya. Namun setelah pemerintahan Rao berakhir, mulailah gejolak intern di Partai Kongres tampak nyata karena kehilangan sesosok pemimpin yang dapat membangkitkan kembali kekuasaan Partai Kongres di pemerintahan India menjadi suatu partai yang memegang posisi penting di Lok Sabha¹⁰.

Semenjak pemerintahan Narashima Rao berakhir, India tidak pernah lagi menghasilkan sebuah pemerintahan yang stabil sampai saat ini. Ketidakstabilan pemerintahan ini mengakibatkan pembangunan di India berjalan tidak lancar karena program-

⁸ Rajiv Gandhi, *ibid*

⁹ Sudip Mazumdar: "Ambition Joined to Pride" (artikel) *Newsweek*, vol CXXX, No 5, 4 Agustus 1997, hal 17

¹⁰ *loc. cit*

program pemerintah yang lambat untuk dilaksanakan. Anggaran negara yang seharusnya untuk pembalkan ekonomi banyak terserap untuk pelaksanaan pemilu. Selama masa 3 tahun tersebut, telah tercatat 5 kali pergantian Perdana Menteri mulai dari Atal Bihari Vajpayee pemilu Mei 1996, kemudian H.D Deve Gowda pada pemilu Juni 1996 sampai Inder Kumar Gujral pada tahun 1997, keduanya dari Partai Front Persatuan hasil koalisi. Setelah pemerintahan Gujral jatuh karena mosi tidak percaya pada bulan November 1997, dan digantikan oleh Atal Bihari Vajpayee kembali pada awal tahun 1998. Namun pemerintahan ini hanya bertahan selama 13 bulan karena mosi tidak percaya¹¹.

Berakhirnya pemerintahan P.M Vajpayee telah memberikan angin segar kepada Partai Kongres untuk menaikkan kembali kekuasaannya di India. Hal ini juga terdorong karena keinginan pendukungnya yang masih menginginkan agar nama Gandhi kembali yang memimpin Partai Kongres sehingga mengakibatkan Partai Kongres berusaha untuk menaikkan kembali Sonia ke puncak pimpinan Partai Kongres sekaligus sebagai Perdana Menteri India, jika menang pemilu yang diselenggarakan pada bulan September-Oktober 1999. Kedatangan Sonia Gandhi kembali ini sempat mengundang pro dan kontra, namun sebagian rakyat India dan anggota Partai Kongres tidak memperlmasalahkannya¹².

Pro dan kontra atas kehadiran Sonia ini, menambah semakin tidak menentunya kehidupan Partai Kongres (I) di masa ini, terutama sekali karena faktor kepemimpinan yang kemampuannya dipandang tidak akan mampu lagi menaikkan popularitas Partai

¹¹ Panji Masyarakat, No.2 tahun III, 28 April 1999

¹² Tempo, 30 Mei 1999, hal 66

Kongres (I), maka penulis ingin mengajukan tulisan dengan judul "Faktor-Faktor Konflik Intern Partai Kongres (I) (Studi kasus tentang kekalahan Partai Kongres (I) dalam Pemilu India 1996-1999)"

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Pembatasan masalah merupakan suatu hal yang penting dalam suatu karya tulis. Batasan masalah yang jelas akan mempermudah penulis dalam membahas dan menganalisa permasalahan dengan sistematis dan terarah. Pembahasan tersebut meliputi materi pembahasan dan jangka waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan judul skripsi. Pembatasan ini dimaksudkan agar tulisan dapat tersusun secara sistematis dan pembahasan selanjutnya akan lebih terfokus atau tidak menyimpang dari akar permasalahan yang penulis ajukan.

1.2.1 Pembatasan materi

Materi yang penulis ambil untuk penulisan ini mengambil salah satu partai yang pernah berkuasa selama 4 dasawarsa dipemerintahan India. Partai Kongres yang merupakan warisan nama "Nehru-Gandhi", pada masa pemerintahan Indira Gandhi-Rajiv Gandhi masih mendapatkan suara mayoritas di Lok Sabha (Majelis Rendah) dari tahun 1980-1984, walaupun sempat kehilangan suara mayoritas pada tahun 1989. Setelah kematian Rajiv Gandhi, Partai Kongres (I) mulai kehilangan simpati dari rakyat dan tidak lagi mampu mempertahankan kekuasaannya di India. Konflik internpun mulai muncul kepermukaan, khususnya yang menyangkut soal kepemimpinan dan kemungkinan timbulnya perpecahan di tubuh Partai Kongres (I) yang sampai saat ini belum mampu untuk diselesaikan, memang perlu dikaji lebih lanjut.

Kongres (I), maka penulis ingin mengajukan tulisan dengan judul "Faktor-Faktor Konflik Intern Partai Kongres (I) (Studi kasus tentang kekalahan Partai Kongres (I) dalam Pemilu India 1996-1999)"

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Pembatasan masalah merupakan suatu hal yang penting dalam suatu karya tulis. Batasan masalah yang jelas akan mempermudah penulis dalam membahas dan menganalisa permasalahan dengan sistematis dan terarah. Pembahasan tersebut meliputi materi pembahasan dan jangka waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan judul skripsi. Pembatasan ini dimaksudkan agar tulisan dapat tersusun secara sistematis dan pembahasan selanjutnya akan lebih terfokus atau tidak menyimpang dari akar permasalahan yang penulis ajukan.

1.2.1 Pembatasan materi

Materi yang penulis ambil untuk penulisan ini mengambil salah satu partai yang pernah berkuasa selama 4 dasawarsa dipemerintahan India. Partai Kongres yang merupakan warisan nama "Nehru-Gandhi", pada masa pemerintahan Indira Gandhi-Rajiv Gandhi masih mendapatkan suara mayoritas di Lok Sabha (Majelis Rendah) dari tahun 1980-1984, walaupun sempat kehilangan suara mayoritas pada tahun 1989. Setelah kematian Rajiv Gandhi, Partai Kongres (I) mulai kehilangan simpati dari rakyat dan tidak lagi mampu mempertahankan kekuasaannya di India. Konflik internpun mulai muncul kepermukaan, khususnya yang menyangkut soal kepemimpinan dan kemungkinan timbulnya perpecahan di tubuh Partai Kongres (I) yang sampai saat ini belum mampu untuk diselesaikan, memang perlu dikaji lebih lanjut.

1.2.2 Pembatasan waktu

Penulis dalam melakukan penulisan ini membatasi waktu antara tahun 1996-1999, yaitu semenjak Partai Kongres (I) selalu mengalami kekalahan dalam 3 kali pemilu pada tahun-tahun tersebut. Tak menutup kemungkinan penulis juga akan mengambil peristiwa-peristiwa sebelum tahun tersebut yaitu tahun 1980 sampai 1991 yaitu masa-masa pemerintahan Indira Gandhi sampai pada masa berakhirnya dan kematian Rajiv Gandhi serta peristiwa pada masa-masa pemerintahan Narashima Rao (1991-1996). Hal tersebut penulis lakukan karena peristiwa-peristiwa itu saling berkaitan satu sama lain sebagai salah satu pendorong timbulnya konflik intern yang sekarang tengah bergolak di Partai Kongres (I). Perlu dicatat pula bahwa selama 5 kali pergantian pemerintahan tersebut, Partai Kongres (I) lebih memilih sebagai partai oposisi dan melakukan koalisi dengan Front Persatuan.

1.3 Problematika

Problematika adalah suatu permasalahan yang akan timbul dari fenomena-fenomena yang ada, dengan menentukan permasalahan lebih lanjut akan mempermudah penulisan dan lebih terarah juga sistematis dalam penulisan.

Bentuk umum perumusan masalah adalah setiap kesulitan yang mengerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dirasakan sebagai rintangan yang harus dilalui dengan jalan mengatasinya¹³.

¹³Sutrisno Hadi, MA, *Methodologi Research*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1975, hal 56

Sehingga dapat dimengerti bahwa problematika adalah suatu persoalan yang disodorkan untuk dibahas dan dipecahkan, sehingga pada akhirnya dengan ditunjang data-data yang cukup lengkap dan analisa yang tajam permasalahan tersebut dapat terungkap. Permasalahan yang mungkin timbul dalam Partai Kongres karena adanya krisis kepercayaan dari pendukungnya yang disebabkan faktor kepemimpinan yang tidak mampu membawa kearah persatuan dan mengembalikan kredibilitas Partai Kongres sebagai salah satu partai yang pernah berkuasa selama hampir 4 dasawarsa di pemerintahan India. Kemerosotan pamor dan kekalahan-kekalahan Partai Kongres inilah yang mengakibatkan kehidupan Partai Kongres semakin tidak menentu. Maka dari sinilah penulis mengajukan permasalahan "Faktor-faktor intern apa sajakah yang dapat mempengaruhi kekalahan Partai Kongres (I) dalam pemilu India sejak tahun 1996-1999?"

1.4 Kerangka Dasar Teori

Guna mencari jalan keluar terhadap pemecahan problematika atau permasalahan diatas, maka perlu suatu teori yang dapat memberikan dukungan atas hipotesa yang diajukan. Pengertian teori ini menurut James E Daugherty dan Robert L. Pfalagraf adalah sebagai berikut :

"Teori adalah suatu cara mengorganisasi pengetahuan kita sedemikian rupa sehingga kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pantas dicari jawabannya dan membimbing riset kita kearah jawaban-jawaban yang valid"¹⁴.

¹⁴ James E. Daugherty dan Robert L. Pfalagraf, *Beberapa Teori Hubungan Internasional*, terjemahan Amin Rais, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1977, hal 64

Mempunyai arti dan makna sebagai berikut :

- 1) teori merupakan kerangka dasar untuk mengatur fakta-fakta
- 2) teori merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan
- 3) teori merupakan seperangkat pernyataan mengenai keadaan yang diharapkan
- 4) teori merupakan pikiran spekulasi, bebas dari ikatan dunia nyata
- 5) teori merupakan abstraksi¹⁵.

Berdasarkan pengertian diatas, maka untuk membahas segala permasalahan intern yang sedang berkejolak di tubuh Partai Kongres, penulis menggunakan **Teori Konflik Fungsionalisme** sebagai alat analisa. Bagaimanapun juga, konflik ini memang timbul karena suatu pertentangan dalam sebuah partai. Maka teori konflik fungsionalisme menurut pendapat **George Simmel** :

"Conflict is thus designed to resolve dualisme : It is a way of achieving some kind of unity even if it be through the annihilation of one of the conflicting parties. This is roughly paralel to the fact that is most violent syptom of a disease which represent of effort of the organisme to free itself of disturbances and damage caused by them".

(Konflik merupakan suatu bentuk keputusan dualisme; merupakan salah satu cara pencapaian beberapa macam kesatuan sekalipun itu bisa melalui penghancuran dari salah satu dari perselisihan dalam partai. Hal ini secara kasarnya di sejajarkan pada suatu kenyataan bahwa hal tersebut merupakan kerusakan yang parah dan gejala penyakit yang terwakili dari kebebasan organisme itu sendiri dari gangguan kerusakan dan kerusakan akibat dari pertentangan tersebut).

Simmel menyatakan bahwa suatu individu terdapat suatu dorongan untuk membenci yang mengarah pada permusuhan. Namun naluri

¹⁵ Charles Mc. Clelland, *Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Sistem*, C.V Rajawali, Jakarta, 1981, hal 37

tersebut bercampur rasa saling membutuhkan yang mengarah pada berbagai kekuatan-kekuatan dalam hubungan sosial. Simmel menanggapi konflik adalah sebagai perceraian dari pertentangan naluri untuk permusuhan, namun pertentangan tersebut bisa mereda/berkurang karena adanya saling membutuhkan antar individu tersebut. Namun Simmel juga menganalisis akibat-akibat positif dari konflik untuk memelihara kesatuan sosial maupun bagian-bagiannya. Sehingga dorongan-dorongan yang mengakibatkan permusuhan tidak terlalu terlihat sebagai suatu hal yang bertentangan dengan individu. Simmel dalam hal ini lebih banyak memberikan tekanan terhadap konflik yang dianggap dapat meningkatkan solidaritas dan keseragaman¹⁶.

Kenyataan tersebut memang dapat terlihat dari kondisi Partai Kongres (I) yang sebenarnya dari dahulu telah terjadi berbagai pertentangan dan silang pendapat yang mengarah pada membelotnya beberapa tokoh partai ini. Seperti pada masa kepemimpinan Rao, terdapat tiga senior yang kemudian menyempal dari partai karena tidak setuju atas keinginan dan kebijaksanaan Rao, yang dianggap akan membahayakan posisi Partai Kongres (I) dalam menggalang masa untuk pemilu tahun 1996.

Silang pendapat ini juga terjadi pada waktu CWC, memutuskan untuk memecat Rao sebagai ketua karena terlalu banyak terlibat dalam skandal isu suap dan korupsi. Secara otomatis keterlibatan Rao dalam kasus ini memperburuk citrapartai, sehingga kemudian berakibat pada kekalahan fatal partai ini pada pemilu 1996.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Ratih Lestari, *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hal 70

Sementara itu pada tahun 1997-1999 muncul konflik baru akibat keputusan sebagian besar anggota partai untuk menggangkat Sonia Gandhi sebagai ketua partai. Keputusan ini mengakibatkan tiga pengikut senior partai yaitu Tarig Anwar, Sharad Pawar dan P. A Sagwa keluar dari partai dan mendirikan "Partai Kongres Tandingan" pada tanggal 10 Juli 1999.

Guna memperkuat teori konflik fungsionalisme tersebut, maka penulis juga menggunakan konsep konflik. Sebagaimana konsep-konsep lain dalam ilmu sosial, konsep konflikpun belum diperoleh batasan yang jelas. Ada yang membatasi secara luas, ada pula yang membatasinya dengan secara sempit. Batasan luas konflik digunakan untuk menggambarkan segala bentuk perjuangan antagonistik yang nyata maupun laten. Sedangkan batasan yang sempit digunakan untuk melihat konflik dari sudut yang dapat dilihat secara "nampak".

Memandang konflik yang timbul di tubuh partai kongres maka tinjauan konflik yang digunakan adalah konflik dalam pengertian luas karena selain mencakup masalah antar anggota, juga melibatkan lembaga politik dalam hal ini partai politik.

Konsep konflik secara luas, dapat dilihat dari pendapat Nasikun. Dalam mengartikan konsep konflik Nasikum berpangkal pada anggapan-anggapan dasar sebagai berikut¹⁷:

1. Setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir;
2. setiap masyarakat mengandung konflik-konflik dalam dirinya;
3. setiap unsur dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial;

¹⁷ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 1993, hal 11-12

4. setiap masyarakat terintegrasi diatas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang lain.

Berdasarkan konsep Nasikun, maka konflik yang ada dalam Partai Kongres sudah mulai nampak pada masa kepemimpinan Rajiv Gandhi (1984-1989), dan konflikpun semakin kompleks ketika pada tahun 1997, Partai Kongres berkeinginan menaikkan Sonia Gandhi sebagai ketua Partai Kongres (I). Kemunculan Sonia Gandhi mengakibatkan sebagian anggota partai tidak senang dan mengundang perbedaan pendapat yang berkepanjangan. Ketidakpuasan tersebut mengakibatkan sebagian anggota partai keluar dari Partai Kongres (I).

Pengertian konflik secara luas tersebut penulis juga menggunakan konsep konflik yang dipaparkan oleh Paul Conn. Menurut Paul Conn, secara substansi konflik dapat dibedakan menjadi 2 yakni "*zero-sum conflict*" dan "*non zero-sum conflict*", konflik yang pertama berupa konflik yang bersifat antagonis dan tidak mungkin diadakan kerjasama atau kompromi diantara keduanya. contoh konflik ini adalah konflik ideologis/agama yang tidak dapat dipertemukan lagi penyelesaiannya. Sedangkan konflik yang kedua adalah konflik yang dapat diselesaikan baik dengan kompromi maupun dengan kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak, meskipun hasilnya tidak optimal¹⁶.

Konflik Partai Kongres (I) ini digolongkan dalam *zero-sum conflict*. Hal ini tercermin dari sikap menentang para lawan politik Sonia Gandhi di Partai Kongres itu sendiri yang bersumber pada ancaman dari mantan Menteri Pertahanan, Sharad Pawar; mantan

¹⁶ Sudijono Sastronotomo, *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1995, hal 244

Ketua Majelis Rendah, P.A. Sagwa dan politikus senior Tarig Anwar yang menuntut agar Sonia segera mundur dari ketua Partai Kongres dan mengurungkan niatnya sebagai Perdana menteri India. Sebagai akibatnya, ketiga penentang Sonia ini dipecat dari partai oleh Badan Komisi Pekerja Kongres (CWC). Tindakan ini bukan menyelesaikan masalah namun semakin memperuncing keadaan karena ketiga penentang yang dipecat itu kemudian mendirikan Partai Kongres Tandingan. Perpecahan ini merupakan perpecahan terbesar dalam tubuh Partai Kongres¹⁹.

Sementara itu tujuan konflik menurut Paul Conn ada tiga. Pertama, ialah bahwa pihak-pihak yang terlibat didalamnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin mendapatkan. Contoh: perebutan kekuasaan atau jabatan misalnya, bupati, gubernur, kepala daerah dan presiden. Kedua, satu pihak ingin mendapatkan sedangkan pihak lain ingin mempertahankan apa yang selama ini dimiliki. Contoh: persaingan dalam pemilu untuk memperebutkan kursi dalam DPR. Ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berusaha mempertahankan apa yang telah ada, misalnya persaingan teknolog, persenjataan, ekonomi dan sebagainya antar negara²⁰.

Konflik yang berkecamuk di tubuh Partai Kongres ini, memiliki tujuan dimana pihak-pihak yang terlibat didalamnya mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama ingin duduk sebagai ketua partai, yang otomatis setelah menang pemilu akan menjabat sebagai perdana menteri. Baik Sonia maupun ketiga lawan politiknya itu ingin mengembalikan posisi Partai Kongres sebagai partai

¹⁹ Panji Masyarakat No.07 Tahun III, 2 Juni 1999

²⁰ Sudijono Sastrodmojo, *Prilaku politik*, IKIP Semarang Press, Semarang, hal 245

yang pernah berkuasa pada jaman-jaman sebelumnya. Walau pada mulanya Sonia hanya ingin mengangkat kembali popularitas Partai Kongres yang terpuruk, akhirnya mau tak mau ia harus ikut juga dalam kancah politik yang penuh persaingan. Selain ia mendapat persaingan dari ketiga lawannya itu, Sonia harus juga menghadapi Vajpayee dari BJP (Bahararya Janata Party) yang tercatat sejak dahulu partai ini saingan terberat dari Partai Kongres²¹.

1.5. Hipotesis

Guna menjawab permasalahan yang telah diajukan suatu karya tulis, diperlukan suatu hipotesa berdasarkan kerangka teori yang telah dirumuskan. Rumusan hipotesa dimaksudkan untuk memberikan suatu garis tuntunan dan arah pembahasan masalah yang telah ditetapkan. Hipotesis pada dasarnya merupakan rumusan jawaban atas suatu permasalahan dalam karya tulis yang bersifat sementara.

Pengertian hipotesis ini menurut **Prof. Dr. Sutrisno Hadi, MA** adalah :

"Hipotesa adalah dugaan yang mungkin benar, atau mungkin juga salah. Dia akan ditolak jika salah satu palsu, dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya. Penolakan dan penerimaan hipotesa dengan begitu sangat tergantung pada hasil-hasil penyelidikan terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan²².

Partai Kongres merupakan partai terkuat, terbesar dan tertua di India. Partai ini telah menguasai India sejak India merdeka pada tahun 1947. Kemudian pada tahun 1978 partai ini berubah menjadi Partai Kongres-Indira (I) pimpinan Indira Gandhi, akibat kekalahan partai tahun 1977. Tujuan Indira adalah untuk memperbaiki citra

²¹ Parji Masyarakat, loc. cit

²² Sutrisno Hadi, *Methodologi Research Untuk pemulisan Skripsi, Paper, Tesis, dan Disertasi*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987, hal 60

Partai Kongres yang buruk akibat tindakan politik yang dilakukan Indira sendiri.

Setelah Indira wafat dan digantikan oleh Rajiv Gandhi Partai Kongres memperoleh suara mayoritas dalam parlemen dalam pemilu 1984 sebagai suatu kemenangan mutlak yang pernah diraih oleh partai ini. Namun setelah Rajiv Gandhi meninggal dan digantikan oleh Narashima Rao, Partai Kongres mengalami kekalahan yang fatal akibat ulah Rao semasa masa kepemimpinannya. Ia banyak dicela karena keterlibatannya dalam sejumlah skandal isu dan korupsi yang mengakibatkan Partai Kongres kalah dalam pemilu 1996. Sejak Rao mundur inilah maka krisis kepemimpinan pun dialami oleh partai ini. Sehingga pemilu tahun 1996-1999 tidak pernah lagi memegang kekuasaan lagi di India. Kekalahan demi kekalahan dialami oleh Partai Kongres (I) akibat penurunan suara dalam pemilu yang disebabkan timbulnya konflik intern yang berkepanjangan sementara itu keputusan partai untuk menaikkan Sonia Gandhi sebagai pimpinan partai menimbulkan perpecahan dalam Partai Kongres.

Berakar dari uraian diatas penulis dapat merumuskan suatu hipotesa :

"kekalahan Partai Kongres dalam pemilu 1996-1999 dikarenakan adanya penurunan jumlah perolehan suara dalam pemilu akibat konflik-konflik intern yang tengah bergolak, yang disebabkan adanya krisis kepemimpinan, isu skandal dan korupsi serta indikasi perpecahan di tubuh Partai Kongres atas naiknya Sonia Gandhi sebagai ketua Partai Kongres (I)".

1.6. Metode Penelitian

Sudah menjadi syarat dalam penulisan ilmiah untuk mengadakan penelitian, yang sebelumnya harus disertai pula dasar-dasar pemikiran terhadap obyek yang diteliti. Metode tersebut meliputi pengumpulan data dan tehnik penulisan. Dengan ditetapkannya suatu metode akan bermanfaat untuk mendapatkan kerangka berpikir dan data-data yang ditentukan agar penulisan ini menjadi ilmiah, sistematis dan kronologis.

Menurut The Liang Gie :

"Cara atau langkah yang berulang-ulang kembali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung awalnya, langkah ini untuk mengumpulkan data-data, sedangkan pada ujung akhirnya merupakan untuk memeriksa kebenaran daripada pernyataan yang dibuat mengenai gejala tersebut"²³

Dari pengertian tersebut, maka metode merupakan jembatan atau penghubung yang mempermudah baik awalnya maupun akhirnya dalam mencari kesimpulan yang benar dan akurat tentang penulisan, baik mengenai bagaimana mempelajari tulisan ilmiah serta buka-buku yang dipertimbangkan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Untuk itu diperlukan tahap-tahap sebagai langkah nyata, yaitu tahap pengumpulan data dan tahap analisa data.

1.6.1 Tahap Pengumpulan data

Tahap ini merupakan tahap dari penelitian yang sebenarnya, dimana dalam tahap ini mulai digunakan metode-metode tertentu agar sesuai dengan tujuan penulisan dari masalah yang hendak diteliti. Dalam hal ini penelitian dilakukan dalam bentuk observasi langsung, artinya data dari pengamatan terhadap obyek dikumpulkan melalui lembaga-lembaga tertentu yang kompeten.

²³ The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1974, hal 70

Oleh sebab itu data yang dikumpulkan sebagaimana besar adalah *data tidak langsung (data sekunder)*, sedangkan untuk memperoleh *data yang bersifat langsung (data primer)* adalah sulit dalam library riset. Sedangkan data tidak langsung tersebut berupa kumpulan atau laporan dari pihak lain yang dikumpulkan. Adapun penelitian pustaka ini penulis lakukan pada :

1. Perpustakaan LIPI
2. Data Litbang Depu Pusat
3. Perpustakaan CSIS
4. UPT perpustakaan UNEJ
5. Perpustakaan FISIP UNEJ

1.6.2 Metode Anallsa Data

Mengingat data yang terkumpul tidak dapat terukur secara langsung, maka metode analisa data yang dipergunakan adalah secara *kuallitatif*.

Dalam menganalisa data yang diperoleh nantinya akan dipakai cara berpikir pola induktif maupun deduktif yang kemudian berakhir dengan pola berpikir reflektif.

Cara berpikir **reflektif** adalah :

"Apa yang disebut dengan cara modern untuk memperoleh pengetahuan tidak lain adalah mengkombinasikan secara jitu dari cara berpikir induktif dan deduktif²⁴.

Berdasarkan cara demikian, maka penulis akan memadukan berbagai peristiwa yang mungkin ada dan terjadi pada Partai Kongres (I), baik dari segi kepartaiannya maupun gejolak-gejolak yang mungkin timbul karena kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh Partai Kongres untuk menaikkan kembali popularitas partainya seperti pada masa-masa Gandhi sebelumnya.

²⁴ *ibid*, hal 45

1.7 Pendekatan

Dalam setiap penulisan ilmiah tidak terlepas dari masalah pendekatan, pendekatan menurut **The Liang Gie** adalah :

"Keseluruhan unsur yang dipakai untuk mendekati sasaran memasuki suatu bidang ilmu pengetahuan dan memahami pengetahuan yang teratur dan bulat mengenai sasaran ilmu tersebut²⁵"

Untuk menganalisa permasalahan ini, maka penulis memakai 2 pendekatan yaitu **sosiologi politik** dan **pendekatan sejarah**.

The Liang Gie menyatakan :

"Hubungan internasional berkembang dari sejarah dan ilmu politik sebagai cara pendekatan dari kedua cabang ilmu ini masih umum digunakan dalam studi hubungan internasional²⁶"

Sosiologi politik menurut **Rancek dan Warrant** adalah :

".....cabang dari sosiologi yang menganalisa proses-proses politik dalam kerangka acuan sosiologi yang mengarah perhatian khususnya pada dinamika tingkah laku politik, karena ia dipengaruhi oleh berbagai proses, seperti bekerjasama, kompetisi, konflik, moralitas sosial, bentuk partisipasi umum, perubahan kekuatan dari berbagai kelompok dan semua proses yang mempengaruhi tingkah laku politik²⁷"

Dengan memakai pendekatan sosiologi politik ini, maka akan penulis lakukan untuk mengetahui tentang tingkah laku dan tindakan politik dari aktor-aktor di Partai Kongres (I) sehingga menimbulkan konflik-konflik yang sampai sekarang belum terselesaikan dalam tubuh Partai Kongres (I).

²⁵ The Liang Gie, op. cit, hal 95

²⁶ ibid, hal 34

²⁷ ibid, hal 91

Sedangkan pendekatan sejarah menurut Jack C. Plano adalah :

"Pengkajian tentang kejadian-kejadian masa lampau menurut urutan waktu. Pendekatan sejarah digunakan oleh peneliti terutama berkaitan dengan kesan yang muncul secara berurutan atau sebagai upaya untuk menciptakan kembali suatu peninggalan sejarah dalam mengenal jawaban mengapa kesinambungan tempo sekarang dapat dipastikan dan dipertahankan²⁸"

Pendekatan sejarah ini akan penulis gunakan untuk mengamati sejarah dan asal muasal terciptanya konflik yang akan mengarah pada perpecahan di tubuh Partai Kongres. Pendekatan sejarah ini juga akan penulis gunakan untuk meninjau kembali keadaan Partai Kongres dengan kepemimpinan-kepemimpinan sebelumnya sehingga dapat dibuat kajian analisa.



²⁸ J.C.Plano, Robert E Riggs, Helenan S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, C.V Rajawali, Jakarta, 1985, hal 35

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Situasi Sosial dan Ekonomi India

Semenjak Inggris menyerahkan kemerdekaan kepada India secara mutlak, maka India harus dapat memecahkan atau mengatasi berbagai persoalan politik, pemerintahan, dan ekonomi. Selain itu pula, modernisasi yang digalakkan pemerintah untuk mengatasi segala permasalahan tersebut, juga menghadapi masalah-masalah tersendiri. Mula-mula modernisasi ini hanya dirasakan dikota-kota besar yang muncul sebagai pusat industri dan perdagangan pada abad ke-19¹. Perlahan-lahan melalui suatu proses yang masih terus berlangsung hingga kini, berbagai ide dan kesempatan modernisasi pada mulanya menyebar dari banyak kota besar ke daerah pedesaan yang masih banyak didominasi oleh gaya kehidupan tradisional. Hal tersebut, berpengaruh pula terhadap perubahan sosial terutama terhadap kehidupan penduduk yang tinggal di Negara bagian Asli².

Negara Bagian asli tersebut memiliki struktur sosial Hindu yang sudah ketinggalan jaman dalam beberapa hal, sehingga beberapa aturan Hindu yang baru dari tahun 1954-1956 bermaksud mengadakan perubahan-perubahan. Hal yang paling menyolok adalah adanya pembagian kekuasaan kepada badan-badan setempat dan pemerintahan desa, sehingga mengakibatkan di beberapa daerah, badan-badan desa menjadi semakin kokoh secara politis. Mengingat kenyataan bahwa banyak lembaga di India sudah beratus-ratus tahun usianya, mengakibatkan berbagai

¹ B.G. Gokhale: *Negara dan Bangsa "Lands and People": Asia, Jilid 3* dalam Perpustakaan Nasional, PL. Widyadara, 1990, hal 125

² Negara Bagian Asli merupakan daerah bentukan pemerintahan Inggris pada tahun 1947, yang terdiri dari 500 pemerintahan lokal. Dan Inggris telah mengizinkan pemerintahan lokal untuk memimpin wilayahnya. Keistimewaan tersebut diberikan oleh Inggris sebagai imbalan atas dukungan mereka terhadap kebijakan Inggris. Lihat, *ibid*, hal 29

perubahan yang diarahkan bagi badan legislatif ini benar-benar suatu usaha revolusioner, meskipun usaha ini dilakukan dengan cara damai dan demokratis.

Demikian juga ketika menyangkut soal bahasa resmi, karena setelah kemerdekaan para pemimpin India harus memilih salah satu atau lebih bahasa resmi yang akan dipakai dalam pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Pada mulanya, konstitusi India menyebutkan bahasa Hindi, bahasa mayoritas penduduk India, sebagai bahasa resmi negara, tetapi masih mengizinkan bahasa Inggris untuk dipakai selama masa 15 tahun, yaitu selama masa transisi. Namun, penduduk di negara bagian yang tidak berbahsa Hindi merasa keberatan untuk belajar bahasa Hindi. Mereka membujuk pemerintah untuk mengubah konstitusi agar bahasa Inggris tetap diijinkan sebagai bahasa bantu. Amandemen konstitusi lainnya meyakini 14 bahasa regional sebagai bahasa resmi untuk dipakai didalam pemerintahan dan pendidikan di negara-negara bagian tertentu³.

Selain itu pula, dalam hal modernisasi, perbaikan masalah ekonomi merupakan masalah yang paling signifikan dalam sebuah perubahan. Demikian juga dengan India. India merupakan salah satu negara yang tumbuh cepat sebagai kekuatan ekonomi terkemuka dunia. Tentang Produk Nasional Brutonya (GNP) suatu alat pengukur pertumbuhan ekonomi, India termasuk diantara 10 negara ekonomi terkuat di dunia. Namun menyangkut soal pendapatan perkapita, India termasuk diantara negara-negara termiskin di dunia. Hal ini karena kekayaan India yang harus dibagi diantara penduduknya yang besar dan berkembang dengan pesat⁴.

Ciri khas perekonomian India adalah kombinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal yang sama-sama memiliki peran sebagai

³ ibid, hal 28

⁴ ibid, hal 131

petaksana, perencanaan dan melalui kepemilikan pada perusahaan umum milik negara. Skala keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dimulai sejak tahun 1950-an sebagai pencerminan pada rasa nasionalisme dan sosialisme terhadap kemerdekaan yang telah dicetuskan oleh Jawaharal Nehru. Rencana ekonomi India selama jangka waktu 5 tahunan mulai dicanangkan pada tahun 1951. Selama dekade tersebut peranan negara bagian terlalu banyak turut campur tangan terutama dalam sektor-sektor penting yaitu terhadap penanaman investasi, dan pengawasan terhadap sektor-sektor private.

Tercatat pada tahun 1979 dan 1987, pertumbuhan ekonominya rata-rata 3,6% setiap tahun sama dengan periode waktu antara tahun 1965-1980, dan lebih dari 5% pertahun selama tahun 1980-an. Tingkat inflasi dan hutang nasional termasuk rendah⁵. Basis dasar perekonomian masih diletakkan pada industri, terutama industri baja yang mengakibatkan India termasuk 10 negara industri terbesar dalam pemasokan baja. India memang kaya akan bijih besi, mangan, batubara, dan seng. Bahkan kini India juga sedang mengembangkan energi atom dan bahkan telah mampu memproduksi bom atom jika memang dikehendaki⁶.

Namun bagaimanapun juga, tingkat pertumbuhan ekonomi secara marjinal adalah tetap rendah, tercatat pada tahun 1991 GNP India dalam sekitar US\$ 284,7 miliar (1989-1991, perkiraan Bank Dunia), dan tingkat pendapatan perkapita hanya US\$ 330, dengan hampir 60% rakyatnya di bawah garis kemiskinan.

Ketika pada tahun 1991, Perdana Menteri terpilih Narashima Rao dari Partai Kongres (I), melakukan kebijakan ekonomi yang sangat berarti bagi India. Ia melakukan langkah-langkah untuk menghapus pengawasan

⁵ *India*, Microsoft Encarta Encyclopedia 1993-1995

⁶ B. G. Gikhale, *op.cit.*, hal 133

terhadap sektor-sektor private dan monopoli dari negarapun mulai dikurangi. Sistem perekonomianpun terbuka terhadap pengurangan pada pengawasan tarif dan mulai memberanikan diri untuk menerima penanaman modal investor asing. Rao mulai membenahi ekonomi India pada Juni 1991, dimana keadaan ekonomi India yang begitu buruk dengan tingkat inflasi 14 % serta terjadi defisit anggaran sampai -0,5. Setelah Rao menerapkan liberalisasi ekonominya, tingkat inflasi bisa ditekan sampai 5 % pada tahun 1993. Pada periode 1995-1996, pertumbuhan perekonomian India naik 6,6 %, namun hal ini tidak berlangsung lama, karena pada periode 1996-1997 turun lagi menjadi 5,5 %. Bahkan imporpun mengalami penurunan sekitar 32,75 % dari tahun lalu, yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan perekonomian pada tahun yang bersangkutan dengan tingkat inflasi tidak pernah melebihi 10 %⁷.

Dari sinilah dapat ditarik kesimpulan bahwa perekonomian India dari tahun ketahun mengalami pasang surut dan terkesan tidak stabil walau siapapun yang memerintah negeri ini. Terbukti pula bahwa liberalisasi ekonomi yang berusaha untuk diterapkan di negara India tidak selamanya membawa dampak positif bagi rakyat india, terutama pada kehidupan sosial dan ekonominya. Hal tersebut memang dilunjang oleh sulitnya setiap pemimpin negara ini untuk mengangkat perekonomian India dengan penduduk 950 juta yang tersebar di ke-25 negara dan 9 wilayah teritorial dengan secara merata dalam waktu yang singkat. Apalagi pada saat ini India masih dihadapkan pada krisis pemerintah akibat ketidakstabilan pemerintahan.

Walaupun demikian, pemerintah memiliki tujuan utama dalam peningkatan sosial dan ekonomi adalah untuk mengurangi kemiskinan yang

⁷ Asia Pasifik Profiler 1997/Asia Pasifik Economic Group, Australia National University, Student Edition, 1997, hal 329-330

merajalela dengan meningkatkan pendapatan perkapita. Berbagai kebijakan akhir-akhir ini mengkombinasikan upaya untuk menghambat laju pertumbuhan penduduk dan pada saat yang sama memacu pertumbuhan ekonomi⁶.

2.2 Sistem Politik dan Pemerintahan India

Setelah Inggris menyerahkan kedaulatan kemerdekaan sepenuhnya kepada ke-2 negara berdaulat yaitu India dan Pakistan, karena semenjak tanggal 15 Agustus 1947 berakhir masa pemerintahan Inggris, juga dilandai dengan pecahnya India Union menjadi 2 yaitu India yang dipimpin oleh Pandit Jawaharlal Nehru dan Pakistan yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah. Sebagai negara baru yang merdeka, maka India berusaha untuk membentuk Undang-Undang Dasar baru. Melalui berbagai macam proses yang sangat panjang, maka pada tanggal 26 November 1949, terbentuklah Rancangan Konstitusi. Melalui berbagai perubahan disana sini terutama pasal-pasal nya, maka baru pada tanggal 26 Januari 1950, Rancangan Konstitusi tersebut ditetapkan oleh parlemen. Lewat konstitusi yang telah disetujui tersebut, maka India menjadi negara Republik sesuai dengan Pembukaan Konstitusi India yang menyatakan bahwa rakyat India membentuk India menjadi suatu Republik yang berdaulat dan demokratis dan menjamin untuk sekalian warganegara:

keadilan dalam lapangan sosial, ekonomi dan politik
kemerdekaan berpikir, mengemukakan pendapat, mempunyai kepercayaan, beriman dan beribadat
persamaan dalam kedudukan dan dan lapangan hidup serta memperkokoh;

⁶ B. G. Gokhale, loc.cit, hal 131

persaudaraan yang menjamin penghormatan atas diri seseorang dan atas kesatuan bangsa seluruhnya⁹.

Konstitusi India ini menganut sistem Inggris, inspirasi dari konstitusi Amerika dan juga ide-ide demokrasi barat. Konstitusi ini telah menetapkan India sebagai Uni Negara Bagian. Struktur pemerintahan negara federal India terdiri dari 25 negara bagian dan 9 wilayah kesatuan administrasi. Negara bagian merupakan wewenang kedalam (otonomi), yang dipimpin oleh seorang Gubernur (yang ditunjuk oleh presiden), yang mempunyai badan legislatif dan badan peradilan sendiri. Sedangkan wewenang keluar adalah tanggung jawab dari pemerintah pusat. Ke-25 negara bagian itu adalah :

Andra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Har Yan, Himmchal Pradesh, Jammud Khasmir, Kartaka, Karala, Madya Pradesh, Mahasastra, Mampur, Negara Nalaya, Nagalad, Sikkim, Tamil Nadu, Punjab, Orisa, Rajstan, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, Mahe, Karikal, Hayana.

Sementara ke-9 wilayah teritorial adalah sebagai berikut :

Andaman dan Nicoba, Arunachal Pradesh, Chandigarh, Padra dan Nagar Haveli, Delhi, Goa, Daman dan Din, Lakshapweep, Nizaram, Pondicherry.

Pemerintahan federal dikepalai oleh seorang Presiden dan wakilnya yang dipilih oleh Dewan Pemilih yang terdiri atas para anggota badan legislatif pusat atau negara bagian. Berdasarkan konstitusi 1950, maka India mempunyai bentuk pemerintahan parlementer yang berdasarkan atas hak memilih bagi setiap warganegara India. Kekuasaan di India terbagi atas 3 yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Kekuasaan legislatif pusat, memiliki 2 kamar, yaitu *Rajya Sabha* (Council of State/Majelis Tinggi) dan *Lok Sabha* (House of People/Majelis Rendah). *Rajya Sabha* terdiri dari 250 anggota yang dipilih oleh anggota

⁹ T.S.G. Mulia, *India: Sejarah Perjuangan dan Pergerakan Kebangsaan*, PT. Balai Pustaka, 1959, hal 339-340

badan legislatif negara bagian kecuali untuk 12 anggotanya dipilih oleh presiden. Rajya Sabha merupakan Dewan permanent, hanya 1/3 dari anggotanya saja yang dapat dipilih tiap 2 tahun sekali (pasal 79-80). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku "The Organization of The Government of India" bahwa :

"The Rajya Sabha is permanent house, no subject to dissolution, with one-third of its members retiring every two years. Its members cannot except 238 representatives of state and of the Union Teotories, plus twelve members to be nominated by the president"¹⁰

Sementara itu, Lok Sabha (Dewan Perwakilan Rakyat), terdiri dari 543 anggota yang kesemuanya dipilih secara langsung melalui pemilu. Presiden juga memiliki wewenang untuk mengangkat 2 wakil golongan dari keturunan Anglo-India, jika dirasa bahwa perwakilan golongan tidak mencukupi (pasal 331). Selain itu di DPR ini juga ada kemungkinan untuk penempatan golongan kasta rendah dan golongan suku-suku untuk duduk di DPR yang dialokasikan sekitar 74 dan mendapat jatah kursi sebanyak 41 di DPR. Dewan ini dapat dibubarkan oleh Presiden dan dapat dipilih kembali melalui pemilu.

"The President may, from time to time, propogne both of house and/or either house, and be may also dissolve the Lok Sabha before the end of its term"¹¹

Kekuasaan Eksekutif pemerintah pusat, dijalankan oleh suatu kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang dipimpin oleh perdana menteri yang disebut sebagai Dewan Menteri. Sementara kepala eksekutif dan kepala negara adalah Presiden. Peranan Presiden disini hanyalah sebagai lambang dan terikat konstitusi seperti sistem kerajaan di Inggris. Dewan Menteri ini diangkat oleh Presiden dan pengangkatan menteri-menteri atas usul Perdana Menteri. Tugas dewan menteri ini adalah membantu dan

¹⁰The Indian Institute of Public Administration, *The Organisation of Government of India*, Somaiya Publications PVT, LTD, New Delhi, 1991, hal 20

¹¹ibid, hal 19

memberikan nasihat kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaannya (pasal 74). Walaupun begitu, perdana Menteri ini bertanggung jawab secara keseluruhan kepada DPR sehingga dalam hal ini bukan Presiden yang bertanggung jawab¹².

Kekuasaan Yudikatif, merupakan pengadilan negara pusat yang berwujud badan pengadilan tinggi yang dikepalai oleh Ketua Mahkamah Agung. Anggota Mahkamah Agung pemerintah pusat maupun anggota Mahkamah Agung Negara Bagian diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari anggota-anggota Badan Pengadilan tersebut (pasal 124). Walau demikian, masih terdapat jaminan kemerdekaan bagi perlindungan terhadap setiap keputusan yang mereka ambil. Baik hakim-hakim dari pengadilan tinggi negara bagian maupun dari pengadilan tinggi pusat sama-sama dipilih dan diangkat sekurang-kurangnya 5 tahun sekali¹³.

Konstitusi India, dipandang sebagai pencerminan terhadap lambang kewaspadaan dari para pemimpin. Konstitusi tersebut menjamn para elite untuk memenangkan suatu kondisi politik terutama dari segi partisipasi politik atas sebagian kecil kekuasaan kasta rendah dan kelompok-kelompok kecil masyarakat. Juga terdapat hak-hak istimewa atas kelas-kelas terhadap jaminan legal yang bersifat fundamental terhadap hak individu, termasuk hak-hak untuk mendapatkan, memegang, dan mengatur kepemilikannya. Selain itu pula, konstitusi ini juga menawarkan harapan bagi golongan kelas bawah dan mengandung kelemahan dari setiap pasal-pasalanya adalah adanya pengesahan untuk memperkuat persamaan di bawah hukum dan pelarangan terhadap diskriminasi yang berlatarbelakang religi, ras, kasta, jenis kelamin, ataupun tempat kelahiran. Adanya penetapan Undang-undang Khusus yang menetapkan selama periode selama periode 10 tahun mencadangkan

¹² T.S.G. Mullu, op.cit, hal 346

¹³ ibid, hal 350-351

kursinya di badan Lok Sabha dan legislatif negara bagian untuk keanggotaan bagi kasta dan suku/ras dan juga disediakan pos-pos yang terdapat di negara-negara bagian maupun pusat. Penetapan Undang-undang ini diperluas pada tahun 1960, 1970 dan 1980¹⁴.

Walaupun Konstitusi India telah berkali-kali diubah, namun kesatuan nasional India masih tetap terjaga. Peta politiknya juga berubah karena terbentuknya beberapa negara bagian baru dan adanya penyesuaian tapal batas sehingga beberapa tanggapan terhadap tuntutan pemerintah otonomi yang lebih besar dari beberapa kelompok suku dan bahasa. Salah satu perubahan besar adalah di Punjab yang dibagi menjadi 2 negara bagian terpisah pada tahun 1966. Punjab kecil yang berpenduduk Sikh dengan bahasa Punjabi dan negara baru Hayana yang berpenduduk Hindu dengan bahasa Hindi. Pada tahun 1959, India modern mengambil alih beberapa daerah koloni Prancis yaitu Karikal, Mahe, Daman, Pondicherry, kemudian koloni Portugis di Goa, Din dan Daman pada tahun 1961. Sikkim, bekas wilayah protektorat, diambil alih India pada tahun 1975¹⁵.

2.2.1 Sistem Kepartalan dan Partai Politik India

Beberapa ahli politik banyak yang mendefinisikan lentang arti partai politik. Menurut Huszar dan Stevenson dalam buku "The Political Science" mengemukakan partai politik adalah sekumpulan orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintah supaya dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan/mendudukan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan. Partai politik berusaha untuk memperoleh kekuasaannya dengan 2 cara yaitu ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan yang sah, dengan tujuan bahwa dalam pemilihan

¹⁴ P.F. Collier, Lauren S. Bahr and Bernard Johnston ed. *Collier's Encyclopedia with Bibliography and Index*, vol 12, New York Toronto, Sidney, 193, hal 607-608

¹⁵ B.G. Gokhale dalam *Perpustakaan Nasional*, op.cit, hal 130

umum memperoleh suara mayoritas dalam badan legislatif atau mungkin bekerja secara tidak sah atau secara subversif untuk memperoleh kekuasaan tertinggi dalam negara yaitu melalui revolusi/coup d'etat.

Prof.E.M. Sait, dalam buku "American Party and Election", partai politik adalah dapat dirumuskan sebagai suatu kelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan baik kebijakan pemerintah maupun program baru.

Melihat rumusan-rumusan tersebut, jelaslah bahwa tujuan partai politik menguasai negara atau pemerintah baik secara parlementer maupun ekstra parlementer, atau dengan kata lain baik secara konstitusional yaitu ikut serta dalam pemilihan umum dan secara inskonstitusional yaitu dengan cara revolusi/coup d'etat.

Partai politik agar dapat mengendalikan/mengawasi pemerintahan dengan baik, maka biasanya partai politik itu menjalankan fungsinya. Adapun fungsi partai politik adalah :

1. Pendidikan politik (political education)
2. Sosialisasi politik (political socialization)
3. Pemilihan pemimpin politik (political selection)
4. Pemanduan pemikiran-pemikiran politik (political aggregation)
5. Memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat (interest articulation)
6. Melakukan tata-hubungan politik (political communication)
7. Mengkritik rezim yang memerintah (criticism of regim)
8. Membina opini masyarakat (stimulating public opinion)
9. Mengusulkan calon (propoling candidates)
10. Memilih pejabat-pejabat yang akan diangkat (chossing appointive affairs)
11. Bertanggung jawab atas pemerintahan (responsibility for government)
12. Menyelesaikan perselisihan (conflict management)

13. Mempersatukan pemerintah (unifying the government)¹⁶.

Sementara itu tumbuhnya berbagai macam bentuk partai, mengarah pada pengklasifikasian partai politik dalam hal ini diarahkan pada jumlah partai, yaitu satu partai, dua partai, atau banyak partai. Menurut jumlah banyaknya partai ini, maka India termasuk kedalam sistem banyak partai atau yang biasa disebut *sistem multipartai*.

Sistem multipartai ini dipakai oleh negara yang masyarakatnya bersifat majemuk. Dimana terdapat bermacam-macam perbedaan sistem sosial, seperti ras, suku, agama, atau status, maka golongan-golongan dalam masyarakat akan lebih cenderung untuk menyalurkan loyalitas mereka ke organisasi yang sesuai dengan ikatan primordialnya daripada bergabung dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda orientasinya.

Dinegara demokrasi barat, seperti Netherland, Jerman, dan negara-negara Skandinavia, pengalaman dengan sistem multipartai cukup baik. Akan tetapi, dibanyak negara berkembang keanekaragaman budaya menyebabkan partai politik dengan mudah melibatkan diri dalam berbagai macam konflik sosial dan politik dan menyebabkan fragmentasi politik. Partai-partai politik ini sering memperkuat kekuatan-kekuatan sentrifugal dan karena itu sering menghambat perkembangan kearah stabilitas nasional. Apalagi jika partai bekerja dalam suatu sistem pemerintahan parlementer, dimana titik berat kekuasaan terletak ditangan parlemen dan partai-partai yang akan menentukan hidup matinya kabinet. Sebagai akibatnya kabinet sering lemah dan ragu-ragu dalam tindakannya, apalagi jika kabinet berlandaskan koalisi antara beberapa partai. Konsensus antar partai-partai koalisi dapat membubarkan kekompakan dalam koalisi. Ketidapatian ini memperlemah kedudukan eksekutif¹⁷.

¹⁶ Sukarna, *Sistem Politik*, P.T Alumni, Bnadung, 1981, hal 89-91

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: sebuah Bunga Rampai*, PT. gramedia, 1981, hal 22-25

Seperti di India, sistem multipartai ini dirasakan sangat kondusif dengan keadaan kehidupan masyarakat India yang beragam corak budaya, kepentingan akan golongan akan lebih menonjol. Melalui sistem ini, mereka merasa dapat menyalurkan hak politik mereka. Dahulu India sering disebut sebagai negara dimana terdapat dominasi satu partai (*one party dominance*), tetapi karena suasana politiknya kompetitif, maka pola sifat dominasi ini berubah. Hal ini karena kekuasaan Partai Kongres yang mulai jaman kolonial menguasai kehidupan politik India. Pada masa jayanya mempunyai jumlah wakil dalam parlemen melebihi jumlah total wakil-wakil partai lainnya. Kondisi tersebut biasa dinamakan *sistem satu setengah partai*. Namun setelah pemilu tahun 1977, Partai Kongres untuk pertama kalinya dikalahkan oleh Janata (People's) Party dan menjadi partai oposisi. Sistem multipartai inilah yang menyebabkan masa-masa pemerintahan yang pernah ada tidak pernah berlangsung lama atau terjadi ketidakstabilan pemerintahan¹⁸.

Partai Politik India

Partai di India seperti yang telah disebutkan diatas mengalami masa transisi dari sistem kepartaian dominan menjadi sistem koalisi saat ini. Keanekaragaman sosial, kebudayaan, bahsas lokal dan pluralisme regional telah mempengaruhi perpolitikan India. Kapasitas untuk hidup dalam keberagaman telah berurat akar dalam kehidupan asli masyarakat India. Terdapatnya harmoni yang melahirkan toleransi, kedamaian melalui penyesuaian dan interaksi sosial dengan saling menghormati satu sama lain.

Sementara itu kesuksesan politik koalisi akan tergantung dari para pemimpin partai dalam mempelajari cara-cara kehidupan rakyat India. Dengan satu kunci saling berinteraksi satu sama lain. Selama para pemilih menunjukkan keinginan politiknya yang kuat maka koalisi dari partai-partai

¹⁸ *ibid*, hal 27

politik akan tetap berlangsung sesuai dengan urgensi yang telah ditetapkan masing-masing.

Kondisi partai-partai politik di India ini, memiliki ciri khas yaitu partai-partai politik utama memiliki banyak persamaan dengan struktur organisasinya yang bercorak federal. Mereka memiliki sedikit jumlah anggota yang benar-benar fanatik dalam mendukung partainya masing-masing (*true believers*) dibandingkan dengan jumlah partisipan/pemilih dalam pemilihan umum (*true swingers*). Sementara penentuan calon-calon untuk pemilu, akan diusahakan oleh anggotanya dengan cara menghimpun para pendukungnya dan melakukan pencarian sumber dana bagi partai untuk mengadakan kampanye¹⁹.

Pada saat ini, di India ada 3 partai utama yang sangat menentukan dalam setiap pemilu di India dari ke-8 partai nasionalist yang ada. Mereka adalah Partai Kongres (I), Baharathya Janata Party (BJP), dan Front Persatuan. Ketiga partai ini merupakan partai koalisi terbesar karena menyangkut berbagai kepentingan dan pandangan/ideologi. Ideologi disini lebih dikenal sebagai sifat yang pragmatis akan ajaran filosofisnya. Semua itu merupakan unsur yang penting dalam pandangan-pandangan yang akan disampaikan kepada para pemilih dan partisipan mereka.

Di India memang memungkinkan bagi terbentuknya banyak partai, yang sampai pada saat ini tercatat lebih dari 40 partai politik, baik besar maupun kecil. Sehingga timbul pembagian partai politik di India, berdasarkan keputusan pemilu pada tahun 1968. Partai politik India dibedakan menjadi 2 jenis yaitu "Partai Nasional" dan "Partai Negara Bagian/Regional". Pembagian partai politik kedalam Partai Nasional (National Party) apabila diakui oleh 4/5 negara bagian, sedangkan apabila partai politik hanya diakui

¹⁹ India, *Political/Social Affairs*, dalam *Asia Year Book, Far Eastern Economic Review*, hal 127-128

kurang dari 4 negara bagian, maka termasuk Partai Regional (State Party).

Ada 8 Partai yang termasuk Partai Nasional yaitu:

1. Baharatiya Janata Party (BJP)
2. Communist Party of India (CPI)
3. Communist Party of India (Marxist)
4. Indian Congress (Socialist)- Sarat Chandra Sinha
5. Indian Nationalist Congress/ Indian Nationalist Congress-Indira
6. Janata Party
7. Lok Dal
8. Lok Dal (Ajit)

Termasuk "State Party" antar lain:

1. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
2. All India Forward Bloc
3. All India Muslim League
4. Dravida Munnetra Kazhagam
5. Goa Congress
6. Hill State People's Democratic Party
7. Indian Congress (J) Bhalia Group
8. Jammu and Kashmir National Conferences
9. Jammu and Kashmir Panther's Party
10. Jammu and Kashmir People's Conferences
11. Kerala Congress
12. Kerala Congress (J)
13. Kuki National Assembly
14. Mahasatrawadi Gomantak Party
15. Manipur People's Party
16. Muslim League
17. Naga National Democratic Party
18. Peasants dan Worker's Party of India

19. People's Conferences
20. People's Party of Arunachal
21. Plains Tribal Council of Assam
22. Public Demands Implementation Convention
23. Revolutionary Socialist Party
24. Shiromani Akali Dal
25. Sikkim Prajantantra Congress
26. Sikkim Congress (R)
27. Sikkim Sangram Parishad
28. Tripura Upajati Juba Samiti
29. Telugu Dessam
30. Asom Gana Parishad
31. United Minorities Front of Assam
32. Hill People Union
33. Mizo Nationalist Front
34. Nagaland People's Party²⁰.

2.2.2 Partisipasi Politik, Pemilu dan Kampanye

Salah satu bentuk partisipasi politik adalah pemilu. Lancarnya pemilu selain karena faktor elite politik partai politik juga dipengaruhi oleh suara partisipan yang dipandang cukup signifikan dalam pencapaian pemilu yang benar-benar diharapkan seluruh rakyat. Namun demikian, setiap negara terutama di beberapa negara berkembang persoalan partisipasi cukup rumit, karena kebanyakan negara baru ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangan mereka. Dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung kepada partisipasi rakyat dan keikutsertaannya akan membantu penanganan terhadap masalah-masalah

²⁰ India (1988-1989). *A Reference Annual, Research and Reference Division, Ministry of Information and Broadcasting*. Government of India, n.d, hal 51

yang ditimbulkan oleh perbedaan etnis, budaya, status sosial dan ekonomi, agama dan sebagainya. Adanya integritas nasional dalam pembentukan identitas nasional serta loyalitas kepada negara diharapkan akan berkembang dengan ditunjang melalui partisipasi politik.

Perbedaan-perbedaan etnis dan agama inilah, yang mengakibatkan timbulnya masalah dalam berpartisipasi. India yang terdiri dari 3 golongan besar masyarakat yaitu Hindu, Muslim, dan Sikhs yang tidak pernah bersatu dan selalu timbul konflik dan bentrokan yang menimbulkan korban jiwa. Golongan Hindu adalah golongan mayoritas di India dengan 80% penduduknya adalah beragama Hindu, sedangkan golongan Muslim dan Sikhs merupakan golongan minoritas yang keberadaannya sering disingkirkan dari dunia perpolitikan India.

Semenjak Pakistan memisahkan diri dari India pada tahun 1947, lewat Indian Independen Act di parlemen yang menetapkan bahwa mulai tanggal 15 Agustus 1947 akan dibentuk 2 dominion yaitu India dan Pakistan²¹. Sejak itu pula, konflik Khasmir pun bergolak. Konflik Khasmir bermula pada saat wilayah Khasmir yang mayoritas penduduknya beragama Islam harus dibagi menjadi 2; yang berbatasan dengan Pakistan menggabungkan diri dengan Pakistan, sedangkan wilayah Khasmir yang lain yang biasa disebut Jammu, menggabungkan diri dengan India. Di lain pihak, secara otomatis pula ketiga golongan itupun mencari perlindungan dan keselamatan di masing-masing negara tersebut. Golongan Hindu dan Sikhs mencari perlindungan di India, sedangkan golongan Muslim merasa lebih aman berada dibawah pemerintahan Pakistan. Sementara nasib kaum Muslim dikawasan Jammu (bagian wilayah India) selalu berusaha untuk mengadakan perlawanan-perlawanan yang bertujuan untuk melepaskan diri dari India. Sedangkan

²¹ Sofyan Naim, *Hubungan India-Pakistan pada Era Meredanya Negara Adi Kuasa*, FKIP Padang (LIPD), 1990, hal 24

nasib kaum muslim di wilayah India sendiripun tak kalah memprihatinkan. Mereka selalu menjadi golongan minoritas yang tertindas dan tak satupun dari partai yang pernah berkuasa memperhatikan nasib mereka.

Ada satu peristiwa berdarah yang sampai saat ini masih melekat dalam hati dan pikiran kaum muslim, yaitu peristiwa pengrusakan Masjid Babri di Ayodya yang dilakukan oleh Hindu militan. Akibat dari peristiwa ini sekitar 500 orang menjadi korban baik dari pihak muslim maupun pihak militan Hindu sendiri. Peristiwa ini berlanjut ketika muncul protes dari kaum muslimin terhadap kebijakan New Delhi yang seakan-akan tidak mau tahu akan peristiwa tersebut. Sehingga di Pakistan dan Bangladesh sempat terjadi balas dendam rakyat muslim dengan menghancurkan dan menyerang bangunan-bangunan suci Hindu²².

Sementara itu konflik dengan kelompok Sikhs, juga seakan-akan tidak pernah berakhir. Kelompok Sikhs merupakan kelompok nasionalis yang menginginkan negara sendiri sampai sekarang. Diduga kelompok Sikhs inilah yang juga telah membunuh Indira Gandhi, ibu Rajiv Gandhi karena alasan dendam atas peristiwa *Amltsar* di Kull Emas (**Golden Temple**) pada bulan Juni 1984. Peristiwa itu telah menewaskan ketua kelompok Sikhs tersebut yakni Jarnail Singh Bhindranwale dan ratusan pengikutnya. Dahulu kelompok ini telah dicap sebagai teroris semenjak pemerintahan Nehru. Kelompok ini sulit dipantau karena hidup dan didukung diantara rakyat, mereka juga memperoleh bantuan dana dari masyarakat Sikhs yang hidup di luar negeri²³.

Konflik-konflik dalam negara yang tidak pernah surut inilah yang menyebabkan dunia perpolitikan India terancam dan mengalami krisis

²² Di Pakistan sempat memaka korban sekitar 12 orang Hindu dan 6 orang anak yang terjebak dalam kerusuhan tersebut. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1992 pada pertengahan tahun masa pemerintahan Narashima Rao ini, ia hanya dapat mengeluarkan "politik menetralkan" terhadap fundamentalis Hindu yang dinilai oleh pengamat politik sebagai langkah untuk tetap melindungi nasionalis Hindu. Lihat, *Far Eastern Economic Review*, 17 Desember 1992

²³ Tempo, 1 Juni 1991

berkepanjangan. Selain kedua kasus tersebut, ada juga ancaman-ancaman lain yang datang, antar lain dari kelompok teroris Hindu yang didukung oleh kelompok Hindu ekstrem, juga kelompok teroris Assam yang juga menginginkan negara Assam merdeka. Ancaman juga datang dari kelompok separatis Macan Tamil Aelam dikawasan negara bagian Tamil Nadu. Kelompok ini juga diduga telah membunuh Rajiv Gandhi pada tahun 1991. Sementara itu konflik yang masih terus membara sampai saat ini adalah ulah para pemberontak islam di Jammu-Khasmir yang menyebabkan hubungan India-Pakistan belum bisa dipersatukan. Konflik yang terus bergolak terutama semenjak India merdeka ini, menyebabkan rakyat semakin menggantungkan harapannya terhadap setiap penguasa agar mampu meredam dan mengurangi gejolak-gejolak yang setiap kali muncul dan selalu memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Namun sampai sekarang rakyat india hanya dapat menunggu harapan-harapan mereka terwujud karena pemerintahan yang selama ini mereka harapkan sebagai pelindung dan penyalur aspirasi mereka tidak pernah stabil.

A. Sistem Pemilu

India yang merupakan bekas jajahan Inggris, wajar apabila pengaruh Inggris mendominasi setiap kegiatan kenegaraan tersebut. Salah satunya adalah sistem pemilu di India mengambil sistem pemilu yang dipakai di Inggris yakni **Single-Member Constituency System** (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik).

"The Congress party was in control of union government and of the majority of state. This was not because the non-Congress party were divided and single-member constituency system, inherited from the British, award victory to the candidat who polls the largest number of votes-not necessary a majority of votes cast in a contituency"²⁴

²⁴ GNS. Raghavan, *Introducing India*, New Delhi: Indian for Cultural Relation, 1993, hal 82

Konstitusi India menyebutkan bahwa kursi di Lok Sabha terbagi atas berbagai negara bagian melalui perbandingan antar jumlah kursi dengan populasi di tiap-tiap negara bagian.

“The seat in the Lok Sabha are allocated to the various state in such a manner that the ratio between the number of seat and the population of each state is, so far as practicable the same for all state²⁵”

Sistem single-member constituency/distrik ini, dipakai karena memiliki beberapa keuntungan dan dianggap sesuai dengan bentuk negara India yang federalis yang terdiri dari negara-negara bagian. Keuntungan dari sistem ini antara lain :

1. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat diperkenalkan oleh penduduk distrik sehingga faktor personalitas seseorang merupakan faktor yang penting;
2. Sistem ini lebih cenderung ke arah integrasi partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu;
3. Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antar partai-partai mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil dan mempertinggi stabilitas nasional;
4. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan²⁶.

Seperli yang telah disebutkan dalam konstitusi India tersebut, maka kursi di Lok Sabha yang terbagi atas negara-negara bagian juga menempatkan wakil-wakil partai yang memegang peranan penting dalam pemilu India yang terdiri dari ke-8 Partai Nasional juga beberapa partai negara bagian seperti **All Indian Anna Dravida Munnetra Kazhagam**, **Revolutionary Socialist Party**, dan **Dravida Munnetra Kazhagam**. Ketiga partai ini memiliki orang-orang yang sangat berpengaruh bagi terbentuknya

²⁵ The Indian institute of Public Administration,loc.cit

²⁶ Sukarna, *Sistem Politik*, op.cit, hal 86-87

pemerintahan di India dan memiliki wakil-wakil yang siap bertarung dengan partai-partai besar seperti BJP dan Partai Kongres (I) dalam setiap pemilu.

Pemilu India diikuti kurang lebih 600 juta penduduk dari 950 juta penduduk. Pada pelaksanaan pemilu selalu diwarnai oleh timbulnya korban jiwa, maka Komite Panitia Pemilu selalu mengerahkan hampir 4,5 juta petugas yang tersebar dipelosok negara bagian wilayah teritorial. Pemilu India dilaksanakan pertama kali pada tahun 1952 dan dilaksanakan sebanyak 4 sampai 5 putaran. Hal ini dengan pertimbangan karena wilayah wilayah India yang begitu luas dan banyak wilayah pelosok yang sulit dijangkau sehingga pelaksanaan pemilu tidak bisa dilaksanakan secara serentak. Selain itu pula untuk menghindari terjadinya aksi-aksi kekerasan sehingga pelaksanaan lebih terkonsentrasi pada beberapa negara bagian pada setiap putaran. Sementara perhitungan suara dimulai setelah putaran ketiga sehingga bisa mengantisipasi pada terbentuknya pemerintahan. Sedangkan putaran ke-4 dan ke-5 dipergunakan untuk daerah-daerah rawan kekerasan seperti Jammu-Kashmir dan Bihar dan juga untuk mengantisipasi perhitungan suara ulang. Di India sendiri terdapat beberapa daerah pemilihan yang merupakan basis terbesar dari partai-partai yang bertarung dalam pemilu yaitu Uttar Pradesh, Bihar, Mahasatra, West Bengal, Madya Pradesh, dan Gujrat. Keenam wilayah inilah yang merupakan basis kekuatan dari partai besar seperti BJP yang sejak pemilu tahun 1996 menguasai suara di wilayah Uttar Pradesh dan West Bengal. Partai Kongres (I) sendiri memiliki basis kekuatan didaerah Mahasatra dan Madya Pradesh²⁷.

B. Komisi Pemilu dan Kampanye

Tugas komisi pemilu India meliputi pengaturan, penilaian dan persiapan teknis, penerimaan dan penyelesaian kertas-kertas suara, supervisi, pengesahaan dan pengumuman hasil pemilihan. Pada waktu yang

²⁷ Kompas, 8 Mei 1996 dan The Hindustan Times, 24 September 1999

bersamaan komisi pemilu juga harus tetap mempertahankan eksistensinya melawan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh partai-partai politik. Mereka akan berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan sikapnya, sehingga pemilih mendapat perlindungan dan kemurnian dalam proses pemilihan. Komisi pemilihan ini diorganisir di pusat-pusat negara bagian dan diantara kelompok para pemilih. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya cara-cara kerja yang tidak jujur, korupsi suara antar lain dengan mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya.

Komisi pemilu ini mengamati jalannya pemilihan, seperti halnya menegaskan batasan-batasan konstitusi, menetapkan tanggal pemungutan suara, memberikan simbol-simbol partai, menerima dan menolak nominasi-nominasi menurut hukum dan peraturan pemilihan, menghitung suara dan mengumumkan hasilnya. Komisi ini semi otonom dan fungsinya ditetapkan dalam undang-undang India. Tak terbatasnya undang-undang merupakan unsur-unsur yang penting sekali dalam proses ini. Tersedianya juga dana bagi politikus lokal untuk membantu partai-partai yang sedang berkuasa²⁵.

Sebelum kampanye dilakukan, ada hal penting yang harus dilakukan yaitu penunjukan calon yang merupakan bagian terpenting dari proses pemilihan yang disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Penunjukan calon ini telah ditetapkan dan diatur dalam undang-undang tahun 1951 dan diatur selanjutnya dalam hukum tambahan.

Peraturan perundang-undangan itu menyatakan bahwa calon/kandidat yang menyiapkan dirinya untuk dipilih, harus memenuhi syarat dengan menulis surat penunjukan yang kemudian dikembalikan lagi kepada para pekerja komisi pemilihan. Fungsi dari pekerja Komisi Pemilihan ini adalah untuk memeriksa kertas-kertas yang telah diisi oleh para calon tersebut memenuhi syarat atau tidak.

Sebagian besar para calon kandidat akan mengikuti pemilu sebagai wakil dari organisasi partai dan dapat atas nama dirinya sendiri, jika jumlah calonnya banyak. Kandidat yang efektif hanya 1 atau 2, 3, dan 4, sedangkan yang lainnya akan gugur. Para calon dapat juga menarik kertas pencalonannya apabila diperlukan.

Sementara itu kampanye pemilu dilaksanakan 6 minggu sebelum pemilu. Kampanye di daerah pedesaan dilakukan dengan cara mendekati dan menjalin hubungan dengan para pemimpin desa. Kampanye ini dilakukan melalui rapat-rapat umum dan *parede*, juga melalui media komunikasi seperti radio dan televisi. Masing-masing partai mengisukan suatu program partainya dalam bahasa Inggris dan daerah²⁹.

²⁸ Paul R. Brass: *Political parties and Electoral Politics*, dalam Marshal M. Bouton and Philip Oldenburg (eds), *Indian Briefing*, West View Press, London, 1989, hal 76

²⁹ *ibid*, hal 78-79

BAB III

SEJARAH PARTAI KONGRES (I)

3.1 Pergerakan Indian Nationalist Congress

Indian Nationalist Congress merupakan pergerakan rakyat India yang didirikan pada tahun 1885. Tahun ini merupakan tonggak sejarah bangsa India karena pergerakan inilah yang merupakan awal berdirinya Partai Kongres yang kemudian berubah menjadi Partai Kongres (I). Partai ini merupakan partai terkuat di India mulai tahun 1969 sampai 1996. Sempat mengalami perubahan pada tahun 1978. Dibawah Indira Gandhi, Partai Kongres (I) kembali meraih suara mayoritas di parlemen pada pemilu 1984. Partai ini sempat juga terguncang pada waktu pemerintahan Rajiv Gandhi (1984-1989) dan mulai menunjukkan kearah perbaikan pada masa kepemimpinan Narashima Rao. Namun dibawah Rao pulalah Partai Kongres (I) mengalami kekalahan yang cukup fatal pada pemilu 1996 karena isu skandal suap dan korupsi.

Berikut kronologis sampai terbentuknya pergerakan Indian Nationalist Congress :

Tahun 1600 : Kedatangan Inggris di India dengan pendirian English East Indian Company of London yang kemudian melakukan perdagangan.

Tahun 1613 : Kongsi dagang yang disingkat EEIC ini, mendapat ijin dari Sultan Moghul Syah Johan untuk mendirikan pangkalan di Surat, Bombay, Congo dan Ahmedabad.

Tahun 1616-1639 : Pendirian kantor dagang di Calicut, kemudian kongsi dagang itu membeli daerah yang membujur

dipantai Timur, dan mendirikan benteng St. George yang kemudian berkembang menjadi kota Madras.

Tahun 1745-1763 : Terjadi perebutan kekuasaan antara Perancis dan Inggris atas India, yang diakhiri dengan perjanjian Paris 1763. Perebutan kekuasaan ini dimenangkan oleh Inggris yang unggul dalam perjanjian tersebut.

Tahun 1834 : Company Inggris yang masih berkuasa di India, tidak hanya melakukan perdagangan tapi sudah mulai mempengaruhi jalannya pemerintahan di India. Terlebih pada tahun tersebut, Inggris telah memisahkan Benggala menjadi 2 yaitu propinsi Benggala dan propinsi Agra.

Tahun 1857 : Terjadi pemberontakan yang dikenal dengan nama "Pemberontakan Serdadu India" karena rasa tidak puas rakyat daerah merdeka yang kekuasaannya diambil alih oleh Company dibawah pemerintahan Gubernur Jendral Lord Auckland dan Lord Dalhousi.

Tahun 1859 : Demi menanggapi pemberontakan tersebut, maka kemudian parlemen Inggris memutuskan mengambil alih pemerintahan India dari tangan Company kepada pemerintah Inggris. Kemudian Inggris mengeluarkan "The Act for The Better Government of India".

Tahun 1883 : Allan Octavian Hume, seorang pegawai Inggris asal Scot-land yang telah bekerja cukup lama di Indian Civil Service (sebuah lembaga/badan pemerintah bagi India yang dibentuk oleh Inggris), memutuskan untuk menyampaikan penderitaan rakyat India yang selama ini terkekang kepada "The Graduates of The Calcuta University". Penyampaian ini memiliki tujuan agar

segera terbentuk suatu badan yang akan memelopori berdirinya suatu organisasi guna mengusahakan perbaikan kehidupan rakyat. Pernyataan keinginan dari Hume ini ditujukan bagi para kaum terpelajar India untuk dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran mereka guna kepentingan rakyat India. Seruan Hume tersebut (dalam bentuk surat dan edaran) mendapat tanggapan dari para intelektual India, salah satunya adalah Nehru.

Tahun 1885 : Tepatnya pada tanggal 25-31 Desember 1885, terselenggarakan rapat/pertemuan di Poona yang kemudian karena adanya wabah penyakit menular maka pertemuan itu dipindah ke Bombay. Pertemuan inilah yang kemudian berhasil membentuk organisasi dengan nama All Indian Congress/Indian Nationalist Congress yang kemudian hanya disebut Congress saja. Pertama kali jabatan ketua dipegang oleh Mr. Womesy Tayander Bonnerji, sedangkan sekretaris umum adalah Hume¹.

Keinginan dari Allan Octavian Hume untuk membentuk organisasi ini, adalah pada mulanya karena perasaan tidak tahan terhadap penderitaan rakyat India yang selalu hidup terkekang tidak bisa menentukan langkah-langkah politik, ekonomi dan perdagangan sendiri. Hal ini karena semua tindakan rakyat Inggris harus mendapatkan persetujuan dari Inggris Raya. Tujuan yang ingin dia capai adalah :

¹ Sofyan Naim, *Hubungan India-Pakistan Pada Era Meredanya Ketegangan Negara Adikuasa*, FKIP Padang (Isiporan LIPI), Padang, 1990, hal 10-14.

1. Mempersalukan semua golongan rakyat India
2. Pembaharuan dalam bidang pengetahuan/pendidikan, akhlaq, sosial, politik
3. Memperbaiki hubungan antara India dan Inggris

Rapat Congress yang pertama dihadiri mayoritas dari rakyat Hindu. Diantara 72 orang yang hadir hanya ada 2 orang muslimin. Walau begitu, pada Kongres yang pertama ini belumlah diwarnai perselisihan politik yang berarti. Semua pandangan antara tokoh-tokoh tersebut hanyalah satu yaitu kemerdekaan India. Semua anggota Kongres pun berharap bahwa pergerakan ini sebagai arah tindakan dan program politik, bukan sebagai ajang pertentangan antar golongan (kasta), antara Paria (rakyat kecil) dan Brahmin (golongan elite), antara Hindu dan Islam, serta antara kaya dan miskin. Pada rapat pertama inilah kemudian dipilih tujuan dari Kongres sebagai organisasi yang membela rakyat, menghendaki perubahan dari pemerintahan otokrasi, perbaikan nasib rakyat, dan menentang setiap penjajahan dan imperialisme ekonomi.

Namun seiring dengan perjalanan waktu, setelah rapat Kongres kedua tahun 1886, mulailah tampak perbedaan-perbedaan yang mencolok. Perbedaan ini datang dari para pemimpin setelah Bonnerji yang masih tetap setia pada pemerintah Inggris. Mereka tidak berani bertindak yang dapat bertentangan dengan pemerintah Inggris. Timbul pula perpecahan-perpecahan didalam tubuh Kongres sendiri. Salah satunya adalah penolakan oleh Tilak atas kebijaksanaan-kebijaksanaan Kongres yang terlalu lunak dan selalu menunggu persetujuan dari pemerintah Inggris. Tilak melancarkan kritik-kritik atas perbuatan-perbuatan pegawai Inggris yang masih memeras rakyat dengan pengenaan pajak tanah yang tinggi atas tanah rakyat India. Aksi Tilak ini dilaksanakan di wilayah Deccan

yang karena kemelaratan wilayah tersebut sampai menimbulkan kematian dan penyakit menular. Pemerintah Inggris yang melaksanakan pemberantasan penyakit tersebut, mengambil tindakan-tindakan yang keras dengan merusak rumah-rumah dan tempat-tempat pemujaan orang Hindu. Menghadapi tindakan pemerintah Inggris ini, maka Tilakpun tidak tinggal diam, ia melakukan aksinya dengan membunuh satu persatu pegawai-pegawai Inggris yang ikut dalam pemberantasan penyakit tersebut.

Tindakannya ini mengakibatkan Tilak ditahan dan dijatuhi hukuman pada tahun 1887. Penangkapan Tilak tersebut, ternyata mengakibatkan perpecahan pendapat didalam Kongres. Sebagian merasa bahwa tindakan tersebut akan mengancam keberadaan Kongres namun sebagian lagi menilai jika perjuangan Tilak ini tidak diteruskan, maka rakyat akan meneruskan perlawanan itu secara rahasia. Peristiwa tersebut mengarahkan pada Kongres untuk membuat resolusi yang berisi tentang protes terhadap UU yang membedakan usaha-usaha merdeka antara rakyat India dan Inggris. Kemudian resolusi ini disampaikan kepada parlemen Inggris lewat Komisi Kongres yang memperjuangkan dan membela maksud-maksud dan tujuan Kongres di Dewan Perwakilan Inggris ini. Tindakan Kongres ini membuat geram pemerintah Inggris, seperti yang pernah dilontarkan oleh Lord Dufferin (salah satu anggota Parlemen) dalam pidatonya yang mengejek dan melecehkan Kongres sebagai "golongan kecil yang amat kecil" yang berlagak sebagai wakil rakyat dengan menyebarkan ajaran "sedition" yaitu ajaran yang hendak memutuskan hubungan dengan Inggris. Dari situlah kemudian Pegawai negeri dilarang menghadiri sidang-sidang Kongres.

Tapi bagi Kongres sendiri, tahun penangkapan Tilak (1887) ini dipandang sebagai awal permulaan aliran revolusioner atau aliran ekstrimis. Paham ini semakin dalam diikuti ketika terjadi pemberontakan di Benggala yang dilakukan oleh pergerakan sayap kiri yang dipimpin oleh Candra Pal dan Arabindo Ghose. Mereka ini menganjurkan "tindakan langsung" yang akan menggantikan "tindakan menunggu" yang selama ini dilancarkan oleh Kongres².

Kongres sebagai pergerakan sejak permulaan pendiriannya memang banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Diantaranya adalah tidak adanya aturan dan anggaran dasar yang jelas, sehingga keputusan-keputusan yang diambilpun sangat sulit untuk dijalankan. Rapat-rapat yang diselenggarakan hanya sebagai ajang debat antar golongan, yang memang dari dulu Kongres adalah pergerakan yang terdiri dari bermacam-macam golongan. Faktor inilah yang mengakibatkan para ketua Kongres tidak mampu lagi untuk meredam setiap gejolak yang timbul yang kemudian mengarah pada perpecahan dalam Kongres. Baru pada tahun 1889, dapat dirumuskan suatu anggaran dasar dimana terdapat tujuan Kongres yang menurut sebagian anggota Kongres dirasa masih kabur dan tidak tegas yaitu :

"Kongres Kebangsaan India bermaksud mencapai kesejahteraan rakyat India dengan mempergunakan cara-cara yang tidak melanggar UU"

Perpecahan yang timbul di dalam Kongres semakin meluas ketika timbul konflik antara golongan Hindu dan Islam. Adanya pernyataan golongan Hindu di Kongres dengan semboyannya "India

² T.S.G. Mulin, *India : Sejarah Politik dan Pergerakan Kebangsaan*, P.T. Balai Pustaka, Jakarta, 1959, hal. 138-150

untuk Hindu, terutama dari golongan ekstrim, nyata-nyata tidak mengindahkan/memperhitungkan perasaan orang muslimin. Lambat laun perselisihan makin bertambah sehingga pada tahun 1905 anggota-anggota muslimin yang menghadiri rapat-rapat Kongres makin berkurang. Hal ini merupakan tanda bahwa orang muslimin sudah mau mengundurkan diri dari Kongres dan mendirikan organisasi sendiri. Pada tahun 1906, berdirilah Liga Muslimin atau Muslim League, yang merupakan organisasi kaum muslimin dengan tujuan untuk membela golongan kaum muslimin didalam segala bidang baik ekonomi maupun sosial. Organisasi ini setia kepada pemerintah dan UU serta mau bekerjasama dengan golongan lain. Persatuan kebangsaan tetap menjadi pedoman pergerakan. Pada waktu Liga Muslimin telah berubah menjadi partai yang kuat disamping Kongres, dibawah pimpinan Moh. Ali Jinnah, Jinnah menganjurkan supaya menurut Islam, wilayah yang terdapat dalam beberapa propinsi dianggap sebagai bangsa bukan lagi sebagai golongan biasa³.

Pada tahun 1908, pergerakan Kongres, lewat perundingan Dewan Permusyawaratan Nasional, mengukuhkan organisasi ini sebagai sebuah partai Kongres yang benar-benar membawa nasib rakyat India kearah perbaikan. Keputusan ini diambil karena desakan dari golongan kiri yang dinilai lebih ekstrem dibandingkan golongan kanan (pihak moderat). Golongan kiri ini dikenal sebagai kelompok yang memiliki tujuan untuk melepaskan pemerintah India dari pemerintah Inggris dengan cara non-kooperasi dan dilaksanakan secara cepat. Sedangkan golongan moderate, juga

³ Sofyan Naim, op.cit, hal 18

menginginkan melepaskan pemerintah India dari tangan Inggris, namun dengan sikap tenang dan hati-hati.

Partai Kongres mengalami perubahan yang berarti pada masa kepemimpinan Mahatma Gandhi pada tahun 1920. Mahatma Gandhi inilah yang terkenal dengan pergerakan "satyagraha" atau non-kooperasi, menolak bekerjasama dengan pemerintah dan berdiri atas kebenaran dan kemanusiaan. Satyagraha adalah keyakinan akan kekuatan batin, suatu sikap yang aktif dan bersedia menghadapi segala kemungkinan hingga mengorbankan diri. Beliau juga mengajukan tuntutan "swaraj" atau pemerintahaan sendiri berdasarkan kebudayaan bangsa. Satyagraha inilah yang menjadi dasar pecahnya peristiwa Amritsar pada tahun 1919, yaitu peristiwa berdarah antara serdadu Inggris dan rakyat India yang banyak memakan korban jiwa. Lewat tangan Mahatma Gandhi ini juga yang telah merubah partai Kongres yang semula hanya organisasi para cendekiawan menjadi organisasi massa.

Perjuangan Mahatma Gandhi ini kemudian dilanjutkan oleh Pandit Jawaharlal Nehru yang merupakan anak angkat Gandhi. Gandhi dan Motilal Nehru (ayah Nehru) adalah teman seperjuangan di Partai Kongres yang sama-sama mengagungkan paham Satyagraha. Setelah Motilal Nehru meninggal, ia menitipkan Nehru kepada Mahatma Gandhi, agar dijadikan pengikut di Partai Kongres seperti ayahnya.

Atas desakan Gandhi, Jawaharlal menggantikan posisi Motilal dalam Partai Kongres pada tahun 1928. Inilah cara Gandhi mengontrol Jawaharlal yang cenderung atheis dan mengaku seorang sosialis, sehingga sempat membuat waswas kalangan pengusaha pendukung Partai Kongres. Untunglah, para pemimpin

Kongres berhasil meyakinkan para Industrialis India tersebut, bahwa Gandhi akan mampu mengendalikan Jawaharal.

Lewat kepemimpinan Nehru muda ini, Partai Kongres menuntut kemerdekaan penuh dari Inggris. Ia juga berhasil mengembangkan keanggotaan partai, dalam 2 tahun, anggota melonjak dari ½ juta menjadi 5 juta. Walau terjadi slalang pendapat dan perebutan pengaruh antara sayap kanan dan kiri, tapi dengan semboyan "Damai yang buruk masih lebih baik daripada permusuhan yang baik", Nehru pun akhirnya dapat mendamaikan mereka.

Partai Kongres dibawah Nehru dengan bimbingan Gandhi berhasil mengantarkan India meraih kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1947. Nehrupun menjadi perdana menteri pertama bagi India. Diawal-awal tahun pemerintahannya, ia dihadapkan pada masalah-masalah komunal yaitu kerusuhan-kerusuhan antara muslimin dan Hindu fanatik. Setahun setelah kemerdekaan India, Mahatma Gandhi tewas dibunuh seorang Hindu fanatik⁴.

3.2. Partai Kongres (I) dibawah Indra Gandhi (1978-1984) dan Rajiv Gandhi (1984-1989)

A. Indra Gandhi (1978-1984)

Semenjak India mengukuhkan dirinya sebagai negara republik pada tahun 1950, Nehru dan para pemimpin Partai Kongres berusaha untuk tetap menerapkan sekularisme di India. Keinginan mereka berhasil terbukti konstitusi India yang telah disahkan oleh parlemen pada tanggal 26 Januari 1950 sepenuhnya bersifat sekuler, tidak ada negara agama, sementara semua urusan

⁴ Sebuah Kebetulan Sejarah? (laporan utama: artikel), Tempo, 1 Juni 1991, hal 37-38

negara dipisahkan dari urusan agama. Nehrupun berhasil menerapkan "sosialisme demokratis" di India. Paham sosialisme demokratis ini nampak sekali pada sektor ekonomi, dimana negara diberi wewenang untuk membatasi, mengatur, dan mengontrol perusahaan swasta. Komisi perijinanpun dibentuk untuk mengawasi dan pemberian ijin kepada perusahaan-perusahaan swasta yang akan melebarkan sayapnya atau membentuk perusahaan baru. Akibat dari peraturan ini, maka dikalangan para birokrat berkembang korupsi yang sampai sekarang masih terasa.

Selama 17 tahun kepemimpinan Nehru ini, Partai Kongres selalu saja memenangkan pemilu dengan suara mayoritas, dan selalu tidak ada oposisi terhadap pemerintahannya. Pada usia 69 tahun, sudah ada niatan dari Nehru untuk mundur dari panggung politik. Namun rencana ini selalu ditentang oleh para eksekutif Partai Kongres, sehingga akhirnya Nehru tetap menjadi perdana menteri dan pemimpin Partai Kongres sampai ajal menjemput pada tahun 1964.

Setelah Nehru meninggal, Indira Gandhi (anak Nehru) yang selama Nehru terpilih sebagai ketua Partai Kongres selalu mendampingi tugas ayahnya, tidak dapat langsung menggantikan kedudukan Nehru. Hal ini karena Nehru sendiri tidak menghendaki Indira sebagai ketua partai ataupun sebagai perdana menteri India. Nehru tidak berkeinginan untuk meneruskan dinasti Nehru. Indira sendiri dalam perjalanan politiknya menuju Partai Kongres tanpa sedikitpun mendapat bantuan dari ayahnya. Pada saat Nehru wafat tersebut, sempat terjadi persaingan sengit pada perebutan kursi ketua Partai Kongres. Indira sendiri lebih memilih sebagai menteri

penerangan, yang kemudian menyebabkan Bahadur Sastri terpilih untuk menggantikan kedudukan Nehru⁵.

Namun kepemimpinan Sastri tidaklah bertahan lama. Selang 2 tahun kepemimpinannya, Shastri meninggal dunia secara mendadak dan Partai Kongres tidak siap menerima keadaan tersebut. Otomatis kemudian perebutan kursi jabatan ketua terjadi lagi. Kali ini Moraji Desai, tokoh senior partai, mengumumkan dirinya sanggup menjadi ketua. Namun usulan tersebut ditolak, karena para tokoh partai lebih menjatuhkan pilihannya kepada Indira Gandhi. Hal ini dengan pertimbangan Partai Kongres akan dapat memenangkan pemilu pada tahun 1967 lewat pesona Nehru, dan merekapun merencanakan menjadikan Indira sebagai boneka permainan politik nantinya. Tapi karena kekuasaan yang dimiliki Indira, maka keinginan para bos Kongres yang biasa disebut "sindikat" (orang-orang yang akan memperalat Indira), malah menjadi bumerang bagi para bos tersebut. Setelah 2 tahun kemudian Indira mempergunakan isu korupsi untuk mengalahkan "sindikat" ini. Moraji Desai dan kelompok konservatif ia singkirkan, menyikat siapa saja yang dia tidak suka dan menempatkan mereka yang loyal kepadanya. Partai Kongres pun dikendalikan oleh Indira. Pada tahun 1971, sang "Ibu India" ini unggul dalam pemilu. Namun setahun kemudian menyeruak sejumlah skandal yang menyangkul beberapa menteri dan Indira sendiri. Indira dituduh menerima sejumlah besar dana untuk Partai Kongres dari para penyelundup dan para bos mafia. Selain itu, Indira pun dituduh memberikan

⁵ Tempo, 1 Juni 1991, loc.cit

sejumlah proyek kepada anak bungsunya Sanjay⁶. Indira Gandhi, pada tahun 1975, divonis oleh pengadilan tinggi Allahabad atas kecurangan-kecurangan pada pemilu 1977, dan dijatuhi hukuman 6 tahun tidak boleh aktif dalam kancah politik dan harus mundur dari kursi perdana menteri. Namun atas usul anaknya, maka Indira tetap bisa memegang kekuasaan dengan tangan besi melalui cara para oposan dilangkapi.

Pada pemilu 1977, Indira kalah dalam pemilu karena berbagai macam tindakan kontroversi yang ia lakukan. Selain memerintah dengan tangan besi, ia juga melakukan tindakan-tindakan yang cukup berarti bagi pemerintahan India, yaitu komite pemilihan negara bagian diambil alih oleh Indira, dengan menempatkannya dibagian salah satu pos di partainya. Sehingga pemilihan gubernur negara bagianpun tidak lagi dilakukan oleh badan legislatif negara bagian, namun dilakukan oleh negara federal dalam hal ini pemerintah New Delhi. Indira menginginkan dialah satu-satunya sumber yang bisa berwenang dalam pemerintahan India. Rencana baru ini memiliki keuntungan tersendiri bagi Partai Kongres, yang menghendaki Presiden dan para gubernur negara bagian merasa berhutang budi atas kebaikan Gandhi untuk posisi/kedudukan mereka dan tidak dapat menggunakan hak dasar otonomi organisasi untuk menentang/merintang dari semua tujuan Indira. Pada saat yang sama, adanya kelemahan pada ketidakpastian akan jabatan mereka dan berkurangnya dukungan,

⁶ Sanjay merupakan putra bungsu Indira yang tertarik untuk mengikuti jejak langkah ibunya, dibandingkan dengan kakaknya, Rajiv Gandhi. Pada tahun 1975, Sanjay mulai tampil dipanggung politik. Ia mendampingi ibunya dalam berbagai kesempatan, mengeluarkan perintah atas nama Indira dan menjalankan sejumlah proyek nasional yang tak populer, termasuk sterilisasi paksa pada pria, dengan hadiah radio transistor kecil. Lihat, Tempo, 1 Juni 1991, *ibid*, hal 39

sehingga mereka kesulitan untuk memobilisasi pengikut lokal demi kepentingan politik nasional lah yang menyebabkan para pejabat itu menerima rencana-rencana Indira ini⁷.

Setelah kalah dari Partai Janata pada pemilu tahun 1977, pada tahun 1978, Indira membentuk partai baru yaitu Partai Kongres-Indira atau Partai Kongres (I). Ini merupakan siasat Indira untuk membersihkan nama Partai Kongres dari noda yang telah melekat pada Partai Kongres (lama). Selang 2 tahun, pemerintahan koalisi yang dibentuk oleh Partai Janata dibawah Moraji Desai tidak dapat bertahan lama dan pemilu kembali diadakan pada tahun 1980. Rakyat kemudian mengalihkan perhatian dan simpatinya pada Partai Kongres (I) dengan harapan agar pemerintahan yang terbentuk dibawah Indira Gandhi bisa lebih stabil. Untuk pemilu kali ini, Partai Kongres (I) mampu unggul dengan 353 kursi di Lok Sabha dan mendudukkan kembali Indira Gandhi sebagai Perdana Menteri India.

Untuk mengantisipasi agar pemerintahannya tidak jatuh karena mosi tidak percaya dan tetap mendapat simpati dari rakyat pemilihnya, kemudian Indira Gandhi mengambil langkah-langkah yang antara lain:

- (1) Dibidang stabilitas negara, Indira pada bulan Mei 1984 telah mengirimkan pasukannya untuk menanggulangi kerusakan akibat aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok Sikhs. Pengiriman pasukan ini diarahkan ke negara bagian Punjab, tepatnya di Kuil Emas (Golden Temple), Amritsar, tempat kelompok ini berpusat⁸.



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

⁷ P.F Collier, Lauren S. Bahr, Benard Johnston, ed. *Collier's Encyclopedia with Bibliografi and Index*, vol 12, New York, Toronto, Sidney, 1993, hal 610

⁸ Kelompok Sikhs merupakan kelompok terorisme yang menghendaki Punjab berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Mereka merupakan kelompok Hindu ekstrem, dan memiliki organisasi yang dinamakan Rastriya Swayasevak Sangh yang didirikan pada tahun 1925. Pada jaman Nehru, kelompok ini dijuluki sebagai "fasisme versi India".

- (2) Dibidang ekonomi, Indira akan meneruskan rencana program kebijaksanaan ekonomi baru, yang pernah ia kampanyekan pada pemilu tahun 1977, yaitu : (a) Indira menyediakan tanah yang seluas-seluasnya untuk para petani. Ini merupakan langkah Indira untuk tetap menarik simpati dari rakyat awam pendukungnya; (b) sumber hasil tambang terbesar yaitu tambang batubara dijadikan milik negara. Kebijakan ini diambil untuk menghindari kepemilikan atas Individu. Semua kegiatan yang menyangkut tentang pelaksanaan, pengawasan dan pendistribusian hasil bumi tersebut semua dibawah kontrol pemerintah; (c) pengadaan sistem pajak baru dengan pengenaan pajak tinggi bagi masyarakat elite perkotaan dan para industrialis.

Rencana perekonomian 5 tahunan ini terkenal dengan istilah "penghapusan terhadap kepemilikan" dan "pencapaian rasa percaya diri"⁹

Tahun 1984, Indira Gandhi, sang "Ibu India" tewas terbunuh oleh pengawalnya sendiri yang diduga adalah orang Sikhs. Kematian Indira ini merupakan serangkaian balas dendam dari golongan Sikhs atas peristiwa Kuil Emas (Golden Temple) di Amritsar.

Sebagai kelompok yang selalu akan mengancam keberadaan Gandhi dan keutuhan India, maka pada tahun 1984, Indira mengirimkan pasukannya dan menyerbu tempat persembunyian kelompok ini di Punjab. Penyerbuan ini menjadi tragedi berdarah dengan tewasnya ketua kelompok ini yaitu Jurnail Singh Bindranwale dan ratusan pengikutnya. Lihat, P.F Collier, Lauren S. Bahr, Bernard Johnston, loc.cit, hal 610

⁹ Charles Haus, *Comparative Politics: Domestic Responses Challengers, India*. Second ed. USA West Publishing Company, George Washington University, 1997, hal 344-350

B. Rajiv Gandhi (1984-1989)

Setelah kematian Indira Gandhi, maka Rajiv pun terpilih sebagai pengganti Indira sebagai ketua Partai Kongres (I). Simpati dari massa atas kematian Indira lah yang kemudian mengantarkan Partai Kongres (I), pada pemilu tahun 1984 unggul telak dan memenangkan kursi yang terbanyak dalam sejarah partai. Rajiv memerintah India dalam usia yang tergolong muda, 40 tahun. Ia memiliki cita-cita untuk mengantarkan India memasuki pintu gerbang abad 21. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ia membentuk kabinet yang benar-benar ahli dan kuat yang terdiri dari gabungan unsur-unsur senior dari tokoh-tokoh tua dan tokoh-tokoh muda.

Rajiv yang mendapat julukan "Mr. Clean" oleh pihak pers, memang bukanlah suatu yang luar biasa. Ketika pertama kali ia duduk di parlemen pada tahun 1981, Rajiv bahwa ia sangat menjunjung tinggi manifesto Partai Kongres (I). Rajiv pun menyokong perusahaan bebas, mengalirnya modal asing dan modernisasi, dimana kalau dilihat kebijakan ini sangat bertentangan dengan kebijakan yang telah ditanamkan oleh Jawaharlal Nehru dan Indira Gandhi. Ia juga mencerca korupsi dan membenci penjiat serta perusuh sehingga ia memiliki keinginan seluruh pemerintah India bersih dari skandal-skandal tersebut. Hal ini pernah ia ungkapkan pada Ian Jack dari Sunday Times, yang mengungkapkan keinginan Rajiv untuk "menarik orang-orang baru kedalam politik, orang-orang yang cerdas, berpikir secara barat tanpa feodalisme, anti kekerasan, dan bertekad membuat India menjadi negara yang kaya, bukan memperkaya diri sendiri".

Kampanye pemilu tahun 1984, slogan yang dipakai Rajiv merupakan persolan yang sudah mendasar dan terus bergolak

dalam politik dalam negeri India yaitu persoalan keamanan dan integrasi bangsa. Rajiv menyatakan bahwa kesatuan bangsa berada dalam ancaman dan hanya Partai Kongres (I)-lah yang dapat mempertahankan federasi India. Hal ini memang ada dan nyata dalam kehidupan politik India. Banyak hal yang akan berubah menjadi konflik karena masalah bahasa, agama, suku, ras kedaerahan, dan juga kasta. Pergolakan antar golongan dan agama di India tidak akan pernah reda. Mulai dari golongan muslim yang radikal dan kemudian dilakukan oleh orang-orang Sikhs yang selalu melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah. Sampai akhirnya pada gilirannya golongan mayoritas Hindupun ikut mengebrak. Munculnya Partai Bharatiya Janata yang beraliran Hindu oleh Lal Krishna Advani yang menentang akan sekularisme yang selama ini berusaha diciptakan di India¹⁰.

Setelah Rajiv Gandhi memenangkan pemilu dan menjadi perdana menteri, maka pada tahun-tahun pertama pemerintahannya, ia berusaha untuk memenuhi slogan-slogan kampanyenya. Persoalan keutuhan India, maka ia mengambil langkah untuk menangani masalah negara bagian Punjab, Assam, Khasmir dan Tamil Nadu. Langkah tersebut dilakukan karena negara-negara bagian tersebut selalu menuntut adanya otonomi yang lebih luas dan mengkritik hubungan pusat dan daerah. Tindakan nyata Rajiv dilakukan sejak awal tahun 1985, untuk negara bagian Punjab. Langkah pertama Rajiv, ia menjanjikan untuk mengadakan pemulihan situasi dan pengembalian kendali pemerintahan ketangan rakyat Punjab serta penarikan seluruh

¹⁰ Ravi Kant Dubey, *Prime Minister Rajiv Gandhi : Statement on Foreign Policy*, New Jersey, Princeton, University Press, 1986, hal 32-38

pasukan dari negara bagian tersebut. Demi memenuhi janjinya ini, maka Rajiv mengadakan persetujuan dengan para wakil dari Punjab yang diwakili oleh partai yang berkuasa di negara bagian tersebut yaitu Partai Akali Dal pimpinan Sant Herchand Singh Longowal. Namun usaha ini sempat terhambat karena kematian pimpinan partai tersebut. Pengganti Sant berusaha untuk meneruskan usaha perolehan otonomi ini. Pimpinan baru ini berusaha untuk meredam aksi teror dari golongan ekstrimis Sikhs. Namun nyatanya sampai sekarangpun masalah di Punjab belum dapat diselesaikan, sementara itu kelompok Sikhs masih secara terus menerus merongrong pemerintah India untuk terbentuknya negara Khalistan¹¹.

Di negara bagian Assam, telah tercapai persetujuan Assam yang ditandatangani antara Rajiv Gandhi dan tokoh-tokoh mahasiswa Assam yang tergabung dalam AASU pimpinan Prafulla Mahanta. Persetujuan ini menyangkut tentang masalah masuknya pengungsi Bangladesh ke wilayah Assam. Masalah pendatang ini menimbulkan berbagai komplikasi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Persetujuan Assam menyebutkan tentang penyelenggaraan pemilu dan pengaturan tentang status kaum pendatang dari Bangladesh. Rajiv Gandhi kemudian memberikan kebebasan kepada negara Assam melalui partai yang berkuasa di negara bagian tersebut, Partai Assam Gana Parishad untuk melakukan pemegaran tapal batas dengan Bangladesh guna menghindari infiltrasi ilegal dari negara tersebut. Lewat pimpinan partai tersebut, Rajiv juga memberikan jaminan kepada golongan

¹¹ VD Copra, R.X. Mishra, Nirmal Singh, *Agony of Punjab*, Patriot Publised, New Delhi, 1980, hal 41-43

minoritas bahwa kepentingan mereka lebih diutamakan sesuai dengan kebijakan sekularisme yang berlaku di India¹².

Banyak sudah langkah-langkah politis Rajiv dalam menangani masalah dalam negeri India yang penuh dengan teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis dan militan. Contoh diatas merupakan sebagian dari langkah Rajiv untuk berdamai dengan para kelompok militan. Sebagai seorang Perdana menteri dan sekaligus ketua partai yang berkuasa, ia memiliki beban moral untuk dapat mempersatukan bangsanya yang terpecah-pecah oleh faktor-faktor primordial. Namun semua usaha itu tidak membuahkan hasil yang diharapkannya. Kekerasanpun semakin memegang peranan, sedangkan kompromi, toleransi, dan saling pengertian semakin terabaikan. Sebut saja, orang-orang Sikhs yang tetap menginginkan Punjab merdeka, pemeluk fundamentalis Hindu yang semakin militan, orang-orang Tamil dan orang-orang muslimin, yang kesemuanya menggunakan teror sebagai alat perjuangan.

Ternyata langkah-langkah politis yang dilakukan Rajiv untuk India, tidak cukup untuk mendukung langkah Rajiv dan partainya untuk memenangkan pemilu pada tahun 1989. Rajiv Gandhi dalam pemilu tahun tersebut tidak berhasil memperoleh suara mayoritas, walaupun tidak kalah mutlak. Popularitasnya ternyata tidak dapat menyamai almarhum ibunya. Hal ini karena merebaknya isu-isu selama 5 tahun pemerintahan Rajiv sehingga mengakibatkan kekalahan. Isu-isu itu antara lain : (1) isu ekonomi. Kebijakan liberalisasi Rajiv Gandhi selama tiga tahun pertama pemerintahannya membangkitkan dinamika ekonomi di India.

¹² Laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi : India tahun 1985-1988 hal 12

Swasta memang berkembang, investasi asing masuk, disertai pertumbuhan ekonomi nasional yang rata-rata 5% pertahun. Tetapi kelemahannya yaitu kurangnya pemerataan dan hasil-hasil itu hanya dinikmati golongan menengah keatas sedang rakyat masih banyak yang hidup dalam kemiskinan, (2) isu korupsi, yang berpusat pada masalah skandal Bofors. Dalam skandal tersebut, Rajiv pribadi dan lingkungan dekatnya diluduh menerima komisi dari pembelian perlengkapan artileri India. Berhubungan dengan hal tersebut, diketemukan juga orang-orang yang dekat dengan Rajiv Gandhi memperoleh kemudahan kredit untuk mensukseskan program swastanisasi dalam pemerintahan Rajiv, dan (3) isu politik, ketidak populeran Rajiv selama lima tahun kekuasaannya lebih disebabkan karena ketidakberhasilannya memperbaharui partai¹³.

3.2.1. Kebangkitan Partai Kongres (I) pada pemilu 1991

Situasi politik India sejak kekalahan Partai Kongres (I) dalam pemilu 1989 memang cenderung rawan. Tidak tampilnya partai yang memperoleh suara mayoritas di majelis rendah (Lok Sabha) telah menjadikan pemerintahan koalisi Front Persatuan Nasional pimpinan V.P Singh yang akhirnya dipercaya memimpin India ternyata mengalami banyak kendala. Partai Bharata Janata (BJP) yang merupakan kekuatan terbesar dalam pemerintahan kolisi menarik dukungannya. Akhirnya V.P Singh mengundurkan diri dan digantikan secara kontroversial oleh Chandra Sekkar pada November 1990. Munculnya Chandra Shekhar lebih disebabkan oleh penolakan Rajiv Gandhi terhadap tawaran Presiden

¹³ Laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi : India tahun 1989-1990, hal 11

Ventakaraman untuk membentuk pemerintahan setelah jatuhnya pemerintahan V.P Singh¹⁴.

Keputusan Rajiv Gandhi untuk menolak dan justru mendukung ambisi Chandra Shekhar untuk menjadi perdana menteri adalah mempunyai arti khusus. Dipenuhinya tawaran memerintah kembali tanpa dukungan penuh masyarakat melalui suatu pemilu hanya akan melunturkan kepercayaan pendukung Partai Kongres (I).

Rajiv sadar betul bahwa kebesaran nama keluarga Nehru-Gandhi yang hampir sepanjang usia kemerdekaan India memimpin negeri itu masih mempunyai tempat tersendiri dihati rakyat. Hal ini terbukti dari banyaknya simpati yang diberikan kepada usaha Rajiv Gandhi berkampanye untuk partainya segera setelah ia tidak menjadi perdana menteri. Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan partai oposisi utama, ia rajin melakukan pendekatan terhadap rakyat, khususnya pendukung Partai Kongres (I), seperti yang dilakukannya di negara bagian Tamil Nadu, Assam, Bihar dan Rajasthan¹⁵. Keberhasilan lawatannya ini tampaknya menimbulkan optimisme sekaligus sebagai modal utama Partai Kongres (I) dalam pemilu 1991.

Perdana menteri Chandra Shekhar hanya berkuasa di India tidak lebih dari 117 hari tepatnya berakhir tanggal 6 Maret 1991. Pengunduran dirinya ini akibat dari strategi politik Rajiv Gandhi yang pada pemilu 1989 partainya memperoleh suara terbanyak meski bukan mayoritas, dan setelah kegagalan V.P Singh kondisi India semakin kacau yaitu dengan banyaknya negara bagian yang

¹⁴ *ibid*, hal 13-14

¹⁵ *Suara Karya*, 30 Mei 1991

ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat dan juga kasus Ayodya yang menjadi sumber pertentangan antara Hindu dan Islam. Oleh karena itu Partai Kongres mendukung Partai Janata (S) untuk berkuasa, tujuan supaya ada waktu untuk rekonsiliasi kedalam, dan setelah kuat maka Partai Kongres mulai melakukan manuver politik untuk merebut kekuasaan, dengan cara menarik dukungannya terhadap Chandar Shekhar. Alasannya antara lain karena C. Shekhar dinilai tidak dapat menciptakan stabilitas politik di India, puncaknya yaitu ketika partai Kongres (I) memboikot parlemen sebagai protes terhadap pengintaian atas rumah Rajiv Gandhi di New Delhi. Hal ini terjadi karena Chandra Sekkar selalu mencurigai tindakan Rajiv yang selama pemerintahannya kebijakan-kebijakan yang diambil Chandra Sekkar selalu dipengaruhi oleh Rajiv Gandhi, antara lain kebijakan pemerintah atas wilayah Tamil Nadu yang karena semakin besarnya gerakan separatis Tamil di wilayah tersebut. Akibatnya wilayah itu kemudian diambil alih langsung dibawah pemerintah pusat setelah mencabut kekuasaan ketua menteri Karunanidhi dari partai DMK yang berkuasa Di Tamil Nadu¹⁶.

Berakhirnya pemerintahan Chandra Sekkar maka tidak ada pilihan lain kecuali dilaksanakannya pemilu yang ke-10 pada tahun 1991, sejak India merdeka. Pemilu 1991 itu memperebutkan 543 anggota Lok Sabha ditambah 2 anggota yang mewakili Anglo-Indian Community, penambahan ini berlaku sampai tahun 2000. Pemilu dilaksanakan tidak serentak karena disebabkan oleh terbatasnya aparat keamanan untuk menjaga pelaksanaan pemberian suara di

¹⁶ Laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi : India tahun 1989-1990, hal 16-17

600.000-700.000 tempat pemberian suara. Namun jadwal tersebut menjadi berantakan. Pemilu tahap pertama yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei yang kemudian tahap kedua akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei itu menjadi tertunda akibat tewasnya Rajiv Gandhi pada tanggal 21 Mei. Rajiv tewas pada saat mengadakan kampanye di wilayah Tamil Nadu tepatnya dikota kecil Siperembudur. Rajiv tewas akibat bom bunuh diri yang dilakukan seorang wanita yang diduga anggota kelompok Macan Tamil Aelam (operasi pengeboman ini dikenal dengan "The Belt Bom woman"). Pemilu tahap kedua pun ditunda sampai pertengahan Juni sambil menunggu hasil penyelidikan akibat peristiwa tersebut.

Peristiwa Siperembudur ini sempat mengguncang rakyat India, terutama sekali dari simpatisan Rajiv Gandhi. Hal ini nampak sekali terlihat ketika menjelang tengah malam setelah kejadian tersebut, berkerumun para pendukung Rajiv Gandhi dimuka rumah kediamannya di New Delhi. Mereka sangat panik dan sebagian meratap sambil mengatakan "Desh ka satya nash hoyaga" (India telah dihancurkan). Pihak keamananpun terlihat sibuk dengan mengimbau kepada rakyat Tamil Nadu agar tidak keluar rumah. Jalan-jalan pun lengang dan kebanyakan rumah-rumah menutup pintu, sementara itu bendera dan tanda-tanda gambar partai peserta pemilu diturunkan dari jalan-jalan. Orang-orang juga membersihkan dinding luar rumah mereka dari tempelan-tempelan tanda gambar partai, terutama yang bukan gambar Partai Kongres (I), supaya tidak diserbu para pendukung Rajiv Gandhi¹⁷.

¹⁷ *Setelah Ledakan di Siperembudur* (artikel laporan utama), Tempo, 1 Juni 1991, hal 40

Sementara itu, dalam Partai Kongres (I) sendiri merasa terpukul dengan kematian Rajiv Gandhi. Bagaimanapun, partai ini sudah mengharapkan terlalu banyak pada Rajiv untuk dapat menaikkan kembali posisi Partai Kongres (I) sebagai partai pemenang pemilu kali ini. Kalau saja Rajiv tidak dibom dan tewas, kemenangan dalam pemilu kali ini sebenarnya berada ditangan Partai Kongres (I). Setidaknya begitulah ramalan sejumlah pengamat dan menurut hasil pengumpulan pendapat umum menjelang pemilihan dan sebelum Rajiv tewas¹⁸.

Otomatis pula setelah kematian Rajiv Gandhi ini, partai ini mengalami kekosongan kepemimpinan, sehingga pada tanggal 22 Mei 1991, Komite Pekerja Kongres mengadakan sidang darurat dan Arjun Singh (pimpinan partai senior), mengusulkan Sonia Gandhi, isteri Rajiv Gandhi untuk menjadi pimpinan Partai Kongres, usul itu diterima anggota sidang dengan suara bulat.

Menanggapi keputusan partai Kongres tersebut, seorang senior dari partai mengatakan bahwa :

"Sonia Gandhi would surely capable leader. She has a firmness of mind through long association with most politician and good knowledge of politics. She would also attract the sympathy votes, particularly from women".

Tapi yang sangat menarik adalah keinginan untuk memiliki seorang pemimpin yang namanya dapat mencegah perselisihan. Dinasti Gandhi adalah sebuah nama yang dapat melakukan itu semua. Ada pertimbangan-pertimbangan lain juga, yaitu ;(1) Sonia dianggap akan mampu menghasilkan simpati para pemilih pada distrik-distrik pemilihan yang belum memberikan suaranya (2) nama Gandhi masih dipakai sebagai penarik simpati.

¹⁸ Kompas, 30 Mei 1991

Pihak Sonia sendiri ternyata menolak permintaan dari badan Pekerja Kongres itu, dan ini semua karena suatu permintaan dari Rahul, anak laki-lakinya yang telah memohon agar Sonia tidak terjun kearena politik yang telah membunuh nenek dan ayahnya. Ini salah satu alasan penolakan Sonia Gandhi untuk memimpin Partai Kongres (I)¹⁹.

Setelah Sonia Gandhi menyatakan penolakannya, maka ada 4 calon pemimpin Partai Kongres (I) yaitu Narashima Rao, N.D Tiwari, Arjun Singh dan Sharad Pawar. Namun akhirnya pilihan Partai Kongres (I) jatuh ketangan Narashima Rao. Pilihan ini dinilai oleh pengamat dan beberapa partai oposisi sebagai tindakan kontroversial. Dinilai kontroversial karena Rao diluar dinasti Nehru-Gandhi, selain itu pula pada waktu terpilih, kondisi fisik dan kesehatan Rao sedang memburuk. Namun terpilihnya Rao ini juga tidak bisa dikatakan tanpa pertimbangan. Para pemimpin senior dan badan Pekerja Kongres memutuskan memilih Rao, karena Rao satu-satunya tokoh Kongres yang bisa mempertahankan kesatuan didalam Partai Kongres (I) selama perseinagan memenangkan pemilu²⁰.

Ternyata pilihan ini membawa keberuntungan bagi Partai Kongres (I). Lewat pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei, 12, 15 dan 20 Juni tersebut partai Kongres (I) berhasil unggul dengan perolehan kursi 260 dari 543 kursi parlemen yang harus diperebutkan. Sementara itu aliansi BJP meraih 113 kursi, Front Persatuan 73 kursi, Partai komunis 55 kursi serta sisanya 13 kursi untuk partai kecil. Walau tidak bisa meraih suara mayoritas

¹⁹ R. Prasanan, *Avoid at The Top : Whoever is Elected Chief Congress (I) Will Never Be The Same Again*, The Hindustan Times, 2 Juni 1991

²⁰ Kompas, 30 Mei 1991 dan Suara Karya, 1 Juni 1991

diparlemen yang harus dicapai sebanyak 273 kursi, maka kekurangan jatah 13 kursi dilakukan Partai Kongres dengan mengadakan koalisi dengan Partai Front Persatuan dan beberapa partai sayap kiri²¹.

3.2.2 Partai Kongres (I) dibawah Narashima Rao (1991-1996)

Keadaan Partai Kongres (I) yang sempat terguncang akibat kematian Rajiv Gandhi, ketua partai sekaligus mantan perdana menteri. Bagaimanapun juga Rajiv sudah dijadikan tumpuan harapan bagi partainya untuk dapat meraih suara mayoritas dalam pemilu yang diselenggarakan tanggal 20 Mei, dan 2, 15, 20 Juni 1991. Goncangan itu sempat pula menimbulkan konflik intern ditubuh partai karena kehilangan sesosok pemimpin yang mampu membawa kearah keutuhan dan stabilitas partai. Masalah tersebut semakin sulit, tatkala Sonia Gandhi menolak dengan tegas usul Badan Pekerja Kongres (CWC: Comite Working Congress) dan permintaan Arjun Singh untuk menggantikan suaminya menjadi ketua Partai Kongres (I). Penolakan Sonia ini yang kemudian mengantarkan Narashima Rao sebagai ketua partai menggantikan Rajiv Gandhi.

Komisi Pekerja Kongres yang beranggotakan 18 orang tersebut akhirnya pada tanggal 29 mei 1991 dengan suara bulat secara aklamasi, menyatakan pengangkatan Narashima Rao. Pertemuan ini juga dihadiri oleh seluruh pimpinan Partai kongres (I) disetiap nagara bagian. Partai Kongres (I) begitu ditinggalkan oleh Rajiv Gandhi memang telah bertindak cepat walau masih dalam suasana berkabung. Konsultasi-konsultasipun dijalankan secara maraton. Hal ini mengambil 3 tindakan pokok yang mendesak untuk

²¹ Suara Karya, 21 Juni 1991

dilaksanakan : (1) mencari ketua partai yang baru, menggantikan Rajiv Gandhi yang tewas akibat peristiwa di Siperembudur (2) mempertahankan kesatuan partai dan memperlihatkan kepada rakyat terutama kepada partai-partai saingan (3) memenangkan pemilu yang merupakan tujuan utama²².

Pilihan terhadap Rao tersebut, dianggap semua pihak sebagai pilihan yang memungkinkan. Rao dianggap sebagai tokoh yang tidak kontroversial, ia juga seorang yang tokoh senior dan loyal sehingga diharapkan akan dapat mempertahankan kesatuan dalam partai. Terpilihnya Narashima Rao sebagai ketua partai merupakan tindakan yang pertama kali dalam sejarah Partai Kongres (I) harus memilih pimpinannya ditengah-tengah masa pemilu.

Sementara itu menurut jubar Partai Kongres, Pranab Mukerjee, bahwa keputusan untuk memilih Rao sebagai ketua diambil untuk mengatasi kekosongan jabatan ketua sekaligus menghapus spekulasi tentang kemungkinan turunnya Sonia Gandhi, janda mendiang Rajiv Gandhi kepentas politik. Sementara itu juga ada beberapa faktor yang menyebabkan terpilihnya Rao : (1) kepemimpinannya Rao hanya bersifat sementara, hal ini sebagai dorongan manuver politik dikalangan tokoh-tokoh partai yang merebut posisi puncak²³. (2) tiadanya proses kaderisasi. Partai ini dalam kepemimpinannya hanya mendasarkan pada suatu dinasti

²² Suara Karya, 30 Mei 1991

²³ CWC, memilih Rao sebagai Ketua pada tanggal 29 Mei 1991 hanyalah sebagai ketua sementara sampai putaran terakhir pemilu pada bulan Juni. Hal ini memang mengingat kondisi Rao yang sakit-sakitan sehingga tidak mungkin memilihnya sebagai ketua yang permanen yang jika menang pemilu akan menjadi perdana menteri India. Sehingga pada bulan Juni tanggal 21, 1991, setelah pemilu putaran terakhir, maka CWC memiliki agenda untuk mengadakan pemilihan ketua kembali. Lihat, Suara Pembaharuan, 20 Juni 1991

dan keluarga sehingga menyebabkan anggota-anggota partai secara otomatis menunjuk Sonia Gandhi sebagai pengganti Rajiv. Tidak adanya proses kaderisasi yang terbuka dan luas inilah mengakibatkan banyak pihak yang memilih Rao (3) kewibawaan Rao sebagai tokoh tua dan loyalitasnya yang tinggi kepada partai yang diharapkan suaranya akan dihargai oleh semua pihak (4) catatan politik Rao yang cukup mengesankan, dimana sampai usianya yang ke-70 itu, Rao telah menduduki jabatan tinggi dalam partai dan pemerintahan India. Jabatan tertinggi yang pernah ia pangku adalah tiga kali menjadi anggota kabinet. Dua kali pada masa pemerintahan Perdana Menteri Indra Gandhi dan sekali dalam masa pemerintahan Perdana Menteri Rajiv Gandhi²⁴.

Selain memiliki faktor pendorong tersebut, Narashima Rao juga memiliki kelemahan yang mengakibatkan anggota Komisi Pekerja Kongres tidak menetapkan dia sebagai ketua partai yang permanen. Selain karena ia sudah tidak muda lagi dan sakit-sakitan, Rao juga tidak memiliki basis politik yang kuat. Walaupun dia pernah menjabat sebagai anggota kabinet, Rao tidak pernah menjadi anggota parlemen. Padahal ada semacam konsensus bahwa untuk menduduki jabatan tertinggi (jika Rao terpilih sebagai perdana menteri) dalam pemerintahan India, maka seseorang haruslah menjadi anggota parlemen untuk menunjukkan bahwa ia mempunyai basis politik yang kuat di daerah pemilihannya.

Hal ini jelas tidak dimiliki oleh Rao, sehingga untuk sementara ia diharapkan akan menyatukan langkah dan suara dalam tubuh partai tersebut. Selain itu juga untuk memusatkan perhatiannya

²⁴ Kompas dan Pelita, 31 Mei 1991

pada dalam meraih simpati sebanyak mungkin dari pihak pemilih²⁵. Dipihak Narashima Rao sendiri, dalam menanggapi keputusan para anggota CWC tersebut, ia tampaknya juga tidak memungkiri keadaan yang tengah menghalanginya menjadi ketua partai yang permanen. Iapun mengakui bahwa kesanggupannya sebagai ketua partai sementara hanyalah untuk menunjukkan loyalitasnya demi keutuhan partai. Ia juga menyatakan bahwa kematian Rajiv Gandhi "telah melontarkan India dan demokrasi India dalam suatu krisis yang dalam. Saya akan melakukan yang terbaik, marilah kita bekerja sama untuk mewujudkannya. Saya yakin inilah yang diinginkan rakyat dan ribuan pendukung Kongres yang lainnya". Ia melanjutkan bahwa Kongres (I) akan "menjaga India dan rakyat india untuk tetap bersatu"²⁶.

Muncul kembali polemik baru ketika Partai Kongres (I) akhirnya memenangkan pemilu yang berakhir tanggal 20 Juni 1991 tersebut. Pimpinan permanen harus segera ditetapkan karena menyangkut nasib perdana menteri yang akan memerintah rakyat India. Sidang daruratpun digelar. Kalau pada saat pemilihan pimpinan sementara partai, muncul 3 saingan Narashima Rao, pada saat pemilihan pimpinan permanen ini, Rao dihadapkan pada 1 saingan yang cukup berat. Beliau adalah Sharad Pawar. Seorang tokoh yang lebih menonjol kepada partai daripada kepada dinasti Gandhi-Nehru. Ia juga seorang menteri negara bagian Mahasastra. Namun ternyata nasib baik berpihak pada Rao, karena pada tanggal 19 Juni (sehari sebelum perhitungan pemilu terakhir), Sharad Pawar mengirimkan sepucuk surat pengunduran dirinya

²⁵ Rao Memimpin Partai Kongres (I) (Tajuk Rencana), Pelita, 31 Mei 1991

²⁶ Suara Pembaharuan, 20 Juni 1991 dan Kompas, 21 Juni 1991

sebagai pimpinan Kongres kepada CWC, dan ia sepenuhnya mendukung Rao sebagai Rao sebagai pimpinan sekaligus perdana menteri. Ia juga mengimbau kepada semua anggota partai untuk mendukung Rao. Ada alasan kuat mengapa Sharad mengambil langkah ini, (1) ia menghindari perpecahan di tubuh partai, karena ia memandang bahwa saat ini yang terpenting adalah kompromi yang menghasilkan suatu pimpinan dan perdana menteri yang kuat (2) karena banyaknya pendukung Gandhi terutama dari luar partai yang tetap menghendaki Rao agar tetap melangkah sebagai perdana menteri dan Sharad Pawar tidak mau mengecewakan rakyat (pendukung partai Kongres (I))²⁷.

Tahun pertama pemerintahan Rao, dilakukan dengan mengadakan perubahan sistem perekonomian India yang semula bersistem sosialis (warisan Nehru) kearah sistem leberalisasi (market oriented). Rao berharap dengan sistem ini, akan mampu mengangkat perekonomian India yang terpuruk selama masa-masa pemerintahan Gandhi sebelumnya. Ada alasan kuat mengapa bidang ekonomi yang pertama kali diprogramkan sebagai agenda kerja Rao : (1) keadaan ekonomi yang sangat rapuh, tercatat sejak meninggalnya Rajiv Gandhi kondisi peekonomian semakin memburuk. Ditandai dengan defisit anggaran belanja yang mencapai 8,4% GNP. Sementara persediaan devlisa yang ada tidak dapat menutupi keadaan tersebut (2) dana bantuan bank Dunia dan IMF dalam pencairannya harus melaksanakan beberapa syarat yaitu, India harus melakukan penghematan fiskal dan pembaharuan perekonomian. Menurut Rao, jika sistem perekonomian India masih tertutup, maka dana bantuan dari Bank Dunia dan IMF tidak akan

²⁷ Republika dan The Jakarta Post, 22 Juni 1991

mengalir. Sementara itu jika tidak meminta bantuan dari kedua badan dunia tersebut, maka Rao akan kesulitan untuk membayar hutang luar negeri yang semakin membengkak dan jatuh tempo pembayarannya bersamaan dengan defisit perdagangan yang sedang terjadi (3) Rao yakin bahwa program perekonomian ini akan didukung oleh semua pihak. Paling tidak masyarakat India meyakini bahwa sistem sosialis yang selama ini diterapkan tidak membawa hasil yang memuaskan untuk membawa kearah perbaikan²⁸. (4) Rao tidak ingin kursi kepemimpinannya akan terguling akibat tuntutan ekonomi.

Kebijakan perekonomian India yang baru ini, dilakukan oleh Rao bersama-sama dengan menteri keuangannya, Manmohan Sigh. Ada 3 garis besar kebijakan yang diambil yaitu (1) pergantian sistem monopoli dengan alam persaingan yang bebas (2) melakukan devaluasi rupee dengan tujuan agar mata uang ini bisa ditukar dengan mata uang negara lain (3) program debirokratisasi, pemotongan subsidi dan tarif serta swastanisasi, yang kesemuanya merupakan upaya untuk mengundang investasi asing²⁹.

Berikut ini beberapa peristiwa dan kebijakan yang mewarnai pemerintahan Rao selain kebijakan perekonomian leberalisme yang coba ia terapkan :

Tahun 1992-1993

Tepatnya pada bulan Desember 1992, terjadi peristiwa yang hampir menjatuhkan pemerintahan Rao. Peristiwa ini dikenal

²⁸ Selain itu, Rao juga belajar dari Uni Soviet, dimana perekonomian negara ini jatuh karena sistem perekonomian sosialis. Lihat, T.N Srinivasan, *Foreign Trade Policies and India's Development*, ICS Press, San Fransisco, California, 1994, hal 168-169

²⁹ loc.cit, hal 168

dengan peristiwa Ayodya. Timbulnya peristiwa berdarah ini, terjadi ketika para militan Hindu melakukan pengrusakan terhadap Masjid Babri di Ayodya. Para militan Hindu ini, telah mengklaim bahwa masjid tersebut adalah tempat pemujaan bagi Rama (dewa kepahlawanan rakyat Hindu). Tindakan para militan Hindu ini juga merusak dan membakar toko-toko dan rumah-rumah orang muslim. Merasa diperlakukan tidak adil, maka kemudian keesokan harinya, tepatnya tanggal 8 desember 1992, para pemuda muslim balas dendam atas perlakuan para militan Hindu tersebut dengan menyerang secara membabi buta. Sekitar 500 orang baik dari Hindu maupun muslim menjadi korban.

Ternyata peristiwa ini kemudian merembet sampai ke Pakistan dan Bangladesh. Para muslim yang menjadi penduduk mayoritas di kedua negara tersebut, melakukan penyerangan terhadap tempat-tempat pemujaan Hindu. Di Pakistan, sekitar 12 orang Hindu terbunuh, termasuk 2 orang anak kecil yang terjebak dalam keributan itu. Peristiwa ini terjadi di sebuah daerah pedesaan 150 km dari kota Qutta.

Sementara itu, Rao sebagai perdana menteri tidak dapat mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan konflik yang tengah terjadi antara Muslim-Hindu tersebut. Ia bahkan hanya mengeluarkan semacam pernyataan "menentramkan" terhadap para fundamentalis Hindu tersebut. Oleh para pengamat politik, tindakan Rao tersebut, dinilai hanya agar BJP sebagai partai oposisi tidak menjatuhkan posisi Rao sebagai perdana menteri. Bagaimanapun

juga, BJP akan menggunakan peristiwa tersebut sebagai isu aktual untuk menjatuhkan pemerintah Rao³⁰.

Tahun 1993-1994

Akibat dari peristiwa Ayodya tersebut, BJP (Partai Nasionalist Hindu) melancarkan kampanye untuk menyerang dan menjatuhkan pemerintahan Rao. BJP menuntut agar diadakan pemilu kembali untuk pengangkatan perdana menteri baru. Pertentangan tersebut, semakin terlihat ketika Menteri Keuangan Manmohan Singh mempresentasikan tentang anggaran belanjanya tahun anggaran 1993-1994 (April-Maret).

Pada mulanya BJP memang mendukung pemerintah Rao, terutama soal perbaikan ekonominya, namun setelah peristiwa Ayodya tersebut, BJP seakan-akan tidak lagi peduli dengan keberadaan pemerintah. BJP akan melancarkan aksinya pada 2 kubu. Kubu pertama, pada pemerintahan mengenai masalah anggaran belanja/budget. Vajpayee sebagai ketua BJP akan menilikberatkan pada penetapan baru masalah pajak dan tentang ukuran kenaikan pendapatan yang akan diperkenalkan oleh pemerintah. Vajpayee menyatakan bahwa ia akan bertindak lebih tepat daripada yang pemerintah lakukan yaitu dengan pemotongan terhadap sekto-sektor publik, penetapan aturan "tidak kerja - tidak ada gaji" untuk para pegawai negeri sipil (terutama yang terlibat dalam pemogokan), pengurangan pengeluaran dibidang fiskal, dan memakai suatu proses atas penjualan aset sektor-sektor publik untuk membayar kembali hutang publik daripada hanya menutupi kekurangan pada peminjaman.

³⁰ Harnish Mc Donald and Rita Manchanda, *Shattered Covenant*, (artikel), Far Eastern Economic Review, 17 Desember 1992, hal 11

Sementara untuk para pemilih yang mayoritas Hindu, BJP akan memakai isu-isu tentang Ayodya. BJP juga akan memberikan jaminan kepada para 10 pimpinan Hindu yang pernah melawan pemerintah dan BJP juga beraliansi dengan 3 organisasi terlarang yaitu RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh), VIP (Vishva Hindu Parishad/World Hindu Council) dan organisasi kepemudaaan, Bajrang Dal. Ketiga organisasi ini memang pernah menentang atas kekuasaan pemerintah³¹. Dirangkulnya orang-orang dan organisasi-organisasi tersebut, BJP memiliki tujuan untuk menentang Kongres (I).

Namun bagaimanapun gencarnya usaha-usaha BJP untuk menjatuhkan Rao, ternyata tidak satupun partai yang berkaolisi dengan Partai Kongres (I) menarik dukungannya. Walauapun begitu, Raopun tidak tinggal diam. Langkah yang diambilnya kemudian, dengan melakukan resufle kabinet ada tanggal 18 Januari 1993. Rao melantik 4 menteri baru dan 10 menteri muda. Resufle kabinet yang dilakukan Rao ini kemudian memasukkan beberapa orang dari golongan muslimin sebagai menteri, diantaranya; Salman Kursheed sebagai menteri dalam negeri, kemudian 2 orang lagi dari golongan muslim sebagai menteri muda yaitu Abrar Ahmed dan P.M Syed. Banyak pengamat yang menilai bahwa langkah Rao dalam meresufle kabinet dinilai sebagai tindakan yang lambat dan dalam soal keseimbangan antar golongan dan tekanan politik yang menggambarkan adanya ketidakpastian dari pemerintah. Sementara itu sikap BJP sendiripun tetap menyatakan bahwa

³¹ RSS pernah dituduh sebagai dalang pembunuh Mahatma Gandhi. Lihat, Harnish Mc. Donald, *Ayodya Backlash (The BJP Plans to Force Early Election)*, (artikel), Far Eastern Economic Review, 14 Januari 1993, hal 22

resufle kabinet ini tidak konsekuan dan tetap menuntut diadakan pemilu yang baru³².

Tahun 1995-1996

Pada tahun-tahun ini, merupakan tahun dimana Rao banyak dilanda tuduhan isu dan korupsi dalam pemerintahannya. Rao terlibat tiga tuduhan korupsi yang berkenaan dengan keterlibatan pengusaha dari Madya Pradesh, S.K Jain. Ketiga tuduhan itu, antara lain; (1) Rao dituduh menerima suap sebesar 650 millar rupee dan melakukan money-laundering, yang terpendam hampir selama 4 tahun dan berhasil dikuak oleh CBI (Central Beureau of Investgation) yang merupakan bagian dari polisi federal negara India (2) Keterlibatan S.K Jain dalam pembiayaan/pendanaan terhadap gerilyawan Muslim dalam konflik Jammu - Khasmir. Bantuan ini dilakukan dalam bentuk penukaran uang yang dilakukan secara ilegal dan Raopun tidak menindak karena Rao telah banyak menerima uang suap dari Jain sejak tahun 1988 (3) keterlibatan S.K Jain dalam kasus pembayaran terhadap 115 politisi dan biokrat New Delhi kurang lebih selama 3 tahun. CBI mensinyalir bahwa pembayaran itu untuk memenangkan kontrak bagi pengadaan tenaga pembangkit listrik. Sehingga kasus ini dikenal dengan nama "Jain Skandal Hawala" (isilah dari kata bahasa Hindi untuk uang ilegal bagi tindakan suap dan kegiatan money-laundering)³³.

Isu korupsi ini, tentu saja akan merusak citra Partai Kongres (I), terutama menghadapi pemilu yang akan diselenggarakan pada

³² Rita Manchanda, *New Face, Old Policy* (artikel), *Far Eastern Economic Review*, 20 Januari 1993, hal 13

³³ *Politics and Social Affairs*, *Far Eastern Economic Review*, Asia 1997 Year Book, hal 127

bulan April 1996. Selain tuduhan diatas, BJP juga melakukan serangkaian tuduhan dengan menyatakan bahwa Rao juga pernah menerima 30 milliar rupee dari pengusaha Jain untuk biaya pemilu pada tahun 1991 sebelum ia menjadi perdana menteri³⁴. Akibat isu korupsi tersebut, partai Kongres (I) akhirnya kalah total dengan hanya meraih sekitar 139 kursi dari 543 kursi yang harus diperoleh di parlemen. Pada pemilu ini, Partai Kongres (I) hanya mampu duduk pada peringkat kedua setelah BJP. Kekalahan mutlak ini merupakan kekalahan yang terburuk bagi sejarah partai, yang kemudian mengakibatkan Rao dituntut mundur sebagai ketua partai. Walaupun berhasil sebagai perdana menteri yang bisa menjabat sampai 5 tahun dipemerintahan India, namun ia dinilai gagal bagi Partai Kongres (I). Pada pemilu tersebut, banyak distrik yang tidak dapat dikuasai oleh Partai Kongres (I) dan banyak kehilangan suara pendukung di beberapa daerah pemilihan yang dinilai akan menjadi basis terbesar seperti di Mahasashtra dan Tamil Nadu³⁵.

3.3. Partai-Partai Politik Saingan Partai Kongres (I) (Baharatiya Janata Party dan Front Persatuan)

A. Baharatiya Janata Party

Kelompok Nasionalist Hindu/BJP, ada sejak masa Mahatma Gandhi. Pada masa itu masih terwakili oleh Hindu Mahasabha dalam parlemen yang diketuai oleh Syama Prasad Mokerjee.

Setelah tragedi pembunuhan Mahatma Gandhi, Mokerjee ingin agar Hindu Mahasabha tidak dilarang dalam perpolitikan dan

³⁴ *ibid*, hal 129

³⁵ Kompas, 27 April 1996 dan Merdeka, 1 Mei 1996

dapat mengakomodasikan pandangan politik kelompok Hindu. Namun Pandit Jawaharlal Nehru berusaha untuk menggugurkan gagasan ini dengan jalan mengajak Mokerjee masuk kedalam kabinet dan menjadi menteri Perindustrian.

Setelah dua tahun di kabinet, tepatnya di tahun 1950, Mokerjee mengundurkan diri dari pemerintahan. Tanggal 21 Oktober 1952, Mokerjee mendirikan Baharatiya Janata Sangh, dan pada pemilu 1952 BJS memenangkan 3 kursi parlemen. Namun setelah ketua Mokerjee ditangkap polisi pada tanggal 23 Mei 1952, dan kemudian meninggal ditahanan, maka BJS hampir tidak pernah lagi diperhitungkan di pemilu India.

Pengganti Mokerjee adalah Deendal Uphadyaya, dengan koalisi yang tidak menguntungkan pada masa itu bagi partainya, dengan terpaksa Deendal meleburkan dirinya kedalam Janata Party pada tahun 1977. Tiga tahun kemudian, akibat perbedaan dan konflik internal di tubuh Janata, para tokoh utama BJS keluar dan membentuk Baharatiya Janata Party. Pendirian ini ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Janata di tahun 1979.

Meskipun gagal mengembangkan diri sebagai Partai Nasional, pemimpin BJP, Deendal Uphadyaya mampu melaksanakan ideologi partainya. Semasa kepemimpinannya ia mengemukakan gagasan "Integral Humanisme". Gagasan ini dengan tegas mengkritik komunisme dan kapitalisme, serta menampilkan alternatif prespektif yang didasarkan pada hak penciptaan dan kebutuhan dasar manusia secara universal.

Perkembangan berikutnya, ideologi BJP memperkenalkan gerakan Hinduvta, yang menggunakan *Retorika Sejarah* untuk

menegaskan klaim Nasionalist Hindu atas Bharat (India)³⁶. Gerakan Hinduvta ini mengklaim dan mengecam adanya pemahaman sekuleryang membiarkan Hindu untuk mneghormati berbagi sekte dan agama diluar Hindu.

Pandangan Hinduvta diyakini oleh para idolog BJP, bahwa sudah sekian lama mereka sudah tidak tahan menyaksikan toleransi yang berlebihan terhadap penganut muslim. Gerakan Hinduvta inilah yang mengakibatkan sebagian rakyat muslim di India, kemudian lebih memilih hidup di Khasmir (salah satu negara bagian India) yang 78% penduduknya adalah muslim. Hinduvta (Nasionalis Kultural) ini lebih mengarah pada Theokrasi Hindu, sehingga konsep ini dipandang sebagai suatu kesalahan bagi India. Apalagi BJP pun mengecam bahwa masa keemasan Islam di India adalah mimpi buruk dan mimpi buruk tersebut cepat/lambat harus dihapuskan atas nama Hinduvta³⁷.

Pandangan dan idiologi BJP yang lebih mengarah pada penganut mayoritas Hindu di India, meyebabkab BJP kembali diperhiungkan dalam setaip pemilu India. Terutama setelah jatuhnya pemerinah Narashima Rao (Ketua Partai Kongres (I) pada Mei 1996, yang mengantarkan Atal Bihai Vajpayee terpilih sebagi perdana menteri. Namun banyak politikus yang memandang bahwa pemerintahan ini lemah dan ini terbukti setelah 13 hari masa pemerintahannya, Vajpayee jatuh kaena mosi tidak percaya. Walau sempat terpuruk, BJP. bangkit kembali dengan memenangkan pemilu pada awal 1998.

³⁶ Berdasarkan konstitusi India pasal 1, bahwa Republik India disebut juga Bharat, merupakan kesatuan Negara-negara (state). Daerah Repulik ini terdiri dari daerah-daerah negara yang tersebut dalam Lampiran I. Lihat, T.S.G. Mulia, 1959, op.cit, hal 340

³⁷ Republika, 5 Maret 1998

Pemerintahan Vajpayee yang kedua ini, tidak juga bisa bertahan lama. Ia dijatuhkan lagi dengan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi, setelah selama 13 bulan memerintah. Sejak awal, pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh Vajpayee memang rapuh dan tidak akan bertahan lama. Selain perbedaan pandangan antar partai yang menjadi mitranya masih besar, ia juga dihadapkan pada persoalan ekonomi dan politik yang mewarnai India pada dewasa ini. Terutama dibidang politik, egoisme sektoral antar partai begitu kuat sehingga sulit untuk menghindari konfrontasi. Maka perkiraan pengamat politik dan para politikus di New Delhi ternyata benar. BJP kalah karena 18 anggota parlemen dari partai All India Anna Dravida Munnetra Kazagham pimpinan Jayalalitha Jayaram dan 5 anggota partai Baujan Samaj pimpinan Mayawati menyeberang ke partai Kongres. Selain itu pula kekuasaan Vajpayee yang berumur 13 bulan itu telah memperuncing ketegangan baru dengan Pakistan gara-gara uji coba senjata nuklir³⁸.

B. Front Persatuan

Front Persatuan merupakan koalisi sejumlah partai kecil. Komponen terbesar Front Persatuan adalah Janata Dal Party pimpinan Prataph Sigh yang pernah menjadi perdana menteri selama 11 bulan antara Desember tahun 1989 samapai November tahun 1990. Partai ini memenangkan pemilu pada tahun 1989 dengan mengalahkan Partai Kongres (I) pimpinan Rajiv Gandhi, yang pada pemilu tahun 1989 kalah akibat isu korupsi. Sigh terjatuh karena mosi tidak percaya dari anggota parlemen. Partai ini naik lagi pamornya setelah HD. Godwa menjadi perdana menteri

³⁸ Panji Masyarakat, no. 2 tahun III, 1997

menggantikan Atal Bihari Vajpayee (dari BJP, yang hanya bertahan selama 13 hari) pada tahun 1996. Namun 11 bulan kemudian pada bulan April 1997, ia kehilangan kekuasaannya karena dicopot dari pimpinan partai. Godwa mundur dari kursi perdana menteri karena mosi tidak percaya dari parlemen dan karena Partai Kongres menarik dukungannya terhadap Front Persatuan³⁹. Kemudian Presiden Shankar Dayal Sharma sampai turun tangan dengan memberikan kesempatan kepada Godwa untuk meyakinkan parlemen lewat mosi percaya pada tanggal 11 April 1997. Namun Godwa tetap gagal untuk mempertahankan jabatannya, sehingga lagi-lagi presiden menunjukkan kekuasaannya dengan menunjuk Inder Kumar Gujral, masih dari Front Persatuan untuk membentuk pemerintahan baru dan sebagai perdana menteri yang ke-12. Pemerintahan inipun bernasib sama dengan pemerintahan Godwa yang berumur pendek yaitu hanya bertahan selama 8 bulan. Lagi-lagi ini karena ulah Partai Kongres (I) yang merasa gagal mengancam salah satu anggota koalisi Front persatuan yaitu DMK (Dravida Munnetra Kazagham), yang telah dituduh oleh Partai Kongres (I) terlibat dalam pembunuhan Perdana Menteri Rajiv Gandhi, salah satu pimpinan kharismatik Partai kongres (I) di kawasan Tamil Nadu⁴⁰.

³⁹ Republika, 4 Desember 1997

⁴⁰ Kompas, 5 Desember 1997



BAB IV

KEKALAHAN PARTAI KONGRES (I) DALAM PEMILU INDIA (1996-1999)

4.1. Kondisi Partai Kongres (I) sejak Pemilu India 1996

Pada tanggal 27 April 1996, India kembali menggelar pemilu yang ke-11. Pemilu kali ini diramalkan banyak ahli politik dan para sentimen pasar sebagai perhelatan demokrasi terbesar didunia. Pemilu ini akan diikuti sekitar 600 juta penduduk dan 16.000 kandidat turut ambil bagian. Ada 3 partai besar yang siap bersaing dengan ketat satu sama lain yaitu Partai Kongres (I), sebagai partai yang berkuasa; BJP (Baharaliya Janata Party) merupakan partai oposisi; dan Front Nasional (koalisi antar partai yang dimotori oleh Janata Dal Party sebagai partai terbesar).

Partai Kongres (I) sebagai partai yang masih berkuasa pada saat itu, tengah menghadapi masalah yang bisa menghadang kemenangan partai ini dalam meraih suara mayoritas pada pemilu 1996 ini. Problem tersebut berawal pada keluarnya ketiga senior partai, yang ketiganya juga menduduki jabatan menteri dalam kabinet Rao. Keluarnya ketiga senior tersebut yakni Palaniapan Chidambaram, M. Arunachalam dan Madravao Scindia, merupakan tindakan protes terhadap keputusan Rao yang akan beraliansi dengan Partai Komunis (AIAMDK) yang sedang berkuasa dikawasan Tamil Nadu¹. Alasan kuat penolakan ini, menurut Chidambaram (bekas menteri perdagangan kabinet Rao) karena AIAMDK (All Indian Anna Dravida Munnetra Kazhagam) merupakan partai yang

¹ The Jakarta Post, 8 Januari dan 9 April 1996

penuh dengan korupsi, sering melakukan penyalahgunaan pemerintahan, melakukan kekerasan dan cenderung kearah fasisme. Iapun menilai bahwa koalisi dengan partai ini akan melemahkan dukungan Partai Kongres (I) dalam pengumpulan suara diwilayah Selatan².

Ketiga senior yang menyempal dari Partai Kongres (I) ini, kemudian bersekutu dengan partai-partai regional untuk membentuk partai baru, yang dipimpin oleh Karunanidhi. Partai ini kemudian meraih suara mayoritas di wilayah pemilihan Tamil Nadu, mengalahkan AIAMDK dan partai Kongres (I)³, pada akhir perhitungan pemilu tahun tersebut.

Selain keluarnya ketiga menteri dan pengikut senlornya, Rao juga dihadapkan pada 2 permasalahan yang benar-benar membuat Perdana Menteri Rao terpukul. Pertama, mundurnya Sheila Kaul (menteri perumahan) yang merupakan kolega Rao, setelah dituduh terlibat skandal perumahan. Kedua, turunnya perintah Mahkamah Agung untuk menyelidiki pendeta Hindu yang diketahui terlibat dengan Rao atas tuduhan korupsi. Kasus ini menyangkut tentang penyuapan seorang pengusaha terhadap politisi dan birokrat India⁴.

Isu korupsi memang menjadi tema yang cukup riskan dalam pemilu 1996 ini. Apalagi BJP sebagai partai oposisi bertekad untuk mempergunakan isu ini untuk memukul mundur Partai Kongres (I) lewat kampanye-kampanyenya. Tema kampanyepun bukan masalah stabilitas dan pembangunan ekonomi yang selama ini menjadi tema

² Suara Karya, 23 April 1996

³ loc. cit.

⁴ Repulika, 23 April 1996

klasik dinegra-negara berkembang, namun beralih kemasalah isu korupsi dan kolusi yang berkembang dikalangan elite partai dan para politisi. Perhatian masyarakatpun begitu besar terhadap skandal korupsi tersebut, sehingga isu-isu lain seakan-akan kehilangan pesonanya untuk dieksploitasi oleh partai politik untuk dapat memenangkan pemilu. Akibatnya citra Partai Kongres (I) pimpinan PM Narashima Rao juga tidak mengesankan untuk meraih simpati rakyat India. Bukan hanya Partai Kongres saja yang kehilangan simpati akibat isu korupsi ini, namun juga menimpa kedua partai saingan Partai (I) yaitu BJP dan Front Nasional. Kedua partai ini juga seakan-akan ikut terlibat dalam kasus isu korupsi yang tengah melanda para birokrat India, sehingga diramalkan tidak akan ada yang memenangkan suara mayoritas. Pemerintah hasil pemilu lampaknya akan berbentuk koalisi, yang lazimnya tidak kokoh dalam tradisi politik India⁵. Ramalanpun berkembang, bahwa Partai Kongres (I) akan menderita kekalahan fatal pada pemilu 1996 ini.

Ramalan-ramalan yang muncul sebelum pemilu tersebut akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Pemilu yang dilaksanakan dalam 5 tahap, mulai tanggal 27 April dan 2, 7, 23, 30 Mei, telah memenangkan Partai Baharatiya Janata dan sekutunya dengan unggul 195 kursi, yang pada pemilu 1996 hanya meraih 113 kursi. Front Nasional berhasil meraih 140 kursi yang pada pemilu 1991 hanya mendapat jatah 73 kursi. Ini merupakan peningkatan yang cukup membanggakan bagi Front Nasional yang selama pemilu di India tidak mendapatkan jatah kursi yang bisa dibanggakan. Nasib buruk ternyata benar-benar menimpa partai Kongres (I). Partai yang

⁵ Rikurd Bagun, Tema kampanye Pemilu India, "Bukan Stabilitas dan Pembangunan" (artikel), Kompas, 21 April 1996

selama ini selalu sebagai pemenang dan partai berkuasa (kecuali pada tahun 1977 dan 1989) kalah telak dengan hanya meraih 139 kursi. Dikatakan kalah telak, karena pada pemilu 1991, partai ini mampu unggul dengan 260 kursi⁶. Kekalahan Partai Kongres (I) dalam pemilu 1996 ini, merupakan kekalahan yang terbesar sepanjang sejarah partai Kongres (I).

Kekalahan yang diderita oleh Partai Kongres (I) ternyata berakibat buruk pada Narashima Rao. Pada perhitungan suara pemilu putaran ketiga tanggal 10 Mei, Rao yang menyadari benar bahwa partainya kalah, akhirnya mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden India Shankar Dayal Sharma. Posisi Partai Kongres (I) memang sangat parah. Partai ini mendapat pukulan yang sangat berat karena kehilangan banyak dukungan dibasis utama kekuafanya di wilayah Selatan seperti dinegara bagian Tamil Nadu, Kartaka dan Kerala, tempat asal PM Narashima Rao. Tapi Rao sendiri menang untuk daerah pemilihan di Nadyal, Uttar Pradesh, India Utara⁷.

Perkiraan pengamat politik bahwa tidak adanya partai yang dapat meraih suara mayoritaspun terbukti. BJP sendiri sebagai pemenang pemilu hanya meraih 195 kursi, padahal jatah kursi yang harus dicapai adalah 273 kursi. Sekitar 78 kursi masih harus didapat BJP dari hasil koalisi. Sementara itu, antara BJP dan Partai Kongres (I) tidak mungkin melakukan koalisi bersama. Seperti telah diketahui bahwa antara BJP dan Partai Kongres (I) terdapat pandangan/ideologi yang sangat bertolak belakang. Disatu sisi, BJP merupakan partai dengan loyalitas Hindu yang sangat kuat, disisi lain, partai

⁶ Kompas dan Bisnis Indonesia, 31 Mei 1996

⁷ Kompas, 10 Mei 1996

Kongres (I) merupakan Partai sekuler. Namun BJP, maupun Front Nasional masing-masing telah memegang komitmen untuk tetap melanjutkan program liberalisasi perdagangan yang telah diterapkan oleh pemerintahan Narashima Rao⁸.

Kenyataan tidak adanya partai pemenang pemilu yang menang secara mayoritas, menyebabkan timbul polemik, siapakah yang akan menjadi perdana menteri India berikutnya?. Padahal diharapkan pemerintahan sah terbentuk tanggal 10 Mei. Muncul spekulasi bahwa V.P Singh dari Janata Dal (Front Nasional)-lah yang akan menjadi perdana menteri selain Vajpayee (BJP). Menurut S. Ramachandram Pillai, pimpinan Partai Komunis India-Marxis (CPI-M) sekutu BJP, mengatakan bahwa sesuai konsensus yang berkembang dikalangan kelompok tengah dan kiri, BJP akan membujuk V.P Singh untuk memimpin pemerintah sebagai perdana menteri yang baru. Namun seperti yang sudah pernah terjadi, pemerintah V.P Singh adalah pemerintah hasil koalisi yang rapuh pada tahun 1989. Sehingga para politikus pun meramalkan bahwa jika pemerintah Singh yang terbentuk, maka pemerintahan itu tidak akan bertahan lama⁹.

Walau kemudian pemerintah Vajpayee-lah yang terbentuk, namun pemerintah ini tidak bertahan lama. Setelah 13 hari memegang kekuasaan, tanggal 28 Mei 1996, Vajpayee mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Shankar Dayal Sharma. Pengunduran diri Vajpayee ini, merupakan persiapan Vajpayee dalam menghadapi sidang Lok Sabha, tanggal 30 Mei 1996. Pada

⁸ BJP maupun Janata Dal (Front Nasional) sudah menyatakan komitmen untuk melanjutkan pembaharuan dan liberalisasi ekonomi, yang sudah dirasakan dampak positifnya oleh berbagai kalangan di India. Basis pembaharuan dan liberalisasi ekonomi memang kuat, dan tampaknya telah menjadi sebuah komitmen nasional. Lihat, Kompas, 10 Mei 1996

⁹ Suara Karya dan Merdeka, 11 Mei 1996

tanggal tersebut, BJP akan menghadapi mosi tidak percaya yang dilancarkan oleh Partai Kongres (I) yang didukung oleh Front Nasional. Front Nasional yang pada mulanya mendukung BJP, akhirnya termakan bujukan Partai Kongres (I) dengan pernyataan bahwa Partai Kongres (I) akan mendukung Front Nasional untuk membentuk pemerintahan, jika berhasil menjatuhkan Vajpayee¹⁰. Keinginan Partai Kongres (I) pun terlaksana. Pemerintah Vajpayee tumbang dalam waktu yang sangat singkat¹¹.

Pemerintah barupun terbentuk, H.D Godwa dari Front Nasional membentuk pemerintah dengan didukung oleh Partai Kongres (I) dan Partai Komunis. Pada tanggal 5 Juni 1996, lewat sidang di Lok Sabha, H.D Godwa menyatakan akan melanjutkan kebijakan reformasi ekonomi, menempuh kebijakan tegas terhadap isu nuklir, dan melakukan pendekatan yang lebih lunak pada masalah Khasmir. H.D Gorwa pun berhasil memenangkan mosi tidak percaya dari parlemen lewat dukungan Partai Kongres (I) pada tanggal 12 Juni 1996¹². Dukungan Partai Kongres (I) terhadap pemerintahan H.D Godwa ternyata mampu melampaui masa krisis pada tanggal 12 Juni tersebut yang ditargetkan oleh Presiden Shankar Dayal Sharma.

Dibalik kekuatan Partai Kongres (I) dalam mempengaruhi pemerintahan India, ternyata dalam tubuh Parti itu sendiri tengah

¹⁰ Kompas, 29 Mei dan Suara Pembaharuan 28 Mei 1996

¹¹ Menjelang Sidang Lok Sabha, Partai Kongres (I) yang menjadi partai oposisi melancarkan mosi tidak percaya. Langkah yang dilakukan Partai Kongres (I) untuk menjatuhkan Vajpayee dengan menghembuskan isu : (1) BJP tidak mau meneruskan program liberalisasi ekonomi yang telah diterapkan oleh Rao, sehingga pada tanggal 24 Mei, pada saat parlemen bersidang, BJP berjanji untuk mempercepat pembaharuan ekonomi. (2) BJP tidak sesuai dengan paham sekuler yang selama ini telah ada di India. Padahal di India tidak dibenarkan adanya diskriminasi antar agama. Jika BJP berkuasa maka kemungkinan besar diskriminasi agama akan makin tercipta. Lihat, loc. cit

¹² Kompas, 29 Mei 1996 dan 15 Juni 1996

terjadi konflik menyangkut tuntutan terhadap mundurnya Rao sebagai ketua partai. Rao yang dianggap telah merusak citra partai karena keterlibatannya dalam kasus suap dan korupsi yang selama ia menjadi ketua dan perdana menteri India. Walaupun akhirnya Rao telah mengundurkan diri dari ketua secara resmi pada tanggal 21 September 1996, namun Rao tetap menolak untuk melepaskan jabatannya sebagai ketua fraksi di parlemen. Sikap Rao membuat berang Sitaram Kesri (ketua partai yang baru). Menurut Kesri, sikap Rao yang tidak ingin melepaskan kontrolnya pada fraksi Kongres di parlemen (CPP) telah membuat Kesri dan kalangan anggota Komite Eksekutif CPP mengimbau agar Rao mau mengundurkan diri.

Sidang Komite Eksekutif CPP (Congress Parliamentary Party) yang digelar pada tanggal 18 Desember 1996, yang dihadiri oleh hampir seluruh anggotanya, mengeluarkan resolusi tentang kemunduran Rao. Resolusi tersebut dibacakan oleh Priya Ranjan Das Munshi, salah seorang tokoh fraksi yang paling keras mengkritik Rao. Sidang tersebut tampaknya menjadi bagian dari usaha keras Partai Kongres (I) untuk memperbaiki citranya setelah dinodai oleh berbagai macam skandal yang melilit tubuh organisasi politik ini. Situasilah yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Kongres (I) merosot tajam pada pemilu tahun 1996, sehingga Partai ini mengalami kekalahan yang cukup fatal¹³.

Sementara itu langkah nyata yang dilakukan Sitaram Kesri dalam partainya adalah dengan menarik kembali 3 pengurus yang telah dipecat oleh Rao pada tahun 1993 lalu. Tiga orang itu adalah mantan menteri federal M.L. Fotedar dan Sheila Dixit serta mantan

¹³ Bisnis Indonesia dan Kompas, 19 Desember 1996

Sekjen K.N Dixit. Langkah lain yang cukup membuat para pendukung Rao menjadi berang adalah keinginan Kesri agar Sonia Gandhi, janda mending Rajiv Gandhi masuk dalam tubuh CWC. Keinginan inipun ternyata didukung oleh sebagian besar pendukung partai. Kesri pun selalu mengumandangkan "Bring In Sonia, Save India" dalam setiap kesempatan. Hal ini sesuai dengan keinginan para pengagum Sonia yang selalu terus menerus mendesak pimpinan partai agar menempatkan penerus Gandhi tersebut dalam tubuh CWC¹⁴.

Ketika kondisi internal partai mulai bisa teratasi dengan mundurnya Rao sebagai ketua partai maupun sebagai fraksi partai di parlemen, menyusul ulah Kongres dengan memulai bersitegag dengan pemerintahan Godwa. Kongres menilai bahwa pemerintahan Godwa tidak dapat mengembangkan kekuatan sekuler. Selain itu pula Kongres selalu ingin agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Godwa harus berdasarkan persetujuannya. Hal inilah yang tidak diinginkan oleh Front Nasional. Memang tujuan semula Partai Kongres mendukung Front Nasional untuk membentuk pemerintahan adalah untuk menghalangi Partai Nasionalist Hindu berkuasa lagi. Kenyataan ini disadari betul oleh Front Nasional, sehingga Godwa blarpun dibawah ancaman Kongres tetap tidak akan mundur dari jabatan perdana menteri sebelum sidang parlemen dalam mosi percaya tanggal 11 April 1997¹⁵.

Menghadapi kegigihan Godwa tersebut, membuat Kesri kemudian mengirimkan surat kepada Presiden Shankar Dayal Sharma yang menuduh bahwa Godwa tidak bisa menangani

¹⁴ Merdeka, 19 November 1996

¹⁵ Kompas, 5 April 1997

terutama pada masalah-masalah keamanan dan pertahanan¹⁶. Alasan Kongres oleh para pengamat politik dinilai tidak mendasar, bahkan dinilai hanya sebagai alasan politis untuk kepentingan partai Kongres (I) agar Kesri bisa naik menjadi perdana menteri¹⁷. Mengenai pembicaraan damai antara Kongres dan Front Nasionalpun tidak membawa hasil. Partai Kongres (I) tetap pada pendiriannya untuk menarik dukungannya dan bersikeras agar Godwa tetap mundur dari jabatannya dan Kongres (I) berjanji akan mendukung Front Nasional untuk membentuk pemerintahan kembali. Tindakan ini untuk menghalangi agar jangan sampai terjadi pemilu yang akan membawa kearah kemenangan BJP.

Tindakan Kongres yang tetap bersikeras pada keputusannya, mengakibatkan Presiden Shankar Dayal Sharma turun tangan dengan memberikan kesempatan kepada H.D Godwa lewat mosi tidak percaya pada tanggal 11 April 1997. Kongres (I) yang mendengar keputusan Presiden India tersebut, kemudian mengimbau kepada seluruh anggota Kongres di parlemen agar tidak

¹⁶ Isu keamanan ini berkenaan dengan pembicaraan perdamaian dengan Pakistan tentang masalah Kasmir, yang diperkirakan oleh pemerintahan Godwa akan terus berlangsung. Namun kenyataan itu meleset, ketika pada tanggal 29 Maret 1997 terjadi ledakan bom di Kasmir yang menewaskan 17 orang. Kemudian penolakan pemerintah India bekerjasama dengan Singapura Airlines senilai 708 juta dollar AS. Sementara itu, PM Godwa menandatangani kerjasama perdagangan dan pertahanan langsung dengan Presiden Boris Yeltsin dari Rusia. Yeltsin sepakat membantu India membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pada bulan Februari 1997. Lihat, Kompas, 11 April 1997 dan Suara Pembaharuan, 31 maret 1997

¹⁷ Para pengamat politik menilai bahwa pemerintahan Godwa yang hanya berumur 10 bulan itu melakukan langkah-langkah yang cukup berarti bagi perbaikan kehidupan India, terutama dengan negara-negara seperti China dan Rusia. Mengenai kebijakan perekonomian tentang paket pemerintah dalam rangka pemotongan pajak banyak disambut gembira oleh kalangan industri domestik dan para penanam modal asing. Pemerintah Godwapun tetap melanjutkan pembicaraan kembali dengan Pakistan tentang masalah Kasmir. Lihat, Kompas, 11 dan 12 April 1997

menyetujui mosi percaya yang diajukan oleh Godwa. Namun akhirnya Godwapun harus menyerah dengan keputusan parlemen dan kemudian memilih mengundurkan diri. Agar tidak terjadi pemilu, kemudian Presiden tetap mempercayakan Front Nasional didukung Partai Kongres (I) untuk membentuk pemerintahan¹⁸.

4.2 Kebijakan Partal Kongres (I) menaikkan Sonla Gandhi (1997)

Sepak terjang Partai Kongres (I) dalam mengontrol pemerintahan di India ternyata sangat besar. Terbukti dari 2 pemerintahan yang sudah ada tumbang hanya karena Kongres menarik dukungan dan terguling melalui mosi tidak percaya di parlemen yang notabene sebagian besar anggota parlemen India adalah anggota partai Kongres (I). Pengaruh kuat Kongres (I) dipemerintahan ternyata tidak sejalan dengan dengan keadaan intern partal itu sendiri. Walau memiliki pengaruh kuat namun partal ini masih memiliki masalah yang sangat vital yaitu soal figur kepemimpinan. Meskipun Sitaram Kesri telah menggantikan kepemimpinan Rao yang penuh kontroversial itu, ternyata sosok Sitaram Kesri tidak bisa mendamaikan gejolak-gejolak intern partal ataupun para pendukung partal (rakyat) yang masih mengharapkan agar keturunan Gandhi-lah yang memegang tampuk kepemimpinan partal.

Dukungan anggota partal terhadap kehadiran dinasti Gandhi yang hilang, terlihat pada saat partal Kongres (I) mengadakan konvensi akbar nasional di Calcuta pada tanggal 9 Agustus 1997.

¹⁸ Shirad Sidhva, *Delhi in Disarray (Congress Move Plunges India into Political Uncertainty)*, (artikel), *Far Eastern Economic Review*, 21 April 1997, hal 20

Ribuan anggota partai yang hadir mendesak Sonia Gandhi, janda mendiang Rajiv Gandhi untuk mengambillalih kepemimpinan.

Seruan mantan menteri besar Mandhavrao Scindia yang menyatakan bahwa hanya Sonia Gandhilah yang memiliki visi mendiang Rajiv Gandhi. Visi tentang sebuah India yang baru. Sonia dipandang dapat memahami visi lebih baik dibandingkan sebagian besar diantara para anggota yang lain. Seruan tersebut mendapat respon yang luar biasa dari seluruh anggota Partai kongres (I) yang hadir pada konvensi akbar tersebut¹⁹.

Dukungan yang sangat antusias dari para anggota Kongres (I) merupakan reaksi atas pidato Sonia pada tanggal 8 Agustus 1997, masih dalam acara tersebut. Dalam pidatonya Sonia menyatakan bahwa Kongres (I) ternyata sudah terlalu menjauh dari rakyat India yang sebagian besar masih dibawah garis kemiskinan. Kongres (I) oleh Sonia dinilai telah kehilangan semangat untuk bekerja keras dan pengabdian kepada rakyat. Sementara itu sosialisme sekuler dan demokrasi di Partai Kongres (I) hanya dipegang sebagai idiologi partai bukan untuk diterapkan demi kepentingan rakyat. Sonia menambahkan bahwa Kongres (I) butuh gerakan massa untuk membangkitkan idiologi Kongres (I). Pidato Sonia selama 5 menit inilah yang seakan-akan telah membakar semangat anggota partai untuk segera menghentikan krisis yang tengah terjadi pada partai besar ini²⁰.

Sementara itu pihak Sitaram kesri sendiri menyadari bahwa kepemimpinannya memang tidak terlalu diharapkan oleh sebagian anggota partai. Maka Kesripun akhirnya menawarkan jabatannya

¹⁹ Kompas dan The Jakarta Post, 11 Agustus 1997

²⁰ Kompas, 11 Agustus 1997, loc.cit

untuk dipegangan oleh Sonia. Kesri sadar bahwa dukungan rakyat dan seluruh anggota partai sangat besar terhadap kehadiran Sonia Gandhi sebagai pemimpin partai. Iapun siap untuk mundur jika sewaktu-waktu Sonia ingin menduduki jabatannya.

Sebenarnya tawaran terhadap Sonia ini telah muncul setahun lalu lewat mantan pemimpin Arjun Singh untuk menduduki jabatan Rao. Namun tuntutan ini ditolak masih dengan alasan karena tidak ingin terlibat dengan masalah politik yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa suami dan ibu mertuanya. Walau akhirnya Sonia mau juga menerima keinginan para anggota partai untuk masuk dalam partai Kongres pada tanggal 8 Mei.

Sonia Maino menikah dengan Rajiv Gandhi pada tahun 1968. Ia merupakan keturunan asli dari Italia Utara. Wanita lulusan sarjana bahasa Rusia dan Inggris dari Universitas Oxford, Inggris itu, berusaha keras untuk menjadikan India sebagai tanah airnya. Berbagai macam kebudayaan dan tradisi India berusaha ia pelajari, bahkan dengan tidak memakan waktu yang lama ia telah menguasai bahasa Hindi (bahasa asli India). Itulah sebabnya mengapa ia begitu disayang oleh Indira Gandhi. Setelah kematian Rajiv Gandhi, Sonia lebih memilih untuk tinggal dirumah mengurus kedua anaknya, Priyanka dan Rahul daripada menerima tawaran Arjun Singh dan CWC (Badan Pekerja Kongres) untuk memimpin Partai Kongres menggantikan Rajiv Gandhi pada tahun 1991. Ternyata permintaan itu datang kembali, setelah Rao mundur dan atas desakan sebagian besar anggota partai. Namun Sonia masih bersikeras pada pendiriannya bahwa ia tidak ingin terlibat dalam arena politik, walaupun pada akhirnya ia menyerah dan kemudian bergabung dalam partai Kongres pada tanggal 8 Mei. Bagaimanapun juga,

Sonia tetap mengawasi setiap perkembangan partai peninggalan Nehru tersebut, yang dia lakukan hanya dikediamannya di Jalan Janpath 10, New Delhi, sebelum ia memutuskan untuk bergabung dengan partai tersebut²¹.

Desakan yang terus menerus baik dari kalangan anggota, pendukung partai ataupun dari pihak Sitaram Kesri sendiri sebagai ketua partai, akhirnya meluluhkan pendirian Sonia. Pada bulan November, Sonia mengeluarkan pernyataannya untuk mencoba memimpin Partai Kongres (I). Sonia tidak bisa diam saja menyaksikan kondisi partai yang semakin lama semakin mengendor dilanda krisis. Alasan utama pengangkatan Sonia ini hanya karena Sonia memiliki kharisma sebagai penerus dinasti Gandhi. Sementara itu kalau dilihat dari pengalamannya dibidang politik, para pengamat politik memandang Sonia memang belum apa-apa. Namun semua itu tidaklah penting, karena yang terpenting sekarang adalah keutuhan partai, dan karena kemunculan Sonia ini merupakan penarik bagi jutaan warga India yang membelot dari Partai Kongres (I) beberapa tahun belakangan ini. Pernyataan kesediaan Sonia ini hampir bersamaan dengan krisis pemerintahan yang sedang dihadapi oleh pemerintah Gujral. Dari sini Sonia berjanji akan mencoba membawa kembali Kongres ketampuk kekuasaan jika pemerintah minoritas yang kini sedang berkuasa ternyata ambruk²².

Pemerintah Inder Kumar Gujral yang menggantikan pemerintahan H.D Godwa, memang tengah menghadapi ancaman terguling. Semua itu juga karena ulah Partai Kongres (I). Hampir setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Gujral ditentang oleh

²¹ Media Indonesia, 11 Agustus 1997 dan Suara Pembaharuan, 12 Agustus 1997

²² Bisnis Indonesia dan Suara Karya, 22 November 1997

Partai Kongres (I), antara lain; (1) pada bulan Mei, pemerintah Gujral terpaksa membatalkan rencananya untuk menaikkan produksi minyak dan gas bumi karena tekanan Kongres (I) dan Partai Komunis; (2) keinginan pemerintah Gujral untuk mengeluarkan RUU pada bulan Agustus untuk mengizinkan perusahaan asing ikut memiliki saham perusahaan negara di sektor asuransi, ditentang oleh Partai Kongres (I) dan BJP. Alasan yang dipakai, untuk melindungi perusahaan negara tersebut dari pengaruh dan campur tangan pihak asing. RUU tersebut akhirnya ditolak; (3) pada bulan Oktober, telah terjadi kekacauan di parlemen. Hal itu mengenai negara bagian Uttar Pradesh, pemerintah Gujral meminta ijin kepada Presiden Narayanan untuk mengambilalih pemerintahan negara bagian tersebut, pemermintaan tersebut ditolak. Sementara itu Kongres (I) mengecam tindakan Gujral tersebut. Bahkan beberapa anggota koalisi menyalahkan Gujral terlalu lamban dalam mengatasi krisis tersebut²³. Bukan hanya kebijakan-kebijakan Gujral yang selalu bertentangan dengan Kongres, namun Kongres juga mulai berang ketika Gujral menolak usulan Kongres untuk mengeluarkan DMK (Dravida Munnetra Kazhagam) dari anggota koalisi. Partai Kongres (I) telah menuduh DMK terlibat pada pembunuhan Rajiv Gandhi di kawasan Tamil Nadu. Kongres (I) menuduh DMK telah dengan diam-diam memberikan dukungan kepada para gerilyawan seperatis Srilanka yang dipersalahkan atas terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Namun Gujral yakin kalau anggota koalisinya tidak terlibat sehingga ia menolak tuntutan Kongres (I)²⁴.

²³ Kompas, 5 Desember 1997

²⁴ Merdeka, 22 November 1997 dan Kompas, 5 Desember 1997

Akhirnya pada tanggal 3 Desember 1997, pemerintah Gujral benar-benar jatuh dan kabinet merekomendasikan pembubaran parlemen, sehingga satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah dengan pemilu yang baru. Beberapa sumber menyatakan bahwa BJP dan Partai Kongres (I) pada saat menjelang jatuhnya pemerintahan Gujral, masih berusaha untuk membentuk pemerintahan baru. Namun partai kecil yang pernah berkoalisi dengan pemerintah Gujral menolak ajakan tersebut. Presiden K.R Narayanan, akhirnya mengumumkan untuk mengadakan pemilu awal tahun 1998, karena tidak adanya tanda-tanda bahwa kedua partai besar itu akan dapat membentuk pemerintahan secepatnya.

Menghadapi pemilu awal tahun 1998, walau belum ditetapkan kapan pelaksanaannya, baik BJP maupun Partai Kongres (I) telah mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk dapat menggalang massa pendukung sebanyak-banyaknya. Pihak BJP melakukan peringatan pada tanggal 6 Desember, untuk mengenang peristiwa berdarah di Ayodya yang terjadi pada tanggal 6 Desember 1992. Langkah ini dilakukan untuk lebih banyak menggalang pendukung dari golongan Hindu dan juga berusaha meraih sura 120 juta pemeluk agama Islam yang belakangan ini menarik dukungannya pada Partai Kongres (I). Juru bicara, Yaswath Singh dari BJP, menyatakan bahwa pertikaian antara komunitas Muslim dan Hindu harus segera diakhiri. BJP akan menghidupkan semangat ini dan memotori hidup berdampingan secara damai²⁵.

Partai Kongres (I) dalam menggalang massa, jauh berbeda dengan yang dilakukan BJP. Partai ini lebih memilih jalan untuk

²⁵ Kompas, 5 Desember 1997

mendesak terus Sonia agar benar-benar mau terjun ke politik dan menjadi jurkam partai pada pelaksanaan kampanye untuk pemilu mendatang. Pada tanggal 29 Desember 1997, keluarlah pernyataan Sonia Gandhi yang bersedia untuk menolong Partai Kongres (I) dengan menjadi juru kampanye bagi partai tersebut. Kesri sendiripun yang memilih bersedia mundur jika Sonia bersedia menjadi ketua partai, menyatakan bahwa Sonia adalah penarik massa yang sangat kuat. Ia adalah pemimpin kharismatik dan gerakannya akan meningkatkan moral anggota partai²⁶.

Namun dibalik kesanggupan Sonia tersebut, timbul pertanyaan sanggupkah Sonia Gandhi mengangkat kembali Kongres (I) kedalam kekuasaannya? Sejumlah pengamat melihat, dikalangan pemilih rakyat pedesaan, nama Sonia Gandhi identik dengan penerus dinasti Nehru-Gandhi. Bagi pemilih dikalangan ini, Sonia bisa menjadi faktor penentu. Soal keturunan bukan masalah. Apalagi Sonia sudah sejak lama mampu memunculkan citra wanita India. Tapi kelompok pengamat lain menyatakan, bagi kals menengah perkotaan, dengan latar belakang pendidikan yang relatif cukup tinggi, lebih memandang Sonia dalam hal pengalaman dan kemampuan. Pengamat politik ini menyatakan bahwa Sonia tidak memiliki pengalaman politik. Namun, jika dikaitkan dengan keyakinan para anggota Kongres, maka Sonia memiliki "nilai tersendiri" bagi Kongres sebagai pemersatu antar anggota.

Sementara sebuah hasil jajak pendapat tanggal 29 Desember 1997, memperlihatkan posisi Sonia Gandhi berada di urutan kedua setelah ketua BJP Atal Bihari Vajpayee yang diprediksikan akan

²⁶ Media Indonesia, 31 Desember 1997

menjadi perdana menteri. Hasil jajak pendapat menerangkan bahwa A.B Vajpayee memperoleh 27%, Sonia Gandhi memperoleh 17%, sedangkan Perdana Menteri Inder K Gujral meraih 6% dan Ketua Partai Kongres (I) sendiri, Sitaram Kesri hanya mendapat 3% suara²⁷

4.3 Faktor-Faktor Konflik Intern ditubuh Partal Kongres (I)

Partai Kongres (I) yang semenjak kepemimpinan Mahatma Gandhi telah berubah manjadi partai massa dengan tipe sosialis. Hal ini terlihat dari usaha-usaha Partal Kongres (I) untuk selaiu menghimpun anggota sebanyak mungkin untuk anggota permanen partai. Ciri khusus dari partai massa bertipe sosialis ini adalah partai ini merangkul hampir seluruh lapisan penduduk. Demikian juga dengan Partal Kongres (I) yang merupakan partai sekuler yang keanggotaannya dari seluruh penduduk India yang terdiri dari berbagai ras, agama dan berbagai strata penduduk²⁸.

Ternyata ciri yang melekat pada Partai Kongres (I) yang terkenal dengan partai rakyat ini, belakangan ini banyak mengalami kemunduran dalam hal soal dukungan dari rakyat. Merosotnya dukungan rakyat ini disebabkan karena rakyat merasa Partai Kongres (I) telah mengabaikan nasib mereka dan mulai menjauh dari golongan minoritas Muslim. Faktor inilah yang diangkat oleh Sonia Gandhi dalam pidatonya selama 5 menit pada konvensi akbar Partal Kongres (I) pada tanggal 8 Agustus 1997 agar Partal Kongres (I) meninjau kembali kebijaksanaannya untuk lebih mendekat lagi pada rakyat.

²⁷ Media Indonesia dan Kompas, 31 Desember 1997

²⁸ Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, P.T Tiara Wacana Yogyakarta, Yogyakarta, 1988, hal 38

Seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa Partai Kongres (I) dalam kehidupan politik India dahulunya adalah merupakan satu-satunya partai politik yang ada di India sehingga India dikatakan menganut sistem partai tunggal. Namun setelah perpecahan-perpecahan yang timbul mulai tahun 1969, maka India dapat dikatakan sebagai penganut sistem multipartai. Kondisi sistem multipartai ini mengarah pada terbentuknya kelompok-kelompok yang dapat mengarah pada perselisihan dan perpecahan antar anggota dalam intern partai itu sendiri. Hal ini dikemukakan oleh **Sigmund Neumann** dalam tulisannya "Kearah Suatu Studi Perbandingan Partai-Partai", mengemukakan bahwa sistem multipartai seringkali terdapat perpecahan-perpecahan dan kelompok-kelompok dalam tubuh partai dengan timbulnya partai-partai ketiga yang dalam saat-saat tertentu akan mempengaruhi perimbangan kekuasaan dan memaksakan terjadinya suatu perpecahan dan suatu gabungan partai yang baru²⁹.

Kondisi ini juga dialami oleh Partai Kongres yang setelah terpecah dan terbentuk menjadi Partai Kongres (I) pimpinan Indira Gandhi, muncul pertentangan-pertentangan dan perselisihan yang mengakibatkan Indira menyingkirkan saingan politiknya pada saat itu, yaitu Moraji Desai. Setelah keluar dari Partai Kongres (I), Moraji Desai kemudian membentuk Partai Janata yang pernah mengalahkan Partai Kongres (I) pada pemilu tahun 1977. Perpecahan itu terulang kembali ketika pada tahun 1997-1998, CWC melakukan kebijakan untuk mengangkat Sonia Gandhi sebagai ketua Partai Kongres (I). Kebijakan ini ternyata tidak diterima oleh seluruh

²⁹ Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik: sebuah Bunga Rampai*, P.T Gramedia, Jakarta, 1981, hal 73

anggota partai. Rasa ketidakpuasaan kemudian muncul dari 3 anggota senior partai yang kemudian keluar dari partai dan mendirikan Partai Kongres Tandingan.

Walau berbagai macam pertentangan dan perselisihan yang berakibat pada perpecahan, seringkali melanda Partai Kongres, namun partai ini tetap memiliki kekuasaan dan nama besar yang masih selalu diperhitungkan sebagai partai besar dalam setiap pemilu India. Kondisi semacam ini, menurut **Avery Leiserson** dan **Samuel Edersvelt** dikatakan sebagai suatu "sistem konflik" dan fungsi manipulatif organisasi kepartaian. Pendapat ini kemudian oleh **Myron Weiner** telah dirumuskan ke sebuah pemikiran bahwa keberhasilan Partai Kongres di India terletak pada 2 hal yakni dengan memanipulasi kesesuaian antara kepentingan partai dengan kepentingan anggotanya dengan mengembangkan mekanisme untuk memanipulasi dan mengatasi konflik-konflik internal secara efektif. Ia juga berpendapat bahwa Partai Kongres menyesuaikan diri dengan struktur kekuasaan lokal dengan merekrut orang-orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh di daerah tertentu. Partai Kongres melatih kader-kadernya dengan menjalankan peran politik seperti yang mereka lakukan didalam masyarakat tradisional sebelum masuk kedalam partai politik. Partai Kongres memanipulasi persengketaan fraksi-fraksi, antar kasta, dan bahasa dan mempergunakan pengaruhnya didalam pemerintah untuk memenangkan dan mempertahankan dukungan dari segi keuangan maupun pemilih. Partai memanfaatkan metode tradisional dan

menyelesaikan sengketa untuk mempertahankan kesatuan dalam partai³⁰.

Pendapat M. Winer ini juga sesuai dengan fungsi partai secara umum. Partai dituntut untuk dapat menjalankan fungsi sebagai penengah dalam penyelesaian konflik. Konflik ini dititikberatkan pada pertentangan dan perselisihan dalam tubuh partai-partai itu. Kondisi ini sangat memungkinkan bagi satu partai terutama partai yang berkuasa untuk secara efektif dapat menyelesaikan sengketa yang ada dalam partainya. Bagaimanapun, persengketaan dalam partai yang berkuasa akan menyebabkan pertentangan dalam negara³¹. Kenyataan ini nampak pada tingkah laku dan tindakan Partai Kongres (I) semenjak kekalahan partai ini pada pemilu tahun 1996. Dimana sejak itu muncul konflik-konflik baru sehingga Partai Kongres (I) kehilangan kekuasaan dan ambisinya untuk memperoleh kekuasaannya kembali ini dilakukan oleh Partai Kongres (I) dengan menjatuhkan setiap pemerintahan yang terbentuk lewat pengaruhnya yang masih terasa di parlemen, sejak pemerintahan Atal Bihari Vajpayee pada tahun 1996. Walau konflik-konflik intern yang ada di Partai Kongres (I) pada saat ini sudah mulai surut, namun sewaktu-waktu akan timbul kembali terutama setiap akan menjelang pemilu.

4.3.1 Isu Skandal Suap dan Korupsi

Moralitas politik yang diwariskan Gandhi-Nehru oleh rakyat India kembali dipertanyakan menyusul semakin merebaknya isu korupsi yang dilakukan oleh berbagai elit penguasa. Ada satu berita yang mengungkapkan, bahwa ketika India baru merdeka, Nehru

³⁰ Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok Penekan*, terjemahan Laila Hasyim, Bina Aksara IKAPI, Jakarta, 1984, hal 79

³¹ Sukarna, *Sistem Politik I*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal 115

yang terkenal dengan idealisme asketik-nya pernah juga menolak sejumlah tawaran cek senilai 14.000 dolar AS dari seorang industrialis. Pendirian Nehru yang tetap berpegang teguh pada kejujuran dan kemampuan akan diri sendiri ini menjadi pedoman bagi seluruh rakyat India. Pedoman tersebut tetap mengakar ketika 20 tahun yang lalu, regim-regim di AS dan Afrika terkenal gemar melakukan tindakan korupsi, India masih dianggap sebagai pemula dalam bidang itu. Sebagian memang masih terdapat beberapa politisi India yang masih menjunjung tinggi prinsip-prinsip hidup jujur, tenggang rasa, tidak mau memperkaya diri sendiri sebagai warisan dari luntunan dari para bapak bangsanya. Tapi kini India telah terseret kedalam praktek korupsi, bahkan masuk jajaran sebagai negara yang paling besar dalam melakukan tindakan korupsi di dunia. Dikalangan rakyat India sendiri, kombinasi antara tindakan korupsi, kolusi, komisi, suap dan penggelapan uang disebut dengan istilah "hawala".

Praktek korupsi dan korupsi sebenarnya mulai nampak nyata pada pemilu 1971. Ketika itu Perdana menteri Indira Gandhi berusaha menarik dukungan dengan menjanjikan hadiah. Otomatis kampanye yang dilakukan Indira pada waktu itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga sejumlah penguasa kemudian melakukan kolusi dengan para pengusaha dan para bos mafia. Akibatnya pada tahun 1972, muncul tuduhan bahwa para menteri dan Indira sendiri menerima dana untuk Partai Kongres (I) dari sejumlah penyelundup dan para bos mafia. Indira juga melakukan tindakan nepotisme dengan memberikan sejumlah proyek bagi anaknya, Sanjay, dimana sejumlah proyek itu sebagian besar memakal dana negara.

Sementara itu Rajiv Gandhi sendiri yang pernah dijuluki sebagai "Mr. Clean" pun tak lepas dari isu tersebut. Rajiv dituduh menerima sejumlah dana dari pengusaha Jain pada tahun 1986 untuk dana Partai Kongres (I). Ketika pemilu 1989, Partai Kongres (I) dibawah Rajiv Gandhi mengalami kekalahan karena merebaknya isu bahwa Rajiv telah menerima komisi dari perusahaan persenjataan Bofors, Swedia. Hampir semua anggota kabinet Rajiv dan anggota Partai Kongres (I) dituduh telah menerima komisi sebesar 30 juta dolar AS (sekitar 62 miliar rupiah), yang merupakan komisi atas penjualan perlengkapan arteleri India.

Partai Kongres (I) memang tidak akan lepas dari isu ini, isu yang paling parah menimpa Partai Kongres (I) pada waktu kepemimpinan Narashima Rao. Bisa dikatakan bahwa pemerintahan Rao merupakan pemerintah yang penuh dengan skandal korupsi. Kasus tersebut baru terkuak pada tahun 1995, yang mengarah pada tuduhan bahwa Rao ternyata telah terlibat praktek korupsi dan kolusi dengan pengusaha S.K Jain dari Madya Pradesh. Hubungan tersebut ternyata telah terjalin cukup lama yaitu antara tahun 1988-1991, ketika kampanye untuk pemilu tahun 1991, Rao telah menerima sekitar 30 miliar rupee untuk biaya pemilu tahun tersebut. Kemudian pada tahun 1995-1996, sekitar 115 politisi dan Rao dituduh telah menerima 650 miliar rupee untuk memenangkan kontrak proyek pengadaan tenaga pembangkit listrik.

Sementara itu pula, salah satu menteri dalam kabinet Rao, yaitu Sheila Kaul (menteri Pengembangan Kota) oleh pengadilan tinggi dituduh telah terlibat pembagian jatah 43 toko milik negara di New Delhi. Tanpa melalui proses penawaran umum yang terbuka, Sheila membagikan toko-toko tersebut kepada sanak saudaranya,

kawan-kawan dekat, beberapa pegawai kepercayaannya, sejumlah pejabat terkait dan para pejabat dewan pimpinan proyek toko tersebut. Otomatis pula, dalam kasus ini sejumlah pejabat di lingkungan kementerian juga ikut terlibat dan telah ditahan oleh pihak yang berwajib pada bulan April 1996³². Akibat dari berbagai skandal isu itulah, maka pada pemilu tahun 1996, Partai Kongres (I) mengalami kekalahan yang cukup fatal, dan setahun kemudian Raopun dituntut mengundurkan diri dari jabatan ketua.

Pengungkapan berbagai kasus skandal penyuapan di India ditunjang adanya sistem pers yang terbuka dan didukung oleh masyarakatnya yang terbuka (open society). Sementara itu pihak Mahkamah Agung dan Biro Penyelidikan Pusat (CBI) yang benar-benar bekerja secara independen, terus berusaha untuk membongkar tindakan-tindakan korupsi. Skandal ini memang benar-benar mempengaruhi kredibilitas partai-partai dan para politisi. Keadaan ini semakin dirasakan oleh Partai Kongres yang selama hampir 4 dasawarsa memegang kekuasaan di India, yang berakibat pada semakin terpuruknya partai besar ini dari setiap pemilu yang diselenggarakan belakangan ini³³.

4.3.2 Krisis kepemimpinan

Partai Kongres (I) sejak kemerdekaan India pada tahun 1947, sangat identik sekali dengan kepemimpinan warisan "Nehru-Gandhi". Kenyataanpun mengatakan Nehru-lah yang pertama kali merubah Partai Kongres dari sebuah gerakan kebangsaan (pimpinan Mahatma Gandhi) menjadi sebuah partai. Nehru pula-lah yang tetap

³² Kompas dan The Jakarta Post, 19 April 1996

³³ Rikard Bagun, *Skandal hawala VS Idealisme Asketik* (artikel), Kompas, 12 Mei 1996 dan Kompas, 21 April 1996

mengarahkan Partai Kongres sebagai partai yang berfaham sekuler dan tetap menjadi partai massa dengan keanggotaannya meliputi segala lapisan masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Nehru meyakinkan semua rakyat India bahwa persatuan bangsa adalah yang paling terpenting dan Partai Kongres berusaha untuk mewujudkan dengan berfaham pada sekularisme (tidak adanya dominasi pada satu agama tertentu) tersebut.

Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru, merupakan sosok pemimpin Partai Kongres yang sangat disegani dan akan selalu dihormati namanya sepanjang masa oleh seluruh rakyat India dan semua anggota Partai Kongres. Melekatnya jiwa Gandhi-Nehru ini telah membuat para anggota partai terutama para seniornya tidak menghendaki orang lain yang memimpin partai ini selain keturunan dari Gandhi-Nehru.

Bayang-bayang dinasti Gandhi-Nehru tak akan pernah lepas dari Partai Kongres, sehingga setiap kali pergantian kepemimpinan partai, maka perhatian para anggota akan langsung tertuju pada keturunan Gandhi-Nehru yang mereka anggap akan mampu memimpin partai warisan kakek dan ayah mereka. Indikasi adanya kurang kepercayaan anggota dan rakyat pendukung Partai Kongres (I) terhadap sosok selain Gandhi, yaitu :

- (1) adanya keyakinan dari para anggota partai bahwa hanya dengan kharisma Gandhi lah Partai Kongres (I) dapat bangkit kembali menjadi partai yang berkuasa dan menarik kembali simpati dari rakyat awam
- (2) kekecewaan dari para anggota terutama rakyat awam terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Narashima Rao dirasakan telah

menodai budaya idealisme asketik yang diwariskan oleh Nehru, dengan keterlibatan pemerintah Rao dan para menteri-menterinya dalam skandal suap dan korupsi.

Keinginan untuk tetap meneruskan dinasti Gandhi-Nehru tetap ada. Indira yang gagal untuk mempersiapkan anak bungsunya, Sanjay sebagai pengganti dirinya, kemudian meminta Rajiv, kakak Sanjay untuk masuk dalam keanggotaan partai yang akan dipersiapkan sebagai pengganti dirinya kelak. Setelah Indira tewas terbunuh oleh kelompok Sikhs, Rajivpun langsung ditunjuk untuk menggantikan kedudukan ibunya. Pengangkatan Rajiv ini ternyata telah mengantarkan Partai Kongres memenangkan pemilu tahun 1984 dengan suara mayoritas di parlemen. Kemenangan ini merupakan kemenangan terbesar dalam sejarah Partai Kongres dengan merebut 415 dari 545 kursi di parlemen.

Kemenangan demi kemenangan yang diraih Partai Kongres dibawah dinasti Gandhi telah membuat seluruh anggota partai ini semakin menyandarkan harapan sepenuhnya pada semua keturunan Gandhi untuk tetap memimpin Partai Kongres. Hal tersebut nampak pada saat Rajiv Gandhi meninggal, terdapat silang pendapat dan timbul perselisihan dalam menentukan siapa yang akan menggantikan Rajiv Gandhi. Apalagi pada saat itu Partai Kongres (I) masih harus mneghadapi proses pemilu tahun 1991. Bagaimanapun caranya pimpinan partai harus segera terpilih, maka kemudian secara mendadak para anggota mengusulkan Sonia Gandhi, janda Rajiv Gandhi untuk menduduki kursi kepemimpinan. Tapi usulan tersebut ditolak khususnya dari pihak Sonia Gandhi sendiri. Pengusulan Sonia tersebut lagi-lagi karena atas dasar keturunan Gandhi-Nehru. Walau akhirnya Narashima Rao lah yang terpilih

dengan alasan demi persatuan partai dan alasan yang lebih kuat karena Rao adalah sosok yang setia kepada dinasti Gandhi bukan diukur dari kesetiaanya kepada partai.

Silang pendapatpun terjadi lagi, tatkala Rao harus mundur dari ketua partai karena partai menganggap bahwa kekalahan Partai Kongres pada pemilu tahun 1996 disebabkan kepemimpinan Rao yang penuh dengan skandal korupsi. Pada mulanya pilihan kembali jatuh pada Sonia untuk memimpin partai, namun karena Sonia menolak dan tidak ada pilihan lain, maka pilihanpun mengarah pada Sitaram Kesri. Kepemimpinan Sitaram Kesri ini merupakan kepemimpinan yang tidak seluruh anggota dan rakyat India yang mendukung Partai Kongres menyetujui. Kepemimpinan Sitaram ini berhadapan dengan 2 kubu yaitu kubu yang masih mendukung Rao dan kubu yang tetap mengharapkan Sonia Gandhi sebagai ketua. Sullitnya posisi Sitaram inilah yang mengakibatkan Sitaram memiliki ambisi yang sangat kuat untuk bisa manaikan kembali kekuasaan Partai Kongres (I) dan sebagai bukti bahwa ia mampu membawa kearah kemajuan partai. Akibat ambisi Sitaram inilah, Partai Kongres (I) dengan berbagai cara telah menjatuhkan 3 pemerintahan setelah pemilu tahun 1996, yaitu pemerintahan Vajpayee, Inder Kumar Gujral dan H.D Godwa. Sehingga ketiga pemerintahan ini hanya bertahan selama beberapa bulan bahkan pemerintahan Vajpayee yang pertama hanya berlangsung beberapa hari.

Tindakan Sitaram dan partainya yang selalu menjatuh bangunan pemerintahan ini mendapat kecaman dari berbagi pihak terutama dari pihak politikus dan pers. Kredibilitas Sitaram sebagai ketua partaipun mulai diragukan. Menyadari kedudukannya yang dianggap rawan, maka Sitaram berusaha untuk membujuk Sonia

Gandhi untuk bersedia sebagai ketua partai. Keinginan Sitaram untuk mundur sebagai ketua dan digantikan oleh Sonia ini merupakan cara untuk menarik simpati dari para anggota Kongres (I) yang masih tetap menginginkan agar keturunan Gandhi-lah yang memegang kepemimpinan. Sonia pun pada akhirnya mau menerima usulan tersebut, sehingga pada tanggal 30 Desember 1997, resmilah Sonia sebagai ketua Partai Kongres (I).

Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh partai besar ini dalam mencari sosok pimpinan yang benar-benar mampu dengan tingkat kredibilitas yang tinggi, terletak pada kesalahan partai itu sendiri yang selalu mendasarkan kepemimpinannya hanya pada satu dinasti dan keluarga/keturunan (Gandhi-Nehru). Kesulitan inipun terjadi karena tidak adanya proses kaderisasi yang luas dan terbuka. Sehingga pada kasus ini berarti Partai Kongres (I) telah mengabaikan satu fungsi partai politik yaitu pendidikan politik. Pendidikan politik sangat dibutuhkan dalam proses kaderisasi sehingga diketahui secara pasti anggota-anggota yang benar-benar mampu (capabilitas) dan memiliki tingkat kredibilitas serta memiliki loyalitas yang tinggi pada partai³⁴.

Akibat tidak adanya proses kaderisasi inilah, maka selama ini Partai Kongres (I) mendasarkan kepemimpinannya hanya pada dinasti Gandhi-Nehru, yang kemampuan politiknya kadang masih diragukan. Kalaupun sempat ada 3 kepemimpinan diluar dinasti Gandhi (Bahadur Sastri, Rao dan Sitaram Kesri) itu hanyalah karena pihak keturunan Gandhi belum siap sebagai pimpinan partai dan itupun dipilih dari orang-orang yang benar-benar setia pada dinasti

³⁴ Sukarna, *op. cit.*, hal 91

Gandhi bukan karena loyalitas mereka pada partai. Sementara itu kepemimpinan Sonia Gandhi kali ini, dinilai para pengamat politik malah akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan di tubuh partai ini, karena ternyata tidak semua anggota partai pada akhirnya menyetujui kepemimpinannya.

4.3.3 Indikasi Perpecahan atas pro dan kontra terhadap Sonia Gandhi sebagai Ketua Partai Kongres (I)

Keputusan Partai Kongres (I) untuk menaikkan Sonia Gandhi sebagai ketua sempat mengundang pro dan kontra. Kebanyakan rakyat awam memang memihak dan mendukung kenaikan Sonia tersebut, karena dalam jiwa dan hati rakyat pendukung Partai Kongres (I) hanya dinasti Gandhi-lah yang dapat memimpin Partai Kongres (I). Sementara dalam keanggotaan Partai Kongres sendiri, ternyata tidak semua anggota mau menyetujuinya. Alasan utama ketidaksukaan sebagian kecil anggota partai ini, karena siapapun yang menjadi Presiden partai, maka ia juga calon Perdana Menteri India. Pada kenyataannya, dalam darah Sonia bukanlah asli India, tapi ia adalah keturunan Italia, sedangkan menurut konstitusi India tahun 1950, dinyatakan bahwa yang menjadi pimpinan negara India adalah keturunan asli India.

Sebenarnya isu kewarganegaraan ini pertama kali dihembuskan oleh lawan politik Partai Kongres (I) sendiri yaitu Vajpayee (BJP) yang pada April 1999, telah dijatuhkan pemerintahannya oleh Sonia dan partainya bersama-sama dengan partai oposisi yang lain, lewat mosi tidak percaya di parlemen. Ternyata isu itu sangat efektif, sehingga mampu mempengaruhi sebagian anggota partai dan tiga tokoh utama partai yang oleh Sonia mereka itu termasuk orang-orang terdekat. Ketiga tokoh partai

itu antara lain mantan Menteri Pertahanan, Sharad Pawar; mantan Ketua Majelis Rendah, P.A Sagwa; dan politikus senior, Tarig Anwar, yang menuntut agar Sonia segera mundur dari Partai Kongres (I). Bahkan ketiga tokoh inipun mengancam akan keluar dan mendirikan Partai Kongres Tandingan, jika Sonia tetap pada posisi ketua.

Adanya ancaman dari ketiga tokoh dan dengan pertimbangan demi keutuhan partai, maka pada tanggal 29 Mei 1999, dihadapan peserta sidang Komite Pekerja Kongres India, Sonia Gandhi menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Presiden partai. Pernyataan pengunduran diri Sonia ini sangat mengejutkan semua peserta sidang. Bagaimanapun, mereka telah mengharapkan bahwa dengan kharisma Gandhi-lah Partai Kongres (I) dapat terangkat kembali. Kekecewaan tidak hanya datang dari partai sendiri, namun juga dari rakyat pendukungnya. Mereka tetap mendesak agar Sonia mau kembali menjabat sebagai Presiden partai. Namun kekecewaannya atas sikap ketiga koleganya itu membuat Sonia tidak merubah pendiriannya.

Menanggapi keputusan Sonia yang tiba-tiba tersebut, mengakibatkan CWC mengambil keputusan untuk mengeluarkan ketiga tokoh senior tersebut. Akibat keputusan CWC tersebut, Pawar yang juga mengincar kursi Perdana Menteri, kemudian mendirikan **Partai Kongres Nasionalis (NCP)** yang bertempat di Mahasastra. Pawar dan partainya menyatakan diri siap untuk menghadapi Sonia dan partainya pada pemilu 1999. Ternyata dukungan terhadap NCP cukup banyak, terbukti 33 anggota Partai Kongres yang duduk dalam parlemen ikut bergabung dalam partai pimpinan Sharad itu.

Walau akhirnya Sonia mau kembali sebagai presiden Partai atas desakan CWC dan rakyat pendukungnya, namun keadaan Partai Kongres (I) dirasakan semakin lemah. Keluarnya ketiga tokoh beserta pengikutnya merupakan perpecahan Partai Kongres (I) yang terbesar selama sejarah Partai Kongres (I). Lemahnya posisi Partai Kongres karena Sharad Pawar merupakan tokoh kuat di negara bagian Mahasashtra yang menjadi salah satu basis kekuatan Partai Kongres (I). Sementara keluarnya Tarig Anwar yang merupakan pimpinan muslim dan anggota yang mewakili wilayah negara bagian Bihar juga akan mempengaruhi perolehan suara minoritas muslim. Keluarnya P.A Sagwa juga akan mempengaruhi perolehan suara rakyat Kristen karena Sagwa adalah okoh Kristen dan anggota parlemen dari Meghalaya sebuah negara kecil di India Utara³⁵. Selain itu pula sejak isu kewarganegaraan Sonia dihembuskan oleh Vajpayee, banyak anggota Partai Kongres (I) yang kemudian membelot dan bergabung dengan BJP.

4.4 Kekalahan Partai Kongres (I) pada pemilu India 1999

Pemerintah Vajpayee yang jatuh pada bulan April 1999 karena oposisi utama Sonia Gandhi dan partainya serta partai oposisi yang lain menarik dukungannya. Nasib pemerintah Vajpayee yang hanya berumur 13 bulan ini terhitung sejak bulan maret 1998 sampai 17 April 1998, jatuh karena kalah dalam voting mosi percaya diparlemen, dengan perbandingan cukup tipis 270-269 untuk Partai Kongres (I) dan oposisi.

³⁵ Tempo, 30 Mei 1999

Keputusan penyelenggaraan pemilu ini, terpaksa dilakukan karena pimpinan oposisi terbesar Sonia Gandhi atas perintah Presiden K.R Narayanan, gagal untuk membentuk pemerintahan alternatif. Akhirnya keputusan pemilu oleh Badan Komisi Pemilu ditetapkan pada bulan September-Oktober. Pemerintahan untuk sementara waktu masih dipegang oleh Vajpayee sambil menunggu pelaksanaan pemilu berakhir.

Pemilu ke-3 dalam 4 tahun (1996-1999) ini, akan dibagi dalam 5 putaran. Masing-masing putaran akan diikuti oleh beberapa negara bagian dan wilayah teritorial. Pemilu akan dijadwalkan pada tanggal 5, 11, 18, 25 September, dan diakhiri pada tanggal 3 Oktober 1999. Dana yang dibutuhkan sekitar 500 miliar dolar AS, dengan jumlah tenaga sekitar 4 juta tenaga untuk menangani 800.000 tempat pemungutan suara. Diikuti oleh seluruh partai nasional dan partai negara bagian. Kampanye dimulai pada bulan Mei yang diwarnai oleh perseteruan antara BJP dan Partai Kongres (I) sebagai partai besar³⁶.

BJP dalam kampanyenya tetap menyangkut isu kewarganegaraan Sonia untuk menjatuhkan Partai Kongres (I), selain isu senjata nuklir yang masih jadi andalan BJP. Sementara itu Sonia dalam kampanyenya lebih menitikberatkan pada stabilitas negara dengan tetap menyalahkan pemerintah Vajpayee atas pertempuran yang menelan korban lumayan banyak dipihak pemuda di Kargil, kawasan perbatasan Khasmir. NCP sebagai partai pecahan dari Kongres berusaha untuk tetap membayangkan langkah Kongres dengan berusaha menguasai basis kekuatan Kongres di

³⁶ Sharad Dhume, *Battle Royal*, (artikel), *Far Eastern Economic Review*, 23 September 1999, hal 24 dan *Gatra*, 15 Mei 1999, hal 101

Mahasastra lewat kepemimpinan Sharad Pawar (seorang tokoh andalan Kongres di Mahasastra). Berdirinya NCP ini memang mengancam Partai Kongres (I) untuk dapat lagi memperoleh suara mayoritas di Mahasastra³⁷. Untuk itu Sonia kemudian berusaha untuk mencari basis kekuatan lain yang diarahkan ke Karnataka yang mayoritas penduduknya merupakan pendukung tradisional Partai Kongres (I).

Banyak pihak yang menilai bahwa Vajpayee-lah yang akan berhasil duduk sebagai perdana menteri. Bagaimanapun, kalau Sonia yang menjadi perdana menteri rasanya masih sulit untuk diterima karena faktor keturunannya. Sementara itu, pemerintahan yang akan terbentukpun akan merupakan suatu koalisi partai-partai, karena tidak adanya partai yang menang mayoritas. Hasil perhitungan pemilu pun diketahui bahwa BJP hanya mampu meraih 181 kursi, Partai Kongres (I) meraih 125 kursi dan partai kecil 78 kursi. NCP sebagai partai saingan Partai Kongres (I) berhasil meraih kursi mayoritas di Mahasastra sebesar 130 kursi.

BJP dengan aliansinya dapat mengumpulkan 297 kursi, yang kemudian beberapa partai kecil bergabung untuk membentuk pemerintahan bersama Vajpayee, sehingga berhasil mengumpulkan 303 kursi, merupakan target yang melebihi jumlah meniamal 273 kursi diparlemen. Partai Kongres (I) dengan aliansinya hanya mampu mengumpulkan 134 kursi. Jika Partai Kongres (I) mau bergabung dengan NCP pimpinan Sharad Pawar, kemungkinan Partai Kongres untuk membentuk pemerintahan bisa terlaksana. Namun ternyata sampai perhitungan terakhir dilaksanakan belum

³⁷ Asia Week, 3 September 1999, hal 18

ada tanda-tanda dari kedua partai menunjukkan kerah aliansi bersama³⁸.

Nasib Partai Kongres (I) pun, seperti yang diramalkan politikus India, ternyata tidak jauh berbeda dengan kondisinya pada pemilu 1996. Namun dibawah Sonia Partai Kongres telah menunjukkan kemajuan yang berarti dengan mampu meraih suara mayoritas di Uttar Pradesh. Sonia sendiripun menilai bahwa pada pemilu tahun 1999 ini, Partai Kongres (I) benar-benar telah gagal. Kegagalan partai ini terjadi karena berkurangnya basis-basis kekuatan suara partai terutama di Mahasashtra, dimana Partai Kongres hanya mampu meraih 78 kursi, dari 285 jatah kursi di Mahasashtra.

³⁸ The Hindustan Times, 4 September 1999

BAB V

KESIMPULAN

Partai Kongres mulai mengalami perpecahan pada tahun 1969 dengan terbentuknya organisasi kecil yang disebut Indian Congress Organisation (ICO). Kemudian pada tahun 1978, dibawah Indira Gandhi berdirilah Partai Kongres-Indira (I). Partai Kongres (I) inilah yang kemudian mendominasi politik India meneruskan jejak Partai Kongres peninggalan Nehru. Lewat kepemimpinan Indira mulailah timbul konflik-konflik karena kebijaksanaan Indira yang selalu kontroversial.

Pada kepemimpinan Rajiv Gandhi, Partai Kongres (I) meraih suara mayoritas di parlemen pada pemilu tahun 1984 dan merupakan kemenangan terbesar sepanjang sejarah Partai Kongres (I).

Konflik intern partai mulai berkembang ketika Rajiv Gandhi wafat. Partai Kongres (I) seakan-akan kehilangan sosok pemimpin yang dapat mempersatukan partai. Krisis kepemimpinan pun terjadi. Walau Rao dapat memegang kepemimpinan cukup lama antara tahun 1991-1996, namun masa kepemimpinan Rao telah dianggap sebagai masa yang terburuk bagi Partai Kongres (I). Rao dianggap sebagai penyebab jatuhnya Partai Kongres (I) pada pemilu tahun 1996.

Selain faktor kepemimpinan yang menjadi sumber konflik intern Partai Kongres (I), berbagai macam isu skandal dan korupsi pun telah mewarnai Partai Kongres (I) selama partai ini berkuasa di India. Mulai dari pemerintahan Indira Gandhi sampai Rajiv Gandhipun terkena isu ini. Bahkan korupsi dan kolusi besar-

besaran telah dilakukan Partai Kongres (I) pada saat pemerintahan Narashima Rao.

Menjelang pemilu tahun 1999, muncul kembali konflik baru. Kali ini sumber konflik berawal dari naiknya Sonia Gandhi, isteri Rajiv Gandhi sebagai ketua partai. Setelah dilantik pada tanggal 30 Desember 1998, dan kemudian berhasil menjatuhkan pemerintahan koalisi A.B Vajpayee, posisi Sonia Gandhi kembali dipertanyakan. Sebagian anggota partai ternyata menyatakan tidak setuju jika Sonia Gandhi tetap menjadi Presiden Partai. Dipimpin oleh Sharad Pawar, Tarig Anwar dan P.A Sagwa, telah keluar tuntutan agar Sonia mundur dari ketua partai. Namun tuntutan tersebut tidak ditanggapi oleh CWC, bahkan kemudian CWC mengeluarkan ketiga senior partai tersebut.

Pemecatan ketiga senior partai itu, mengakibatkan Partai Kongres (I) pecah. Sharad Pawar dengan didukung 33 anggota Partai Kongres (I) yang duduk dalam parlemen mendirikan Partai Congress Nasionalis (NCP). Pendirian partai ini tentu saja mempengaruhi perolehan suara di pemilu 1999, karena NCP telah menguasai hampir seluruh kursi yang ada di Mahasatra. Seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya wilayah Mahasatra merupakan basis kekuatan Partai Kongres (I).

Munculnya konflik-konflik intern inilah yang menyebabkan dukungan rakyat India terhadap partai ini menjadi menurun. Hal ini terbukti semenjak pemilu 1996 sampai pemilu 1999 ini, Partai Kongres (I) selalu mengalami kekalahan. Akibat konflik intern ini pula yang menyebabkan Partai Kongres (I) selalu berusaha untuk menjatuhkan setiap pemerintahan yang terbentuk lewat pengaruhnya di parlemen. Sehingga mengakibatkan pemerintahan di India tidak pernah stabil dan bertahan lebih dari 2 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Amal, Ichlasul, 1988, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, P.T Tiara Wacana, Yogyakarta
- Budiarjo, Miriam, 1982, *Partisipasi dan Partai Politik, sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, P.T Gramedia, Jakarta
- Brass, R, Paul, 1989, *Political Parties and Electoral Politics*, Marshal M Bauton and Philip Oldenburg (eds), *Indian Briefing*, London, West View Press
- Chopra, VD, RX Mishra, Nirmal Sigh, 1980, *Agony of Punjab*, Patriot Published, New Delhi
- Clark, P, Robert, 1989, *Menguak Kekuasaan dan Politik di Dunia Ketiga*, ed 3. Terjemahan R.G Soekarjo, Erlangga, Jakarta
- Clelland, Charles, Mc, 1981, *Ilmu Hubungan Internasional, Teori dan Sistem*, C.V Rajawali, Jakarta
- Daugherty, E, James, Robert L Pfalagraf, *Beberapa Teori Hubungan Internasional*, terjemahan Amin Rais, Gajahmada University Press, Yogyakarta
- Dubay, Kant, Ravi, 1986, *Prime Minister Rajiv Gandhi : Statement on Foreign Policy*, University Press, New Jersey, Princeton
- Duverger, Maurice, 1984, *Partai Politik dan Kelompok Penekan*, terjemah Dra. Laila Hasyim, P.T Bina Aksara IKAPI, Jakarta
- Gokhale, B.G, 1990, *Negara dan Bangsa (Lands and People)*, Asia Jilid 3, Perpustakaan Nasional, P.T Widyadara
- Hadi, Sutrisno, 1975, *Methodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta
- _____, 1987, *Methodologi Research untuk Penulisan Skripsi, Paper, Tesis, dan Desertasi*, Yayasan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta

Haus, Charles, 1997, *Comparative Politics: Domestic Responses Challengers, India, USA* West Publishing Company, George Washington University

Mulia, T.S.G, 1959, *India : Sejarah Politik dan Pergerakan Kebangsaan*, P.T Balai Pustaka, Jakarta

Nasikun, 1993, *Sistem Sosial Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Plano, J.C, Robert E. Riggs, Helenan S Robin, 1985, *Kamus Anallsa Politik*, C.V Rajawali, Jakarta

Raghavan, GNS, 1983, *Introducing India, Indian for Cultural Relation*, New Delhi

Sastroatmojo, Sudijono, 1995, *Prilaku Politik*, IKIP Semarang Press, Semarang

Soekanto, Soerjono, Ratih Lestarini, 1988, *Fungstonalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*, Sinar Grafika, Jakarta

Sukarna, 1990, *Sistem Politik I*, P.T Citra Aditya Bhakti, Bandung

Srinivasan, T.N, 1994, *Foreign Trade and India's Development*, ICS Press, San Francisco, California

The Liang Gie, 1974, *Ilmu Politik*, Gajahmada University Press, Yogyakarta

Artikel :

Mazumdar, Sudip, 1997, *Ambition Joined to Pride*, dalam Newsweek (vol. CXXX No. 5), 4 Agustus

Laporan Utama, 1991, *Sebuah Kebetulan Sejarah*, dalam Tempo, 1 Juni

Setelah Ledakan Di Sriperembudur, 1991, Tempo, 1 Juni

Prasanan, R, 1991, *Avoid at The Top: Whenever is Elected Clef Congress (I) Will Never be The Same Again*, dalam The Hindustan Times, 2 Juni

Tajuk Rencana, 1991, *Rao Memimpin Partai Kongres (I)*, dalam Pelita, 31 Mei

Donald, Mc, Harnish, Rita Manchanda, 1992, *Shattered Covenant*, dalam Far Eastern Economic Review

_____, 1993, *Ayodya Blacklash (The BJP Plain To Force Early Election)*, dalam Far Eastern Economic Review

Manchanda, Rita, 1993, *New Face, Old Policy*, dalam Far Eastern Economic Review

Sidhva, Shirad, 1997, *Delhi in Disarray (Congress Move Plunges India into Political Uncertainty)*, dalam Far Eastern Economic Review, 27 April

Bagun, Rikard, 1996, *Tema Kampanye Pemilu India, Bukan Stabilitas dan Pembangunan*, dalam Kompas, 21 April

_____, 1996, *Skandal Hawala VS Idealisme Asketik*, dalam Kompas, 21 April

Dhume, Sharad, 1999, *Battle Royal*, dalam Far Eastern Economic Review, 23 September

Media massa :

Kompas, 27 April 1991

_____, 30 Mei 1991

_____, 31 Mei 1991

_____, 21 Juni 1991

_____, 10 Mei 1996

_____, 31 Mei 1996

_____, 29 Mei 1996

_____, 15 Juni 1996

_____, 19 Desember 1996

_____, 5 April 1997

- _____, 11 April 1997
_____, 12 April 1997
_____, 5 Desember 1997
_____, 6 Desember 1997
_____, 31 Desember 1997
The Hindustan Times, 1 Juni 1991
_____, 4 September 1999
Suara Karya, 1 juni 1991
_____, 21 Juni 1991
_____, 30 Mei 1991
_____, 11 Mei 1996
_____, 22 November 1997
Pelita, 31 Mei 1991
Republika, 22 Juni 1992
_____, 23 April 1996
The Jakarta Post, 22 Juni 1991
_____, 8 Januari 1996
_____, 11 Agustus 1997
Suara Pembaharuan, 29 Mei 1996
_____, 31 Maret 1997
_____, 12 Agustus 1997
Media Indonesia, 11 Agustus 1997
Bisnis Indonesia, 31 Mei 1996
_____, 19 Desember 1996
_____, 11 November 1997
Merdeka, 11 Mei 1996
_____, 19 November 1997
_____, 22 November 1997
Panji Masyarakat, No.2 tahun III, 28 April 1999

_____, No.7 tahun III, 2 Juni 1999

Tempo, 30 Mei 1991

_____, 1 Juni 1991

_____, 30 Mei 1999

Asia Week, 3 September 1999

Gatra, 15 Mei 1999

Lain-lain :

India dan Rajiv Gandhi, Microsoft Encarta Encyclopedia, 1993-1995

Asia Pacific Profiler 1997/ Asia Pacific Economic Group, Australia, National University, Student Edition

Collier, P.F, Lauren S Bahr, Bernard Johnston, ed, *Collier's Encyclopedia With Bibliography and Index*, vol 12, New York, Toronto, Sidney, 1993

Indian, Politics/Social Affairs, Asia 1997 Year Book, Far Eastern Economic Review

The Indian Institute of Public Administration: *The Organisation of Government of India* (New Delhi, Somaiya publication, PVT. Ltd, 1971)

India (1988-1989): A Reference Annual, Research and Reference Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India

Laporan Kedutaan Besar RI di New Delhi, India tahun 1985-1986

Laporan Kedutaan Besar RI di New Delhi, India tahun 1989-1990

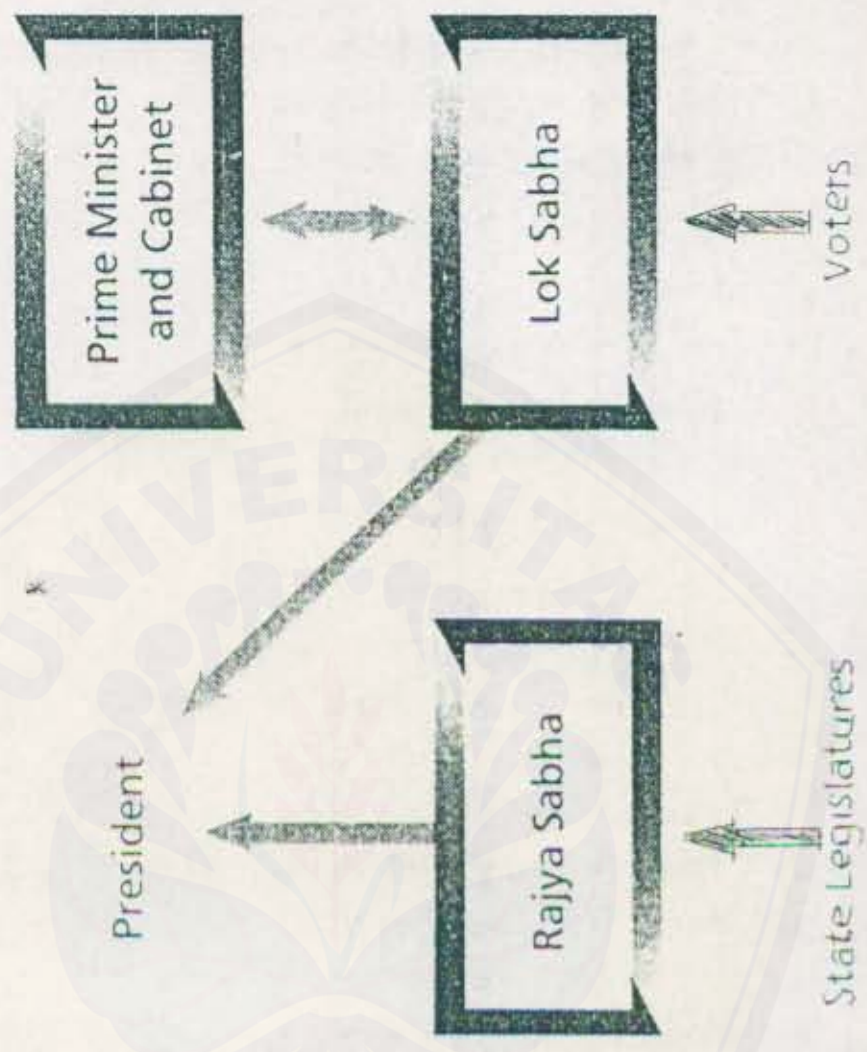
Laporan penelitian: Sofyan Naim, *Hubungan India - Pakistan pada Era Meredanya Negara Adikuasa*, FKIP Padang, 1990

Lampiran

India



FIGURE 13.1 Decision Making In India



Sumber : Charles Hauss " Comparative Politics: Domestic Responses to Global Challengers " second ed, USA West Publishing Company, George Washington University, 1997

PRESIDEN PARTAI KONGRES/ PARTAI KONGRES (I)

Nama	Tahun
Nehru	1928-1964
Lal Bahadur Shastri	1964-1966
Indira Gandhi*	1966-1984
Rajiv Gandhi	1984-1989
Narashima Rao	1989-1996
Sitaram Kesri	1996-1997
Sonia Gandhi	1997-

* Pada tahun 1978, Indira Gandhi merubah nama Partai Kongres menjadi Partai Kongres-Indira (I)

Sumber : Kompas, The Hindustan Times

PERDANA MENTERI INDIA SEJAK KEMERDEKAAN INDIA

Nama	Tahun
Jawaharal Nehru	1947-1964
Lal Bahadur Shastri	1964-1966
Indira Gandhi	1966-1977
Moraji Desai	1977-1979
Charan Sigh	1979-1980
Indira Gandhi	1980-1984
Rajiv Gandhi	1984-1989
V. P Sigh	1989-1990
Chandra Shekhar	1990-1991
P. V Narashima Rao	1991-1996
Atal Bihari Vajpayee	1996 (hanya 13 hari)
H. D Godwa	1996-1997
Inder Kumar Gujral	1997-1998
Atal Bihari Vajpayee	1998-1999
Atal Bihari Vajpayee	1999-

Sumber :

- ♦ Charles Haus, *Comparative Politics : Domestic Responses to Global Challengers*, Second Edition, George Washington University, USA West Publishing Company, 1997, Chapter 13: India
- ♦ Kompas, *Far Eastern Economic Review*

PEROLEHAN JUMLAH KURSI PARTAI KONGRES (I)
DI LOK SABHA

Tahun	Prosentase Suara	Jumlah Kursi
1952	45,0	364
1957	47,8	371
1962	44,7	361
1967	40,8	283
1971	43,7	352
1977	34,5	154
1980	43,7	353
1984	48,1	415
1989	39,5	197
1991	36,0	226
1996	26,5	139
1998	28,8	166
1999	25,9	134

Sumber :Kompas, Far Eastern Economic Review, The Hindustan Times

	NDA	CONG & ALLIES	LEFT	OTHERS
FINAL RESULTS(538)	297	134	41	66

Headlines

- Lok Sabha to be constituted tomorrow
- Withdrawal of support to RJD a must, says Congress leader
- NCP expresses willingness to negotiate with Congress
- Vora calls for review of Congress' performance in MP
- Pilot rules out challenge to Sonia's leadership
- DMK executive meet to decide stand on joining new Govt.
- BJP, JD(U) make a dent in RJD's bastion in Bihar
- Pilot rules out challenge to Sonia's leadership
- AP voters endorse Naidu's claim to NTR's legacy
- Independent enters assembly by 126 votes margin

Party-wise breakup of NDA

PARTY	SEATS
BJP	181
TDP	30
JD(U)	19
SS	15
DMK	12
BJD	10
TC	8
INLD	5
PMK	5
MDMK	4
LTC	3
SAD	2
HVC	1
MGRADMK	1
IND/Menaka	1

Parties	Won
BJP+Allies	297
Cong.+Allies	134
Others	106
Total	537

Bird's view on results'99

Election'99 Results (Party wise)		
PARTY NAME AND ABBREVIATION	CONTESTED	WON
Bharatiya Janata Party (BJP)	339	182
Indian National Congress (INC)	453	112
Communist Party of India (Marxist) (CPM)	72	32
Janata Dal (United) (JD(U))	60	20
Bahujan Samaj Party (BSP)	225	14
Communist Party of India (CPI)	54	4
Janata Dal (Secular) (JD(S))	96	1
Telugu Desam (TDP)	34	29
Samajwadi Party (SP)	151	26
Shivsena (SHS)	63	15
Dravida Munnetra Kazhagam (DMK)	19	12
All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (ADMK)	29	10
Biju Janata Dal (BJD)	12	10
All India Trinamool Congress (AITC)	29	8
Nationalist Congress Party (NCP)	132	7
Rashtriya Janata Dal (RJD)	61	7
Pattali Makkal Katchi (PMK)	8	5
Indian National Lok Dal (INLD)	5	5
Jammu & Kashmir National Conference (JKN)	6	4
Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam (MDMK)	5	4
Revolutionary Socialist Party (RSP)	5	3
All India Forward Bloc (AIFB)		
Muslim League Kerala State Committee (MUL)	12	2
Shiromani Akali Dal (SAD)	9	2
Samajwadi Janata Party (Rashtriya) (SJP(R))	14	1
Manipur State Congress Party (MSCP)	2	1
Himachal Vikas Congress (HVC)	1	1
Kerala Congress (KEC)	1	1
Kerala Congress (M) (KEC(M))	1	1
Sikkim Democratic Front (SDF)	1	1
Rashtriya Lok Dal (RLD)	15	2
Akhil Bhartiya Lok Tantrik Congress (ABLTC)	4	2
Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) (CPI (ML)(L))	56	1
Bharipa Bahujan Mahasangha (BBM)	4	1
Peasants And Workers Party of India (PWPI)	2	1
All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen (AIMIM)	1	1
M.G.R.Anna D.M.Kazhagam (MADMK)	1	1
Shiromani Akali Dal (Simranjit Singh Mann) (SAD(M))	1	1
Independent (IND)		
TOTAL	1945	5

ELECTION SCHEDULE

telecom services
 Toll Free Service
 A PAY SERVICE Virtual Card Calling



NEWS UPDATE

States going for polls on September 5, 1999

STATES GOING FOR POLLS	Number of constituencies	Total constituencies
Andhra Pradesh	15	42
Bihar	2	2
Chhattisgarh	26	26
Madhya Pradesh	10	10
Madhya Pradesh (Special)	2	8
Madhya Pradesh (Special)	15	28
Madhya Pradesh (Special)	24	48
Madhya Pradesh (Special)	13	13
Madhya Pradesh (Special)	10	25
Madhya Pradesh (Special)	19	39
Madhya Pradesh (Special)	1	1
Madhya Pradesh (Special)	1	1
Madhya Pradesh (Special)	1	1
Madhya Pradesh (Special)	1	1
Madhya Pradesh (Special)	1	1
Madhya Pradesh (Special)	7	7
Madhya Pradesh (Special)	1	1

States going for polls on September 11, 1999

STATES GOING FOR POLLS	Number of constituencies	Total constituencies
Andhra Pradesh	15	42
Bihar	2	8
Chhattisgarh	13	28
Madhya Pradesh	29	20
Madhya Pradesh (Special)	14	40
Madhya Pradesh (Special)	24	43
Madhya Pradesh (Special)	25	25
Madhya Pradesh (Special)	20	39

States going for polls on September 18, 1999

STATES GOING FOR POLLS	Number of constituencies	Total constituencies
Andhra Pradesh	14	42
Bihar	10	54
Jammu and Kashmir	2	6
Madhya Pradesh	14	40
Uttar Pradesh	30	85

States going for polls on September 25, 1999

STATES GOING FOR POLLS	Number of constituencies	Total constituencies
------------------------	--------------------------	----------------------

Meghalaya	2	2
Mizoram	1	1
Nagaland	1	1
Orissa	10	21
Uttar Pradesh	24	85

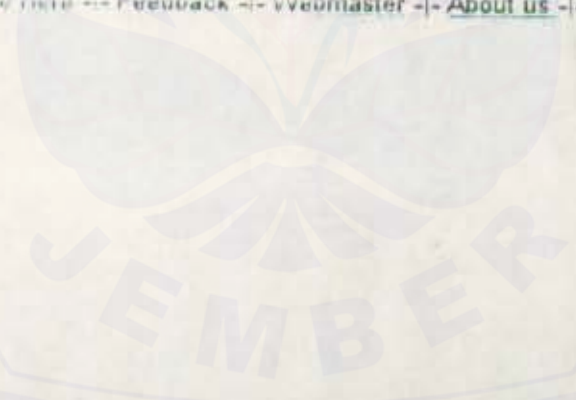
States going for polls on October 3, 1999

States of Union + territories	Number of constituencies	Total constituencies
Arunachal Pradesh	2	2
Assam	11	14
Bihar	16	54
Lakshadweep	1	1
Manipur	1	2
Orissa	11	21
Sikkim	1	1
Tripura	2	2
Uttar Pradesh	31	95
West Bengal	12	42

... 1999 and is expected

... like **MTNL**

[Home](#) | [Elections Home](#) | [Discussion Board](#) | [Freeisting](#)
[Feedback](#) | [Vedmaster](#) | [About us](#) | [Disclaimer](#)



PARTY MANIFESTOES

Elections '99

Nothing
Connects like **MTNL**

CONCLUSIONS

Indian National Congress

The Congress has tried to project itself as a government that can ensure stability. Highlighting the period from 1991 to 1996, it states that the unprecedented increase in investments in rural and social development is the product of a stable government.



It stresses on secularism and emphasizes that religion cannot be used as an instrument of mobilisation, to whip up passions and sentiments. The Congress vehemently rejects the use of religion for political ends. It rejects the mobilisation of people by stirring up religious passions.

It also emphasizes the need for decentralization and states that the "panchayats and nagarpalikas are not the third tier of development, as they are often perceived. They are in fact, the first tier of our vast democracy".

With a strong statement- "Every time there has been a non-Congress Government in Delhi, the first and the most immediate casualty has been the economy", the Congress reiterates its firm commitment to faster economic reforms with a human face.

Reflecting on the Swadeshi movement during the struggle for independence and the fifty years since independence it stresses that "Self-reliance must remain our objective but in the changing times, it must be given contemporary meaning.

Other Highlights

- Step up the momentum of public investment in agriculture, especially in the backward and poorer regions.
- The eradication of poverty is the single most important objective of national development.
- The effective devolution, within the next five years, to the Panchayati Raj institutions of all subjects listed in the Eleventh Schedule and to the nagarpalikas of subjects listed in the Twelfth Schedule of the Constitution.
- Co-operatives to be liberated from undue political and bureaucratic interference.
- Public Distribution System to be substantially to ensure that essential commodities reach families below the poverty line at the subsidised prices.
- Separate statutory National Commission for Scheduled Tribes and Scheduled Castes will be set up.
- These will be equipped with administrative, judicial and financial

MTNL
ELEPHANT OF
INDIA NEW DELHI

Sabhas and Vidhan Parishads.

The Congress is committed to the rapid elimination of all forms of child labour.

- Special insurance and social security schemes for the girl child among the weaker sections will be launched.
- The revenue deficit will be phased out over the next three to four years and the combined fiscal deficit of the Centre and the states will be stabilised at a level below 4% of GDP.
- The debt market will be developed as will the retail government gilts market. Foreign Institutional Investors (FIIs), Venture Capital Funds and Private Equity Funds will continue to be actively encouraged.
- The insurance industry will be restructured to enhance the flow of long-term funds to infrastructure development.
- A High-Power Commission will be immediately set up to examine and suggest solutions to the multidimensional problems and challenges faced by the seven North-Eastern States.
- The Congress stands committed to respecting Article 370 in letter and spirit.
- The new states of Uttarakhand, Chattisgarh and Jharkhand will be created without any further delay.
- The Congress attaches high priority to the passage of a suitable Lok Pal Bill.

Back



[Indiamart Home](#) -|- [Elections Home](#) -|- [Discussion Board](#) -|- [Freelisting Advertise Here](#) -|- [Feedback](#) -|- [Webmaster](#) -|- [About us](#) -|- [Disclaimer](#)

Site Created & Maintained By : [InterMESH Systems](#)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI.
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Veteran No. 3 Telp. (0331) 422723 Fax. (0331) 425540 Jember (68118)

Nomor : **786** / 1152 / B / 1999
Lampiran : -

01 OCT 1999

Perihal : Permohonan ijin mengadakan Penelitian

Kepada : Yth.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan ijin mengadakan penelitian untuk memperoleh data :

Nama / NIM : Evi Herini Agustini / E1A1 05036
Kelas / Mahasiswa : Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Jember
Alamat : Jl. Kalimantan no. Kelinci SA Jember
Judul Penelitian : *Pengaruh Konflik Intern Terhadap Kemerossatan Pemor Partai*

Di Urahkan : *Kongres Paven Rajiv Gandhi (1991) Menjelang Pemilu India*
Tempat Penelitian : Jakarta
Lokasi Lain : -

Untuk melaksanakan penelitian tersebut di atas, mohon bantuan serta berkenan Saudara untuk memberikan ijin kepada Evi Herini Agustini beserta dosen pembimbing mengadakan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demi ini atas perlakuan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Telp. 422723
Faks. 425540
Nip. 110 531 776

1. Kepala Biro Penelitian
2. Kepala Biro Akademik
3. Kepala Biro Administrasi
4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat



Kepada Yth. : Bpk. Drs. Liakip, SU
Ketua Lembaga Penelitian - Universitas Jember
Jl. Veteran No. 3 Jember
JAWA TIMUR 68118

SURAT KETERANGAN

Nomer : 0080/Rea/Perp/PDII/1999

Yang bertanda tangan di bawah ini,

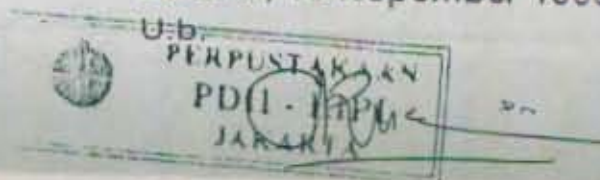
Nama : Ir. Endang Sri Rusmiati R.
N I P : 320006080
Jabatan : Kepala Sub Bidang Jasa Pembaca
Perpustakaan PDII - LIPI

Menerangkan bahwa,

Nama : DWI HARINI AGUSTIN
N I M : E1A1 95-036
Pekerjaan : Mhs. Universitas Jember FISIP - Hubungan Internasional

Telah mengadakan studi literatur / pustaka pada perpustakaan Pusat Dokumen dan Informasi Ilmiah - LIPI.

Jakarta, 15 Nopember 1999



Ir. Endang Sri Rusmiati R.
NIP : 320006080



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN RESEARCH

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : ENI HARINI AGUSTIN

Status : MAHASISWA FISIP JEMBER

Alamat : JL. KALIMANTAN GG. KELINCI BA Jember

telah melaksanakan research/survey pada Perpustakaan
Centre for Strategic and International Studies (CSIS)

dalam bidang:

Faktor-Faktor Konflik Intern Partai

Kongres (I)

(studi kerus tentang Kekalahan Partai

Kongres (I) dalam Pemilu India 1996-

1999)

untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikian agar yang bersangkutan menjadi maklum.

Jakarta, 15.11.1999



Soedarso

Kepala Perpustakaan